



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30  
TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan serta Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan menjadi Pusat Kesehatan Pertahanan serta Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan menjadi Biro Informasi Pertahanan;
- b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf t ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kemhan terdiri atas:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
  - c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
  - d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
  - e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
  - f. Inspektorat Jenderal;
  - g. Badan Logistik Pertahanan;
  - h. Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan;
  - i. Badan Cadangan Nasional;
  - j. Badan Teknologi Pertahanan;
  - k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;
  - l. Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan;
  - m. Staf Ahli Bidang Politik;
  - n. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
  - o. Staf Ahli Bidang Sosial;
  - p. Staf Ahli Bidang Keamanan;
  - q. Pusat Data dan Informasi;
  - r. Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan;

- s. Pusat Pengelolaan Kawasan;
  - t. Pusat Kesehatan Pertahanan; dan
  - u. Pusat Kelaikan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan huruf f Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Tata Usaha dan Protokol;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Informasi Pertahanan;
- g. Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
- h. Biro Peraturan Perundang-undangan.

3. Judul Bagian Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Biro Informasi Pertahanan

4. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Biro Informasi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan informasi pertahanan serta pelayanan perpustakaan di lingkungan Kemhan.

5. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Biro Informasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- b. pengelolaan informasi pertahanan;
- c. pengelolaan dan pemberian layanan perpustakaan;
- d. pengelolaan informasi dan dokumentasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi pertahanan;
- f. pengoordinasian pelayanan publik Kemhan; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

6. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Biro Informasi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Kemitraan;
- b. Bagian Pemberitaan;
- c. Bagian Opini;
- d. Bagian Informasi Publik dan Perpustakaan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, analisis, pengharmonisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rancangan Peraturan Menteri dan rancangan peraturan internal dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Kesehatan Pertahanan, Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Biro Informasi Pertahanan serta keikutsertaan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

8. Ketentuan Pasal 749 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 749

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AU, Biro Tata Usaha dan Protokol dan Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, dan Pusat Pengelolaan Kawasan.

9. Ketentuan Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 753

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada satuan kerja UO TNI AD, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Pusat Kesehatan Pertahanan serta unit pelaksana teknis di bawahnya, dan Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional.

10. Judul BAB XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX  
PUSAT KESEHATAN PERTAHANAN

11. Ketentuan Pasal 1416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1416

- (1) Pusat Kesehatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Pusat.

12. Ketentuan Pasal 1417 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1417

Pusat Kesehatan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan dukungan rehabilitasi pasca cedera dan penyandang disabilitas serta kesehatan pertahanan.

13. Ketentuan Pasal 1418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1417, Pusat Kesehatan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan kesehatan serta perumahsakitan pertahanan;
- b. pengoordinasian rehabilitasi dan kesehatan serta kontingensi pertahanan di lingkungan rumah sakit Kemhan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, dan kesehatan pertahanan, serta perumahsakitan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi medik, psikologi, sosial, dan vokasional, kesehatan pertahanan serta perumahsakitan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

14. Ketentuan Pasal 1419 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1419

Pusat Kesehatan Pertahanan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Vokasional;
- c. Bidang Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
- d. Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

15. Ketentuan Pasal 1437 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1437

Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan kontingensi kesehatan serta perumahnyasakitatan di lingkungan Kemhan.

16. Ketentuan Pasal 1438 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1437, Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan perumahnyasakitatan di lingkungan Kemhan;
- b. pelaksanaan kerja sama dan kontingensi kesehatan;
- c. pelaksanaan layanan kesehatan tertentu; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan dan perumahnyasakitatan kesehatan.

17. Ketentuan Pasal 1439 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1439

Bidang Kerja Sama Kesehatan dan Kontingensi terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan;
- b. Subbidang Kontingensi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 1490 diubah sehingga Pasal 1490 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1490

- (1) Unit Kerja yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya

menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.

- (2) Kepala Biro Informasi Pertahanan yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19. Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2026

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2026

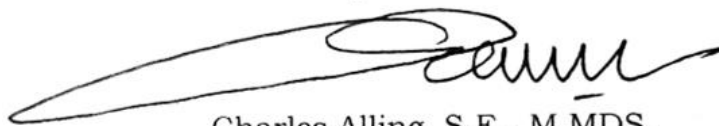
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 496

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charles Alling', with a large, sweeping initial 'C'.

Charles Alling, S.E., M.MDS.  
Brigadir Jenderal TNI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

ESELON PIMPINAN



ESELON PEMBANTU PIMPINAN

- BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- BIRO KEPEGAWAIAN
- BIRO HUKUM
- BIRO TATA USAHA DAN PROTOKOL
- BIRO UMUM
- BIRO INFORMASI PERTAHANAN
- BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- SA POLITIK
- SA EKONOMI
- SA SOSIAL
- SA KAM



- SET ITJEN
- IT I
- IT II
- IT III
- IT IV
- IT V

ESELON PELAKSANA



- SET DITJEN
- DIT JAKSTRAHAN
- DIT RAHKOMHAN
- DIT KERSINHAN
- DIT WILHAN



- SET DITJEN
- DIT RENBANGHAN
- DIT RENPROGAR
- DIT MINLAKGAR
- DIT DALRENHAN PNB



- SET DITJEN
- DIT TEK POTHAN
- DIT INDHAN
- DIT SDM POTHAN
- DIT SDAB POTHAN



- SET DITJEN
- DIT SDM
- DIT MAT
- DIT FASJAS
- DIT KES

ESELON PENDUKUNG



- SET BADAN
- PUS BIA
- PUS ALPALHAN
- PUS KON
- PUS KOD
- PUS BMN



- SET BADAN
- PUS RENHARWAT ALPALHAN
- PUS RENHARWAT SARHAN
- PUS LOLA FARHAN



- SET BADAN
- PUS KOMCAD
- PUS BELNEG
- PUS VET



- SET BADAN
- PUS TEK WAHANA DARAT
- PUS TEK WAHANA LAUT
- PUS TEK WAHANA UDARA



- SET BADAN
- PUS PIMJEMENHAN
- PUS BAHASA
- PUS KOMP BELNEG
- PUS LOLAKOM SDM



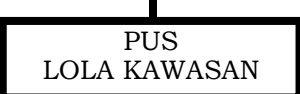
- SET BADAN
- PUS AN INTELHAN
- PUS SIBER INTELTEKHAN
- PUS KOMDUK INTELHAN



- BAG TU
- BID JEMENTA SIS AP
- BID PAM SISINFO SAN
- BID INFRA TIK



- BAG TU
- BID APK
- BID BEN
- BID DALKU



- BAG TU
- BID PAM
- BID HARBANG
- BID KERMA BANG INSTAL

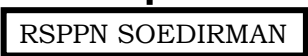


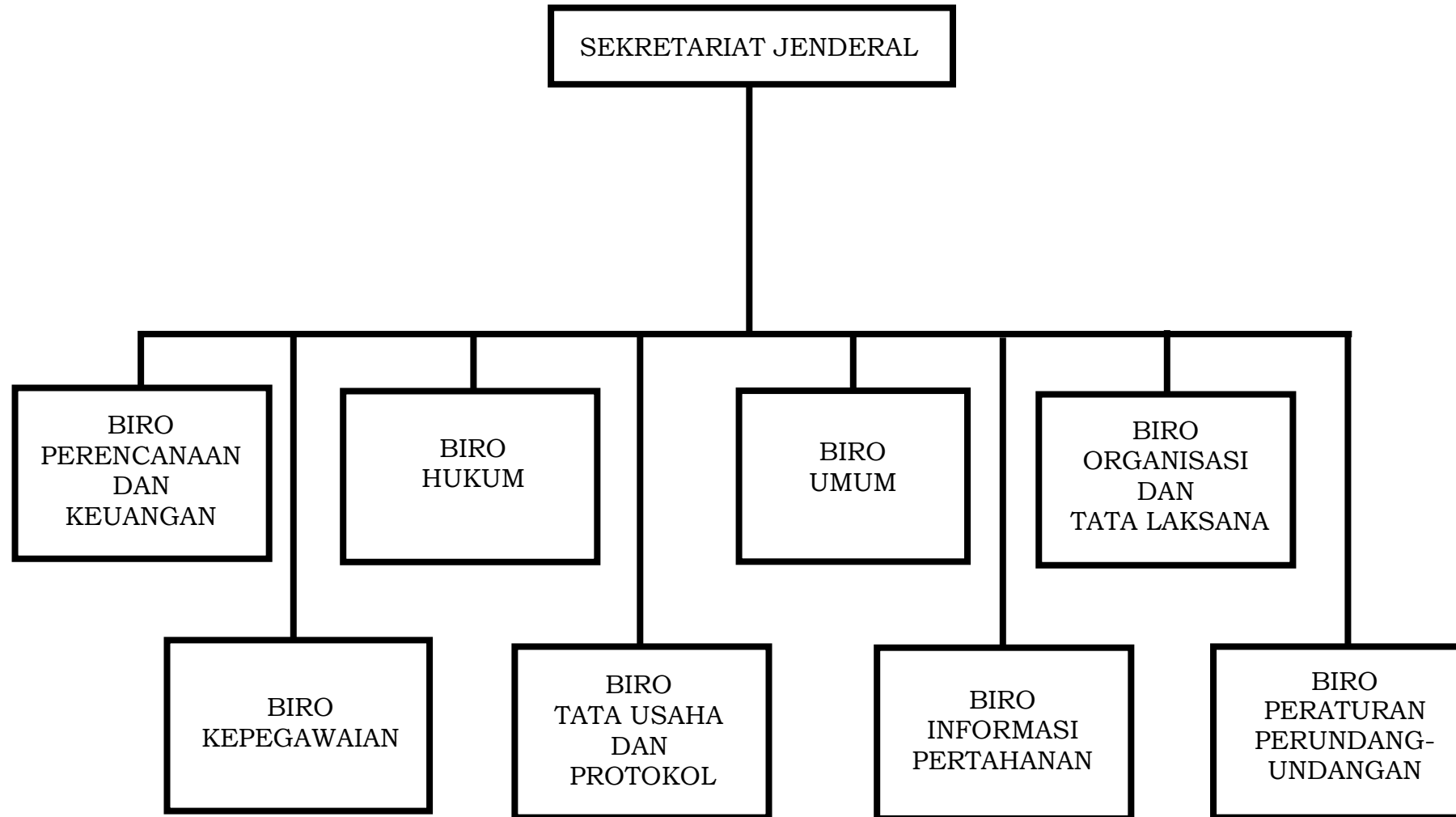
- BAG TU
- BID REHAB SOSVOK
- BID REHAB MED PSI
- BID KERMAKES KONTINGEN

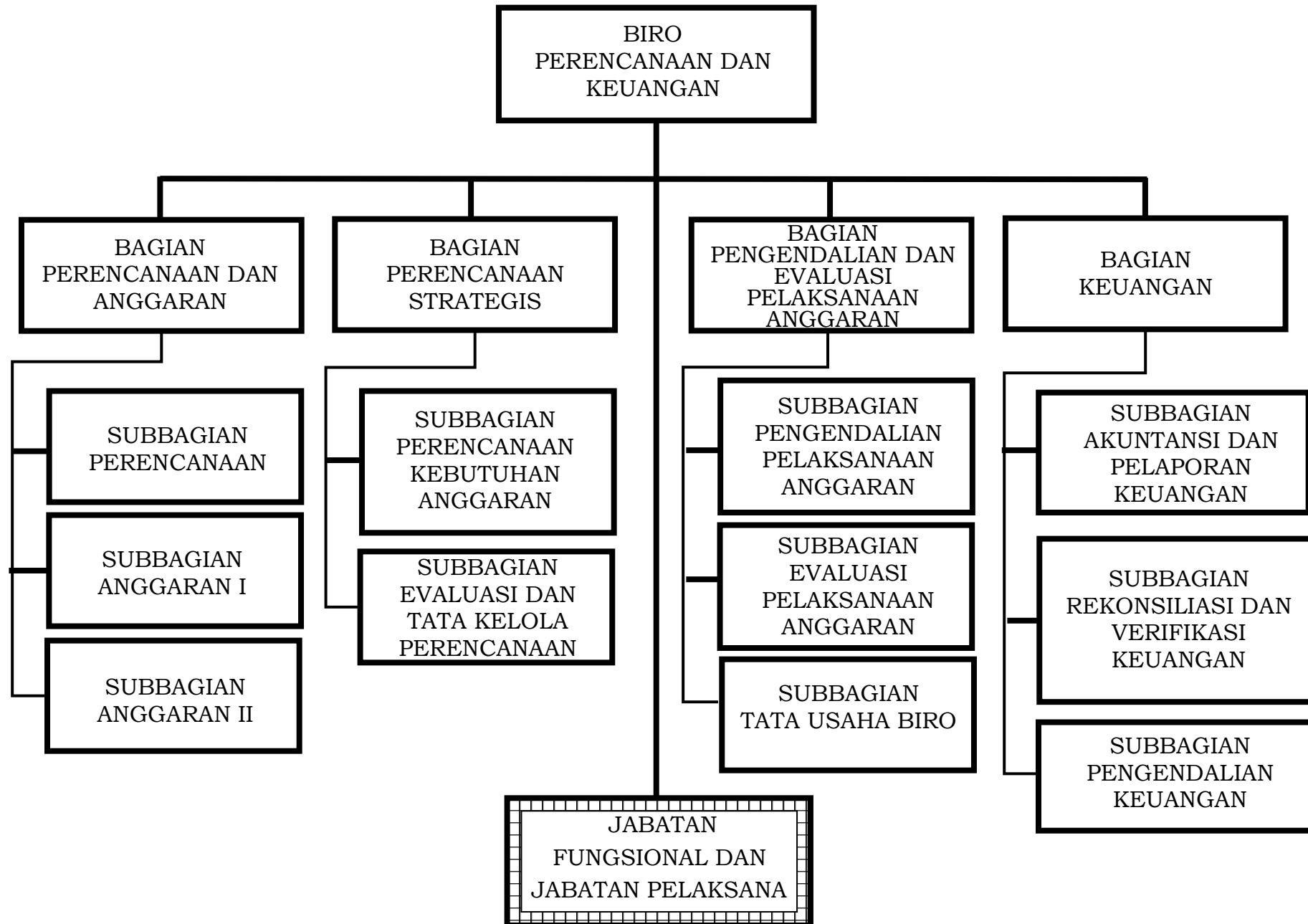


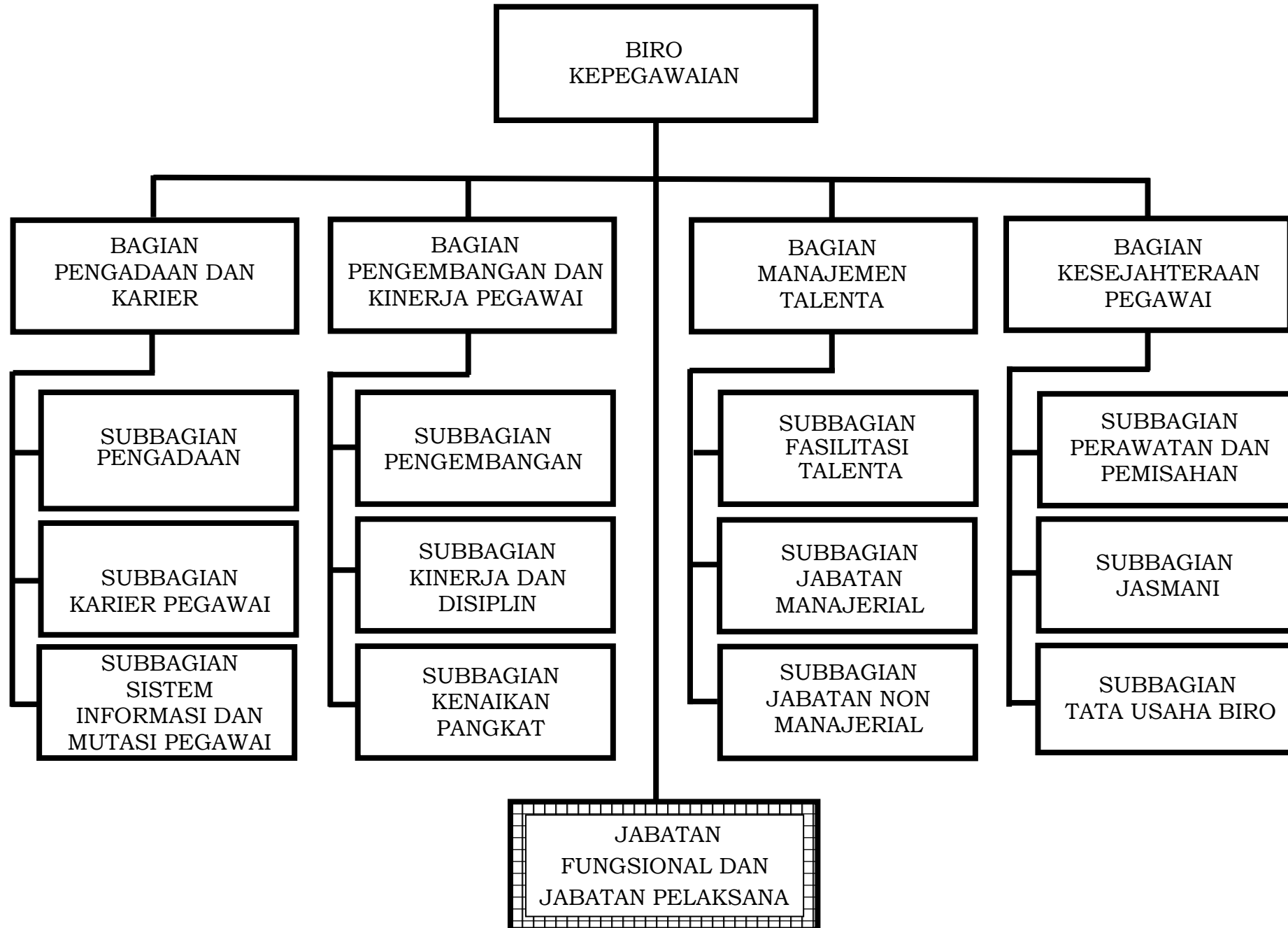
- BAG TU
- BID LAIK DARAT
- BID LAIK LAUT
- BID LAIK UDARA

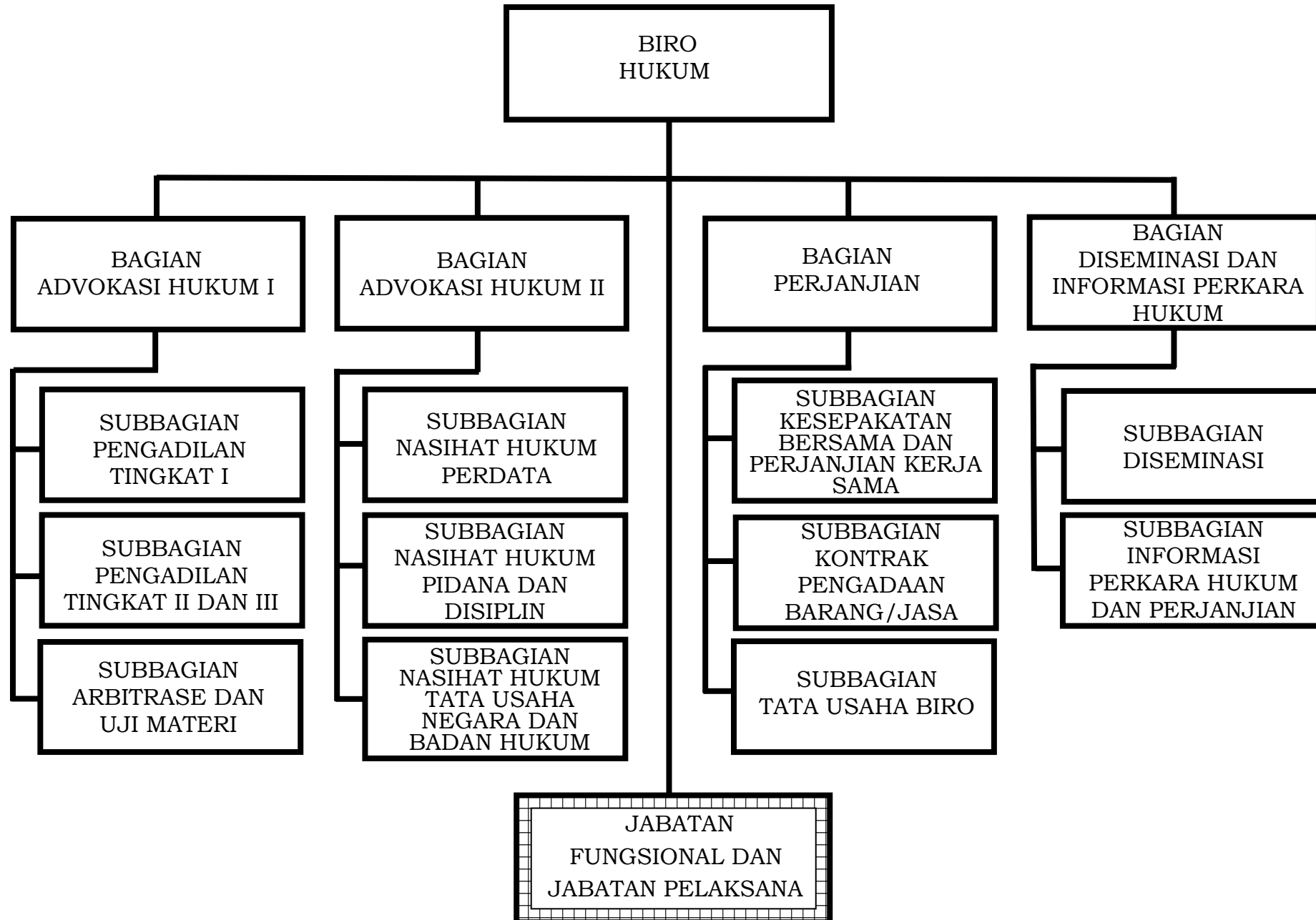
UNIT PELAKSANA TEKNIS

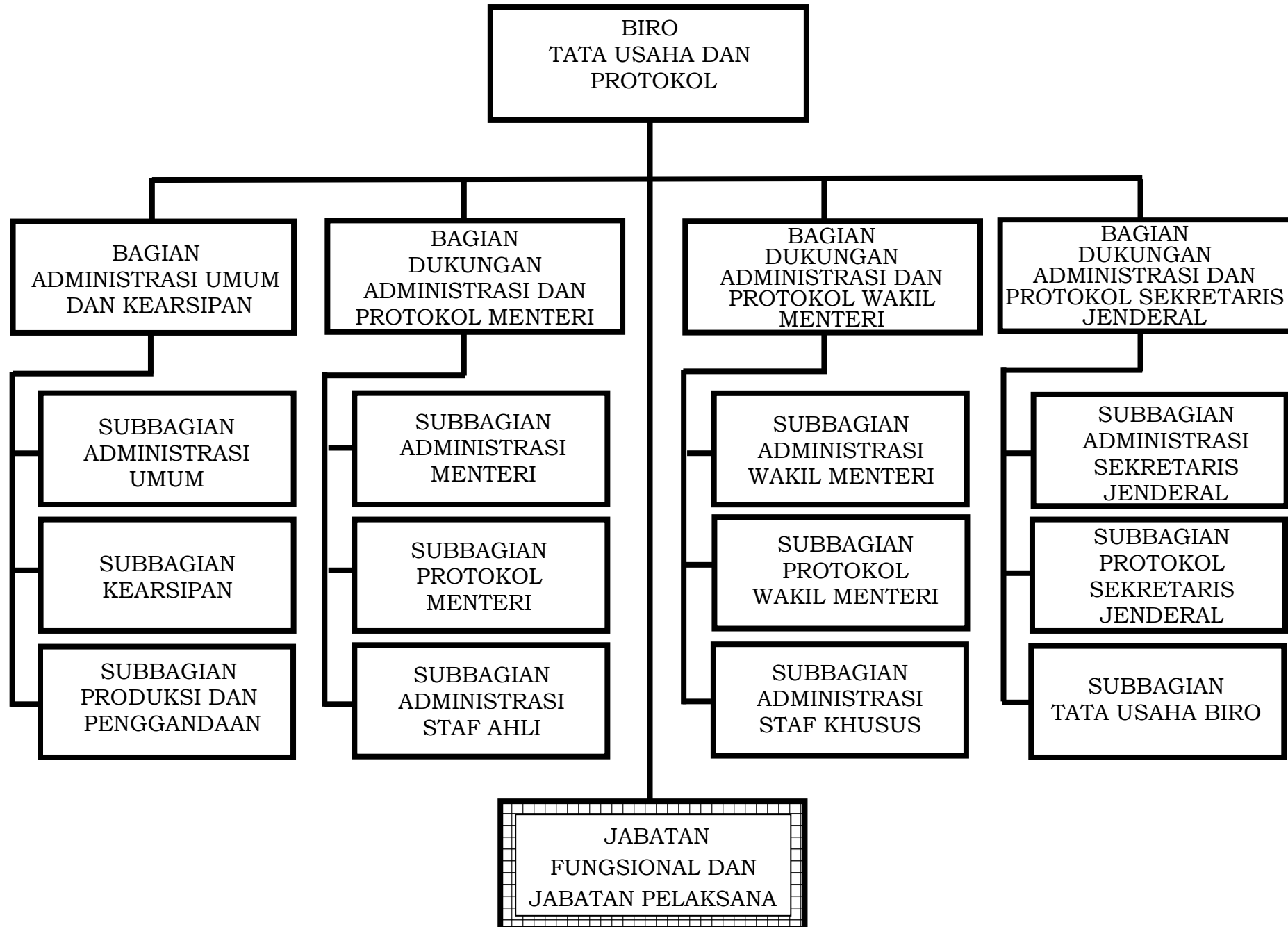


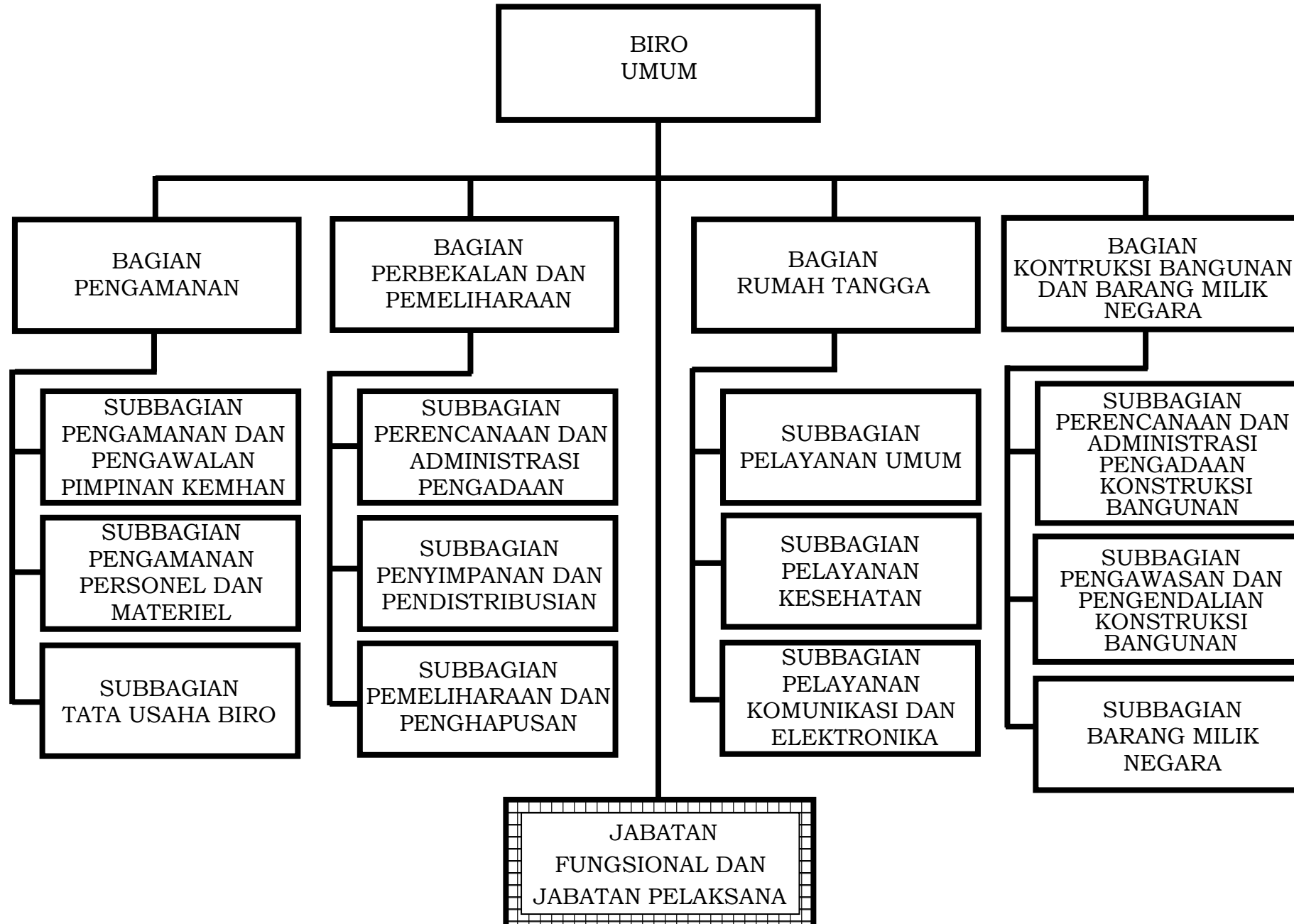


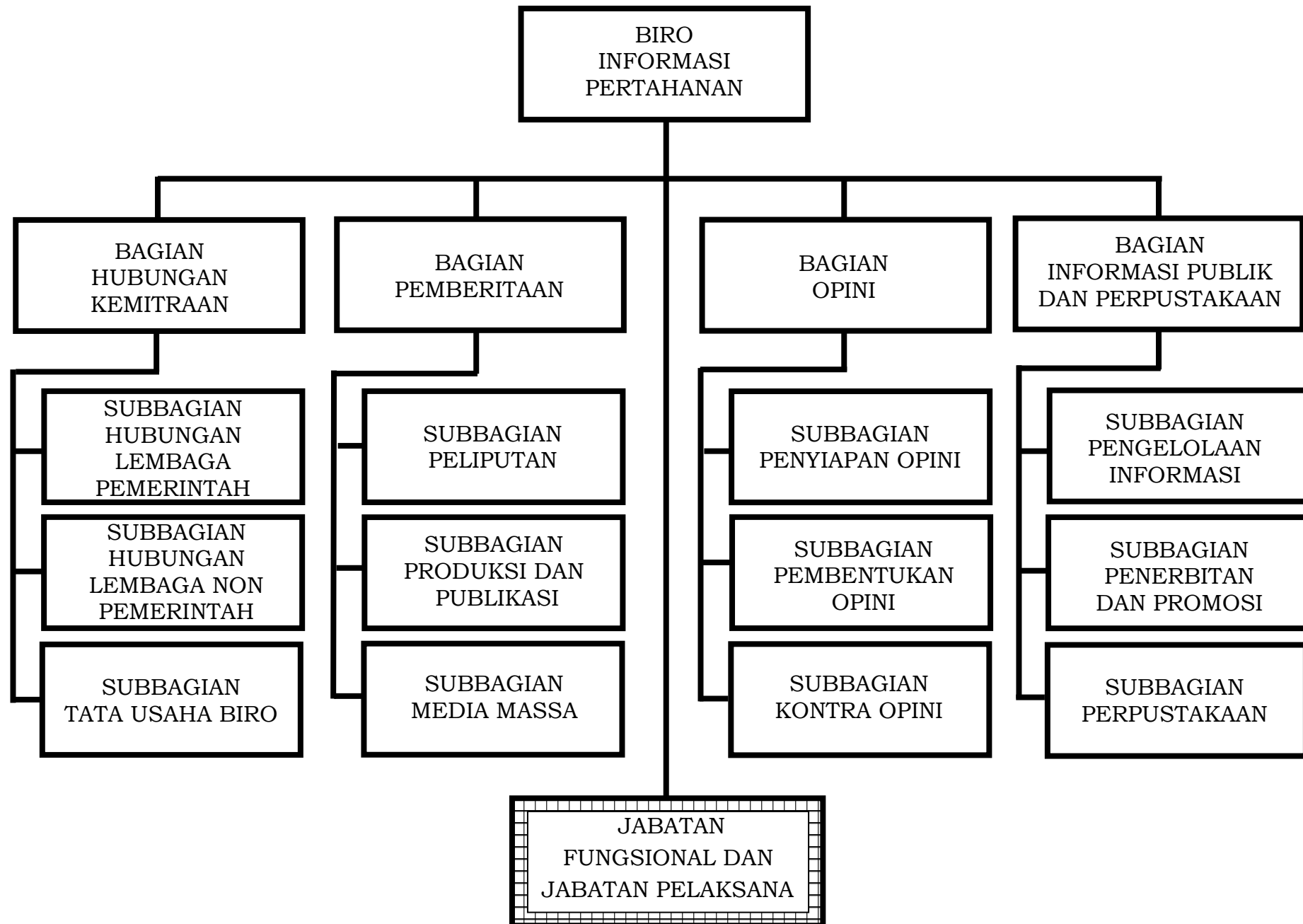


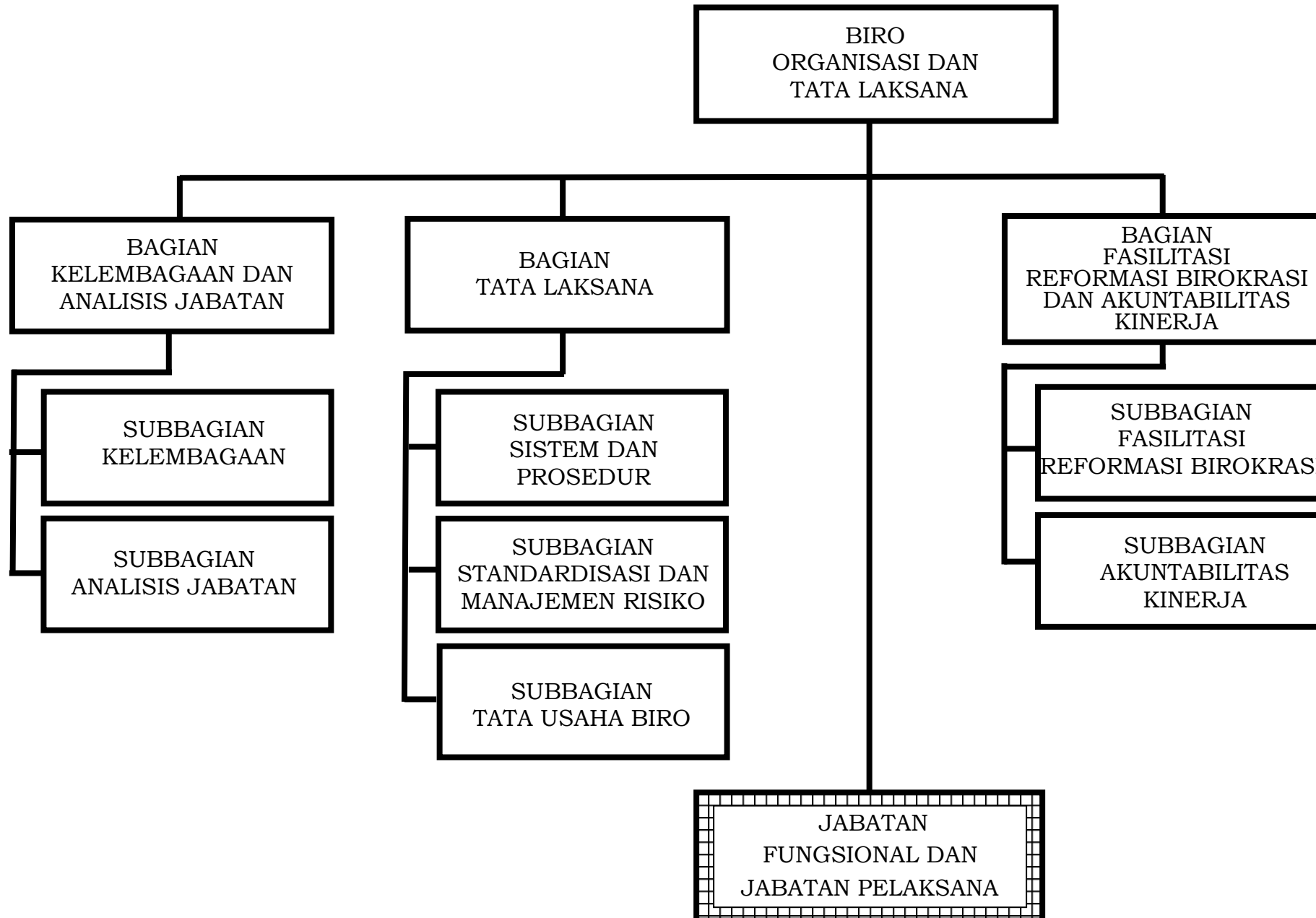


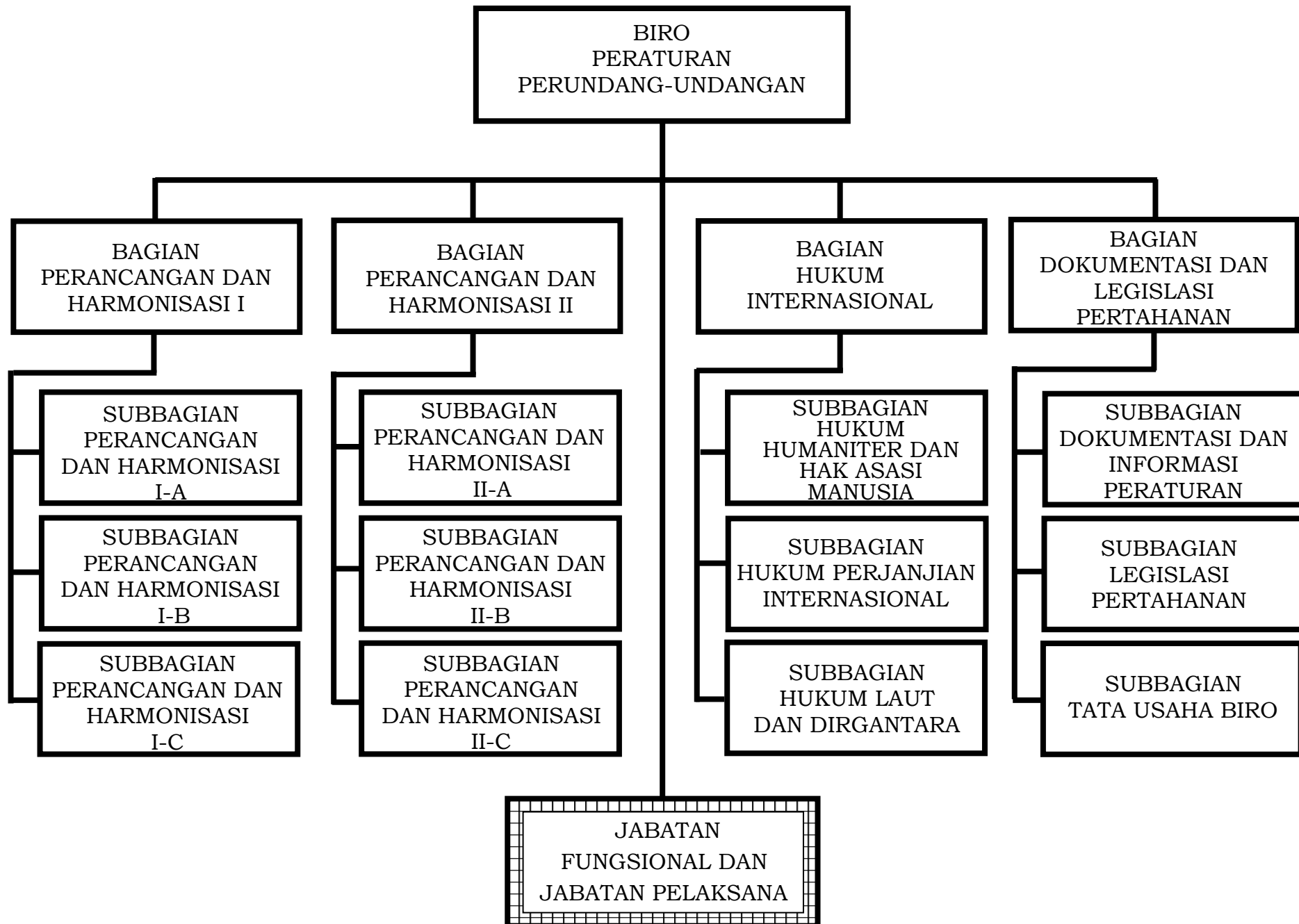


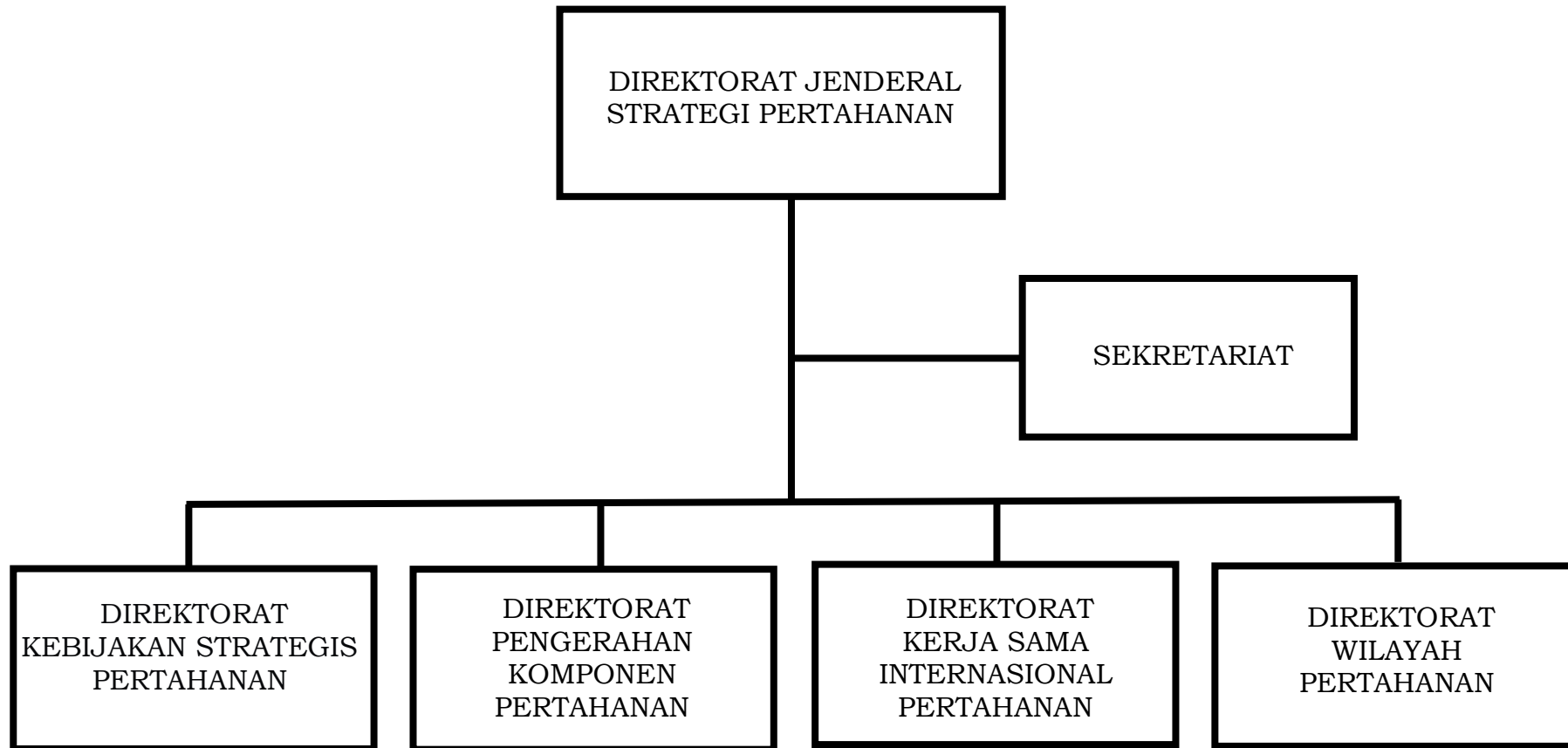


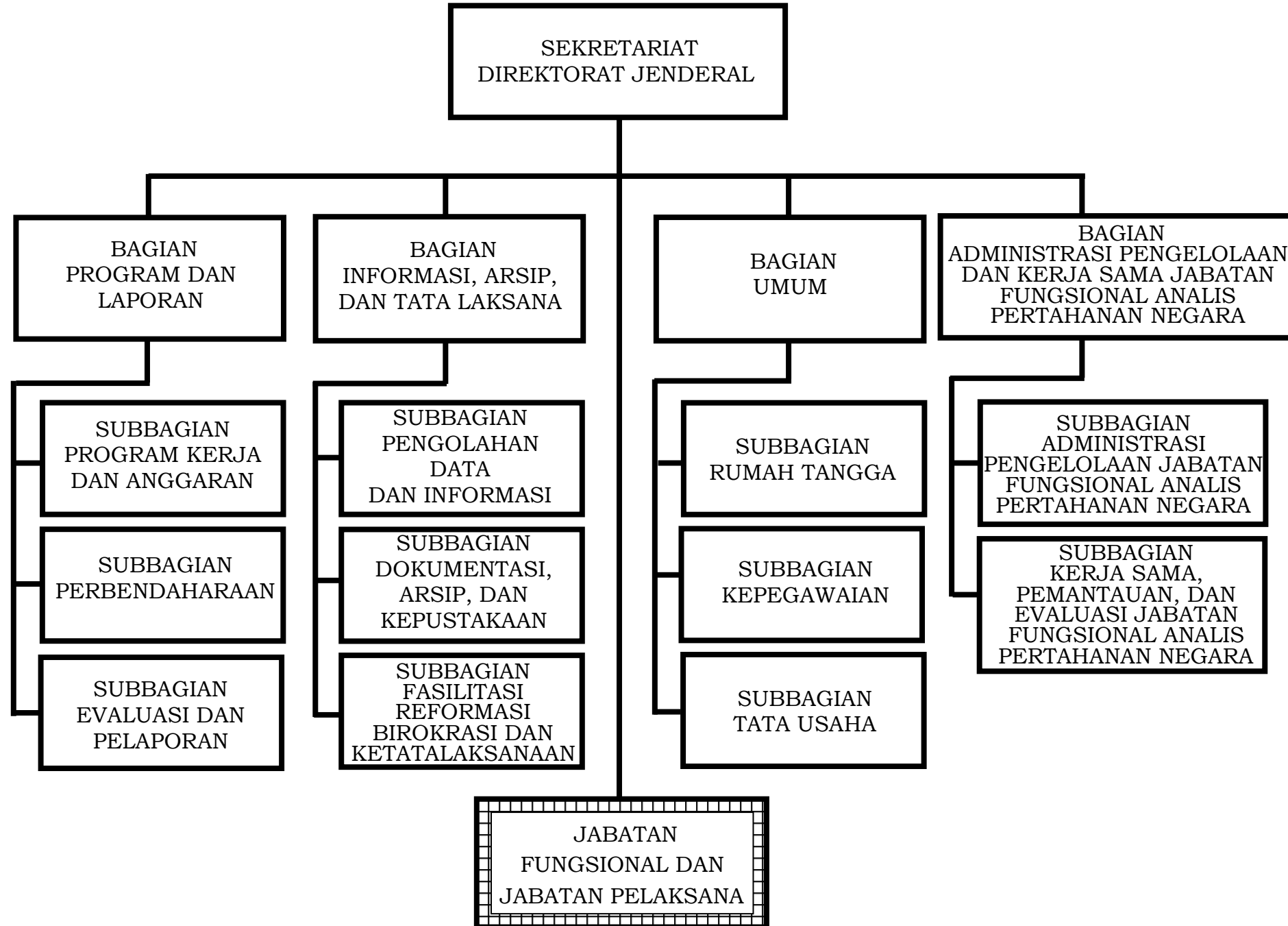


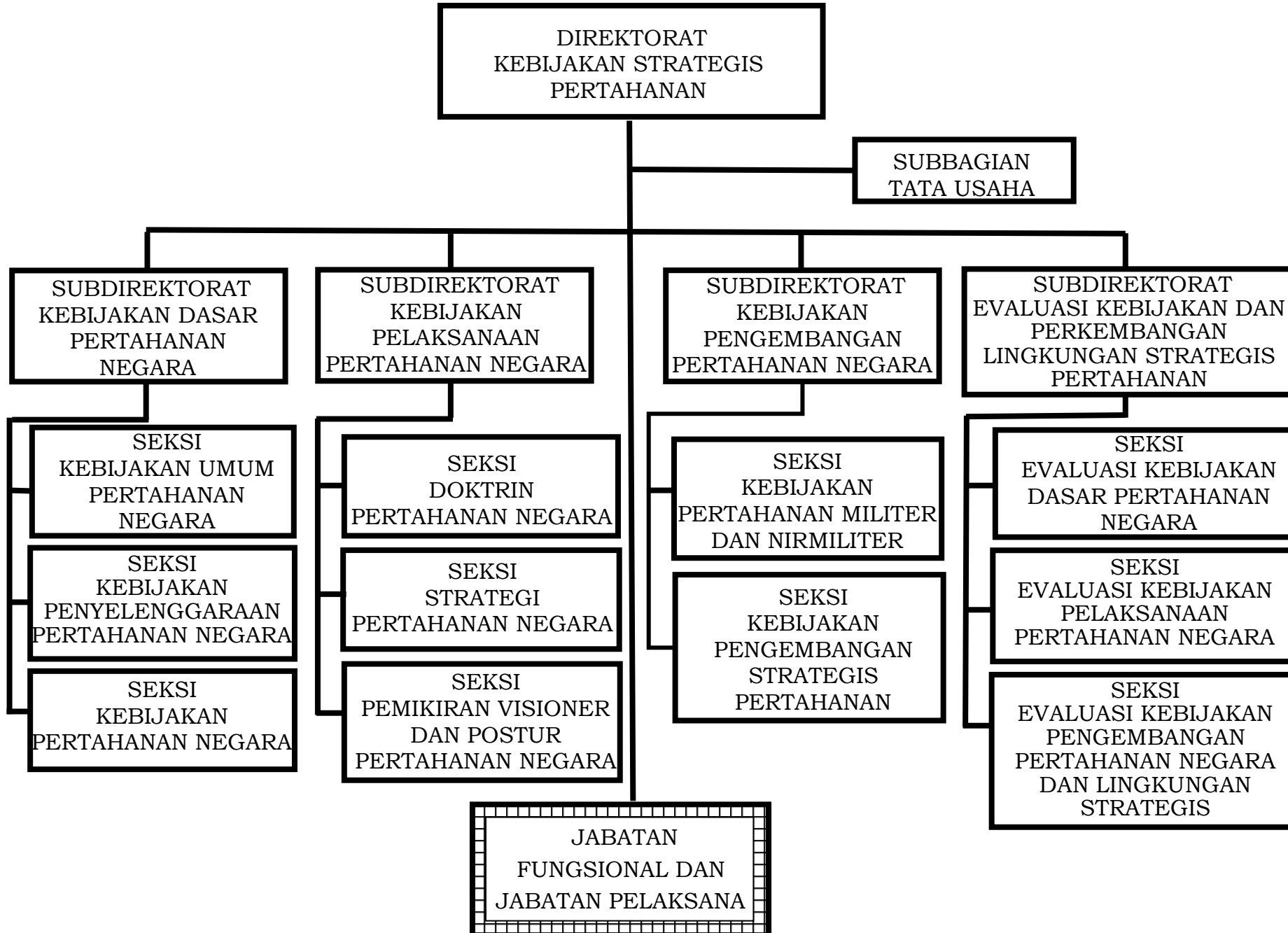


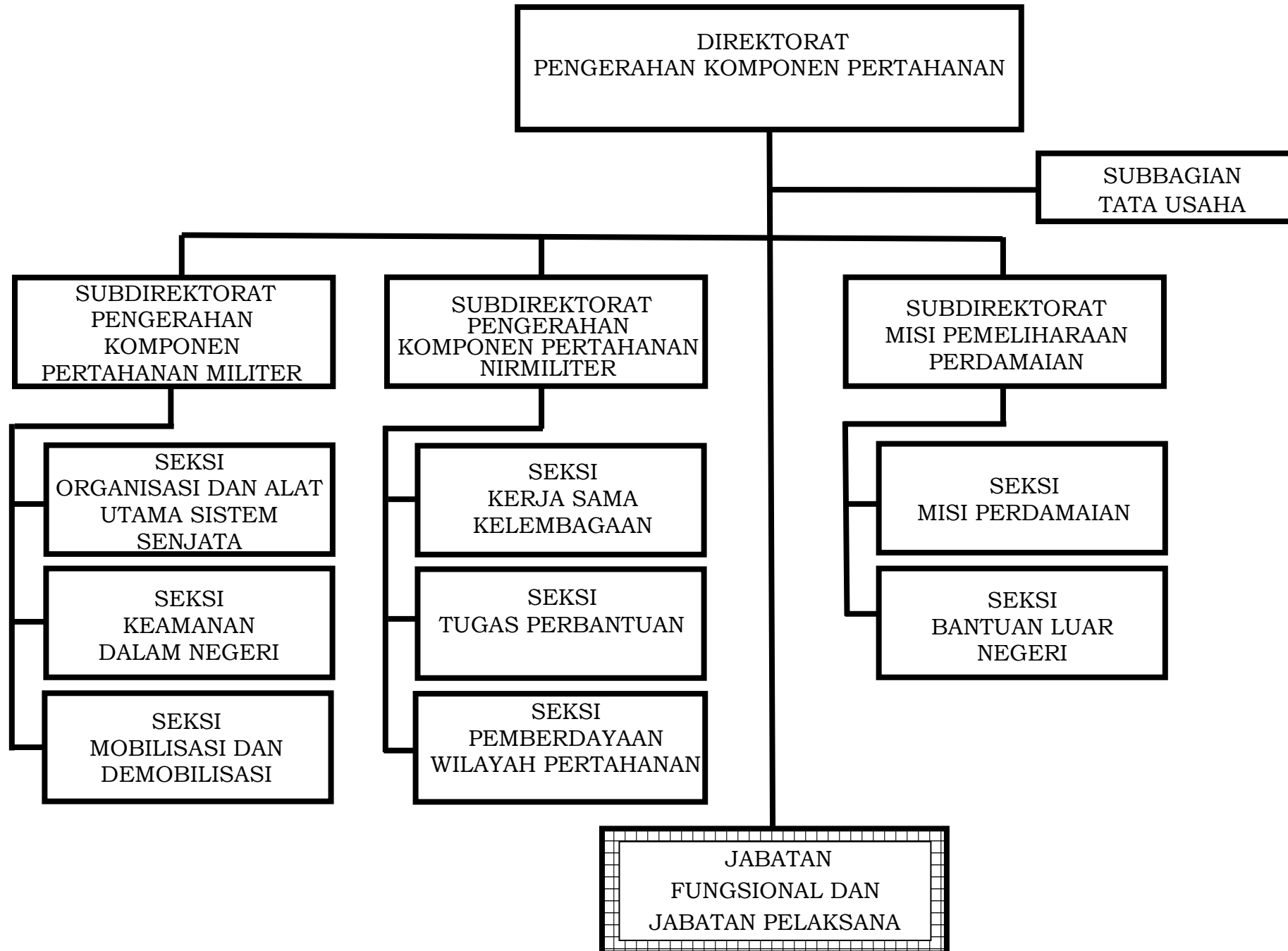


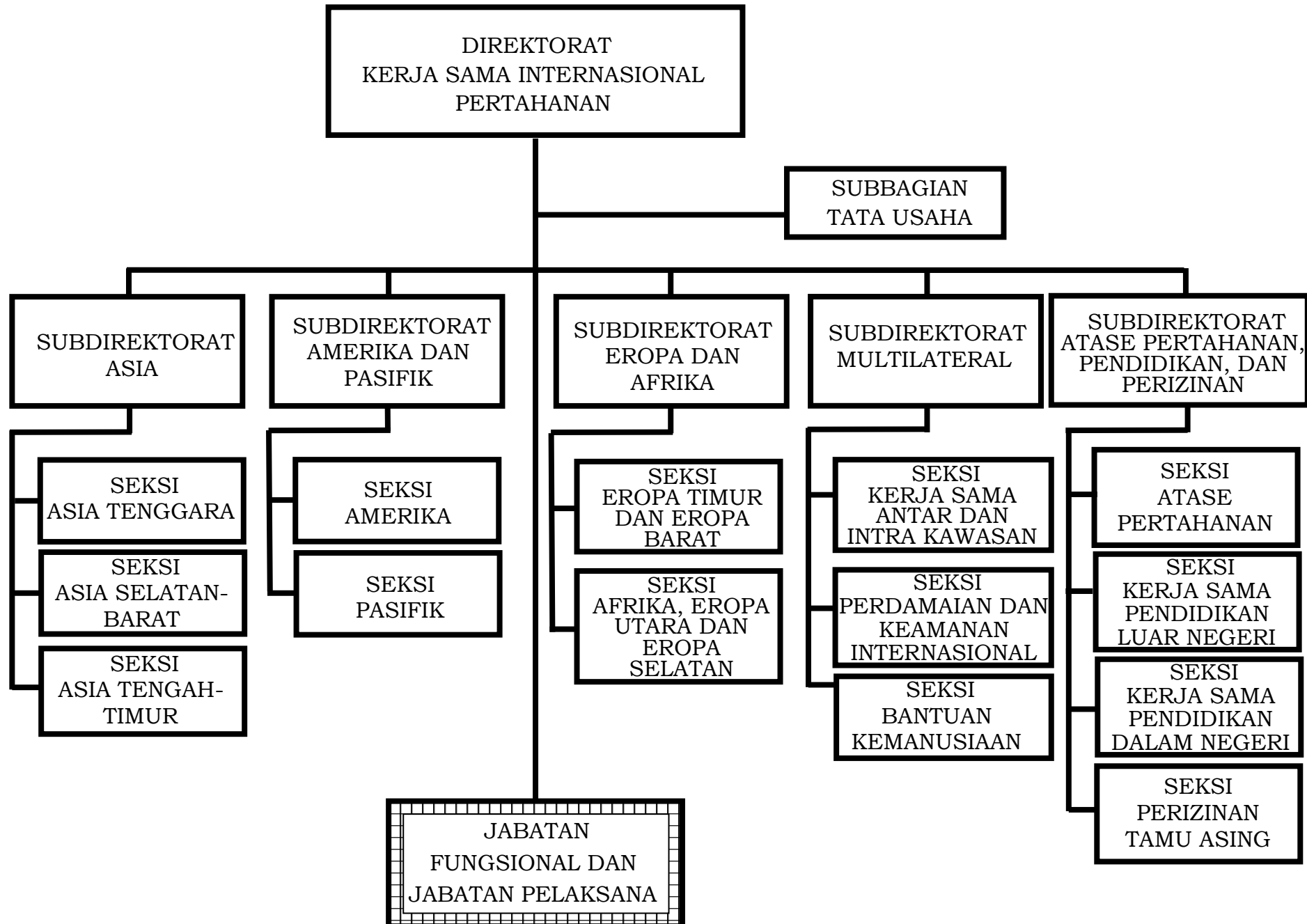


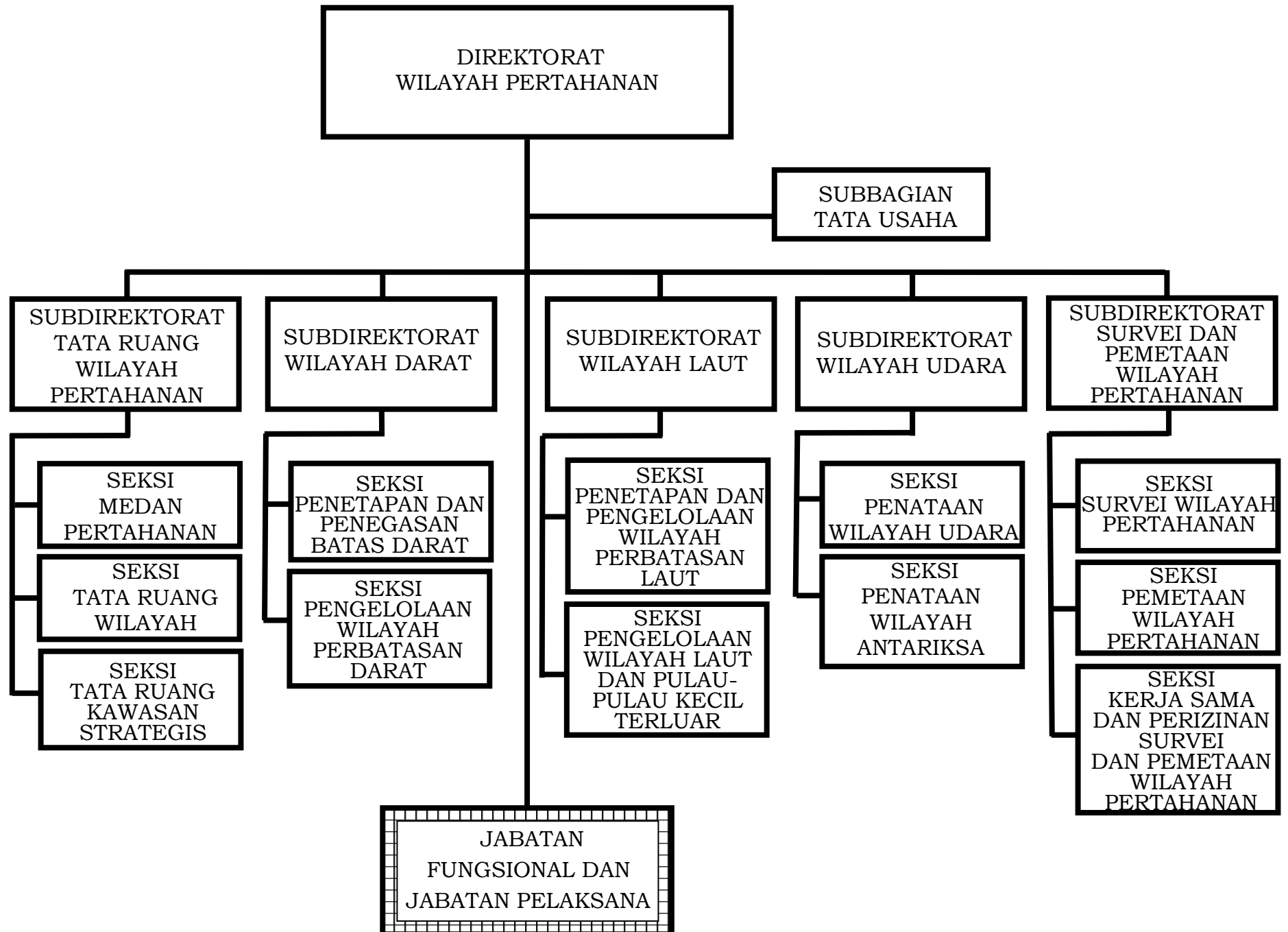


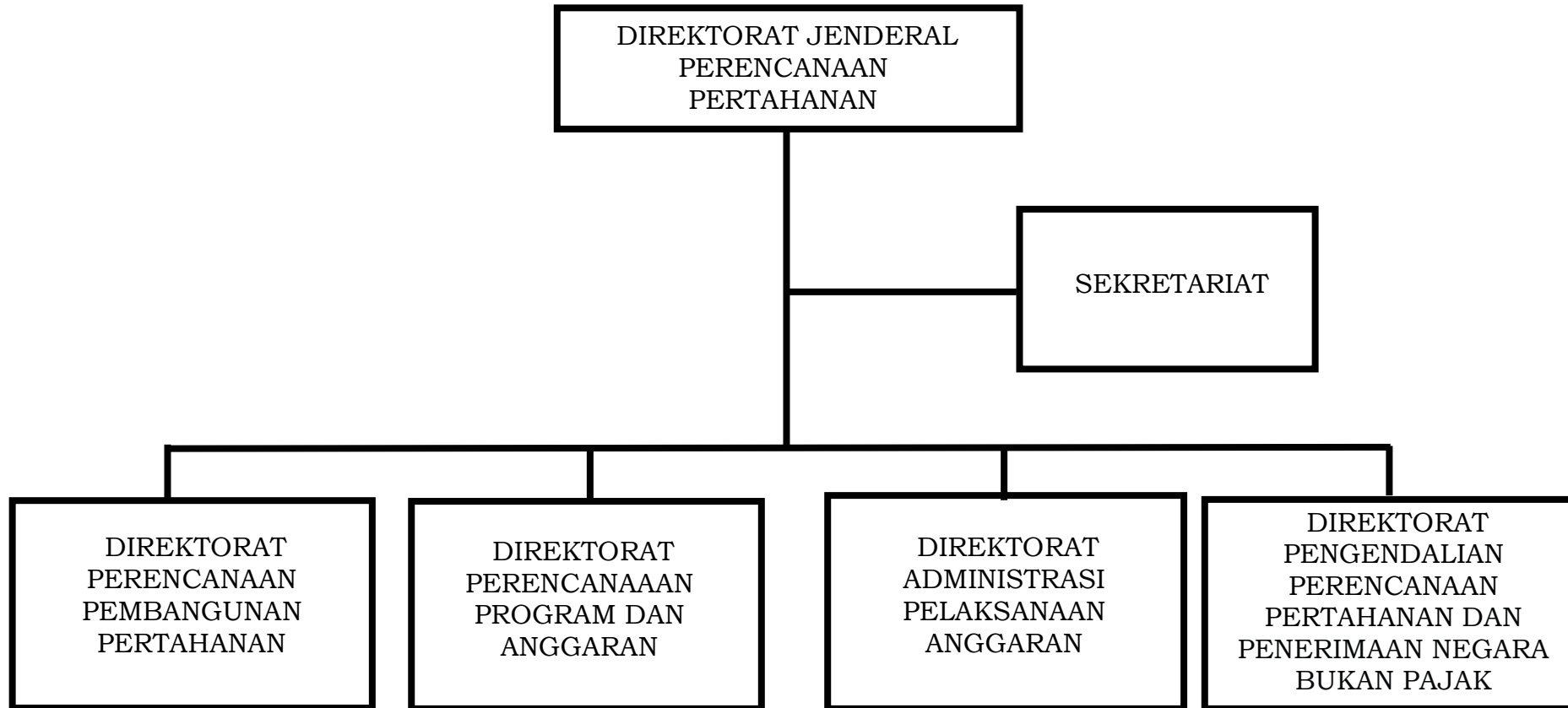


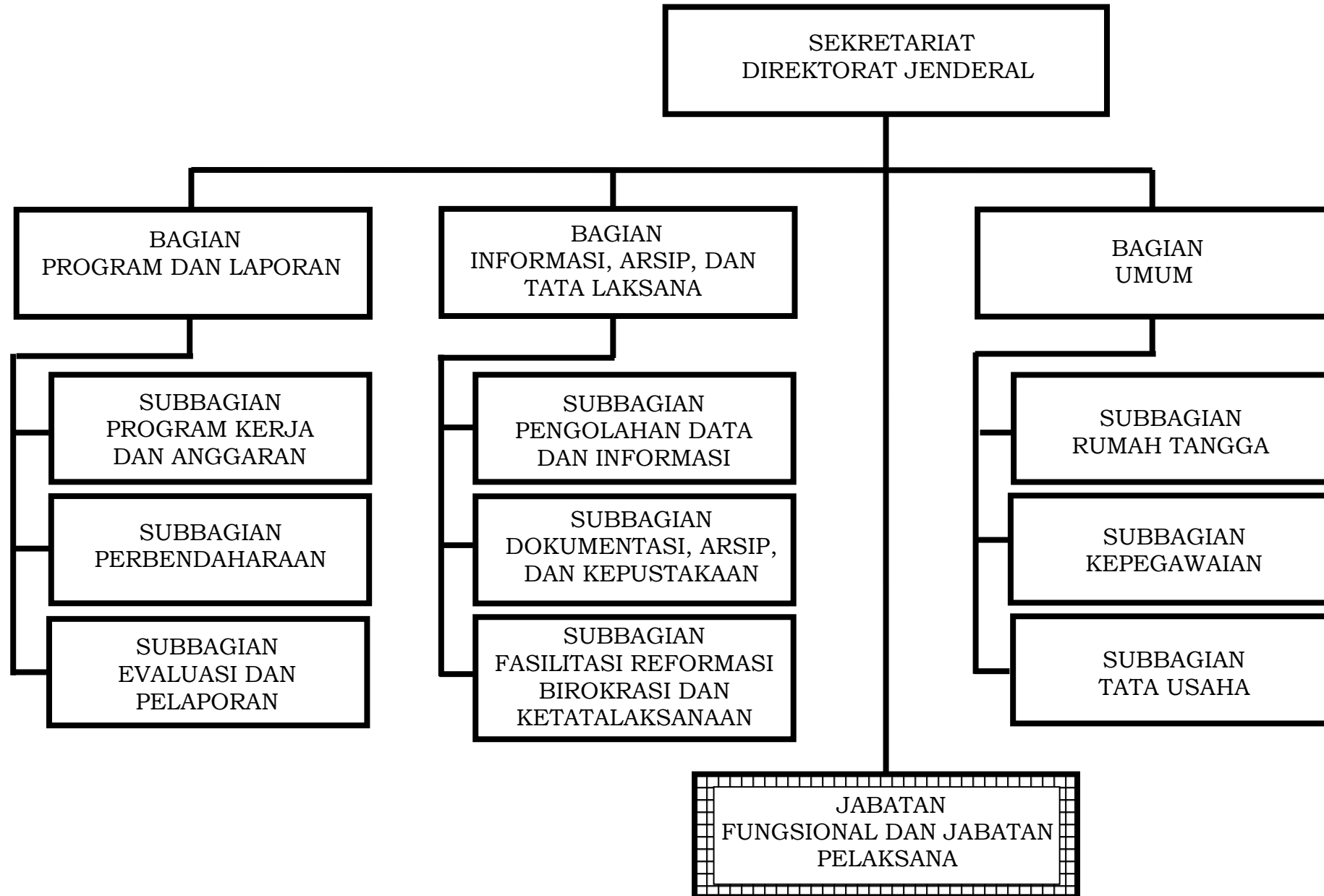


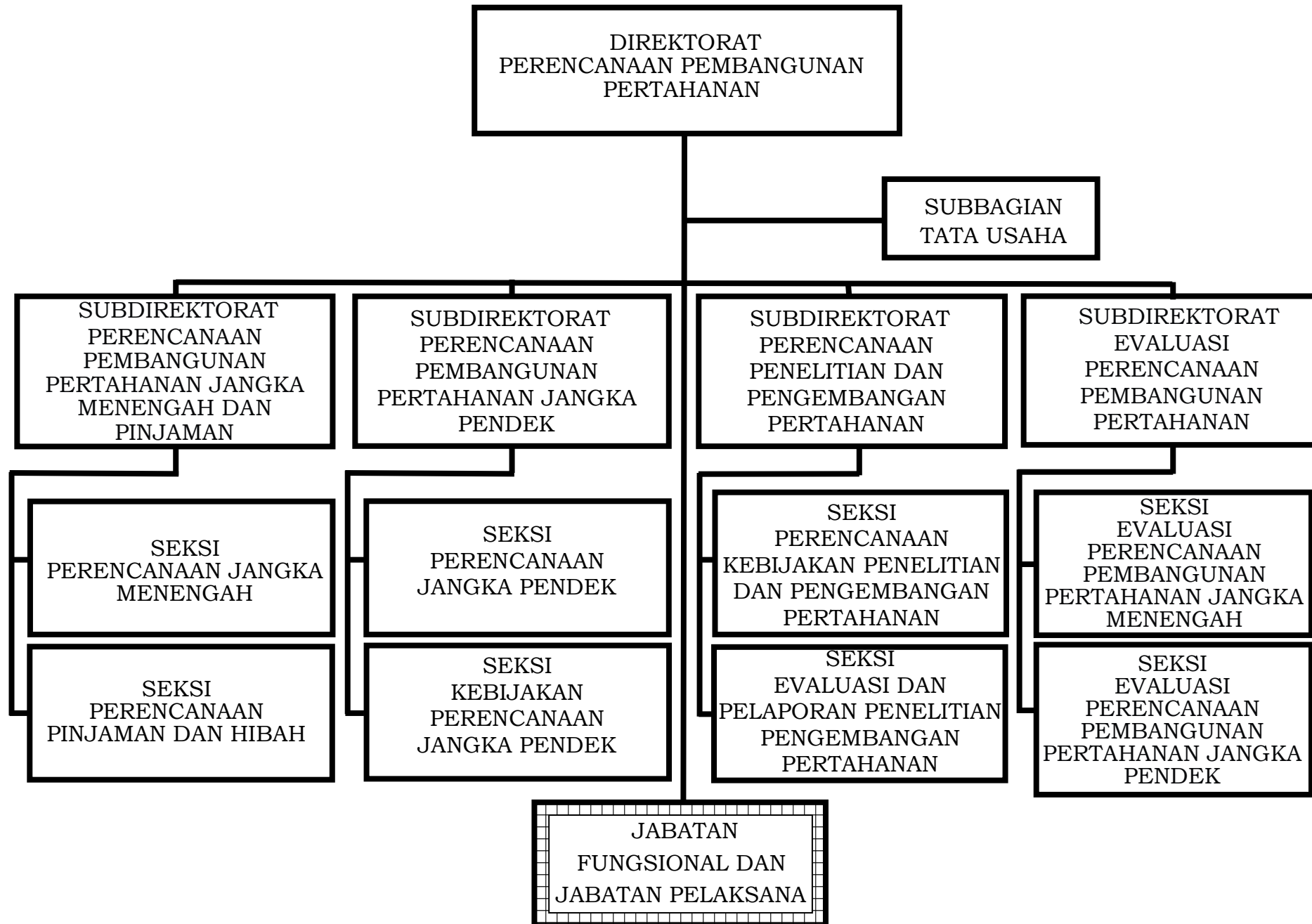


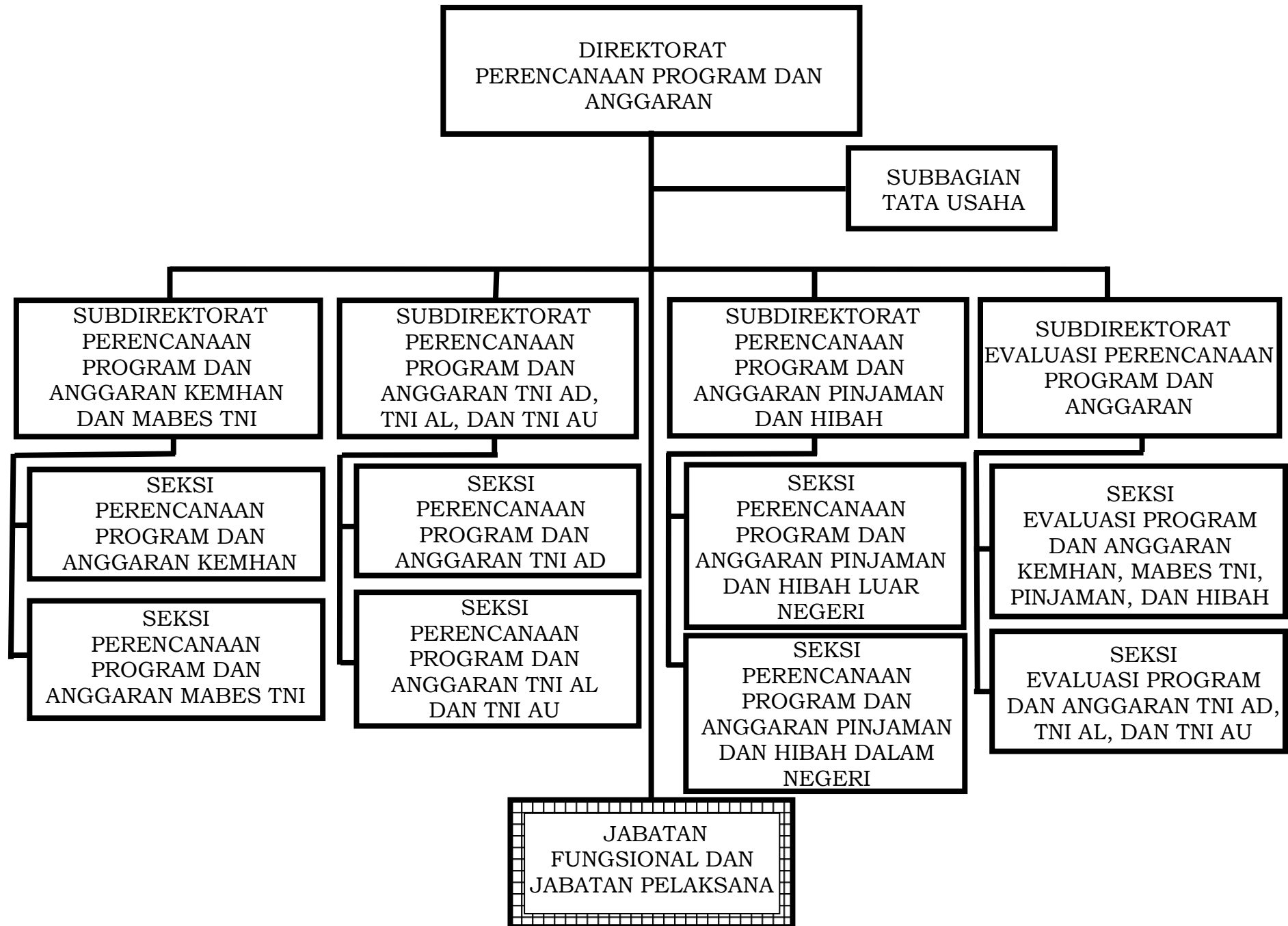


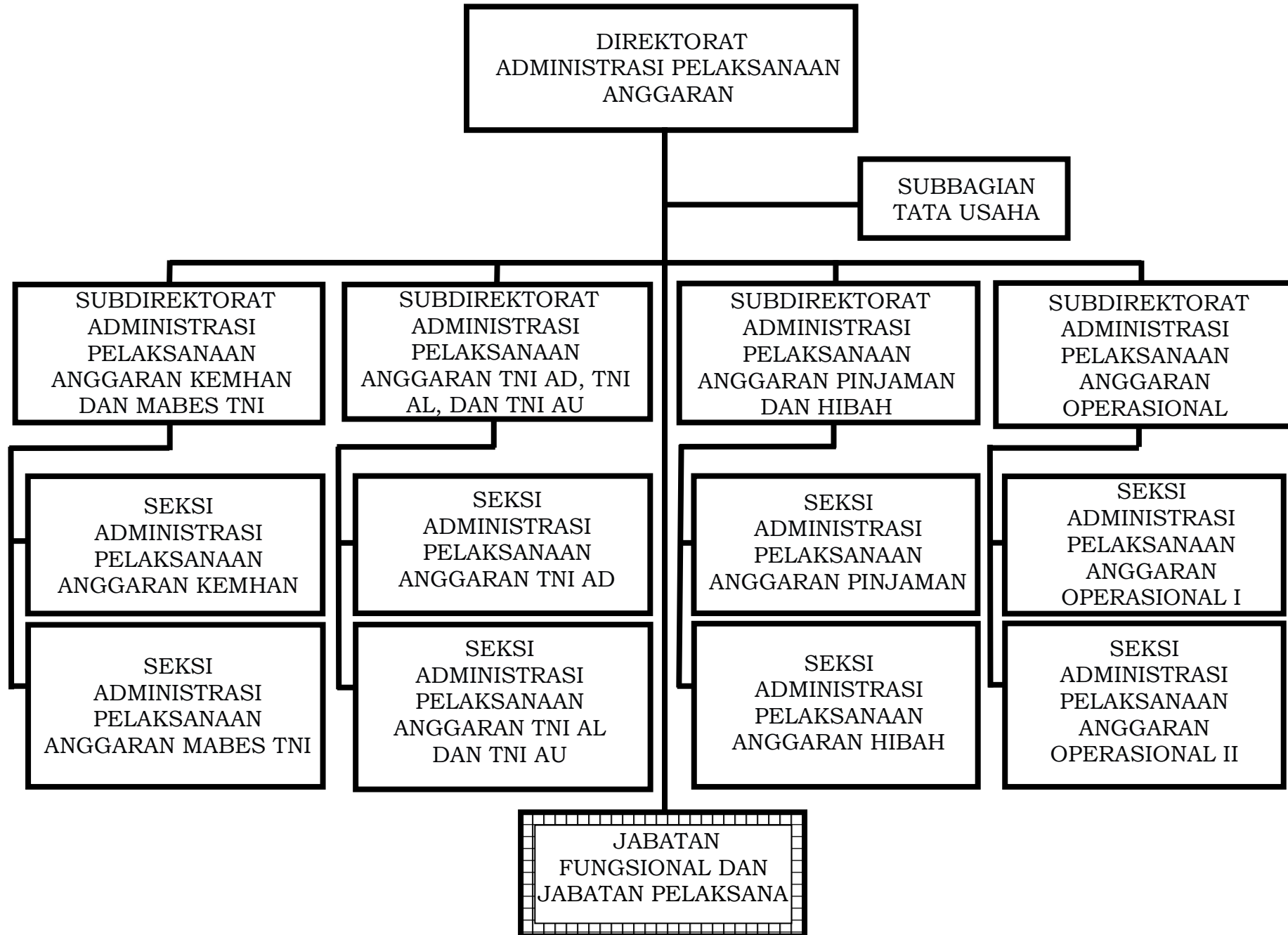


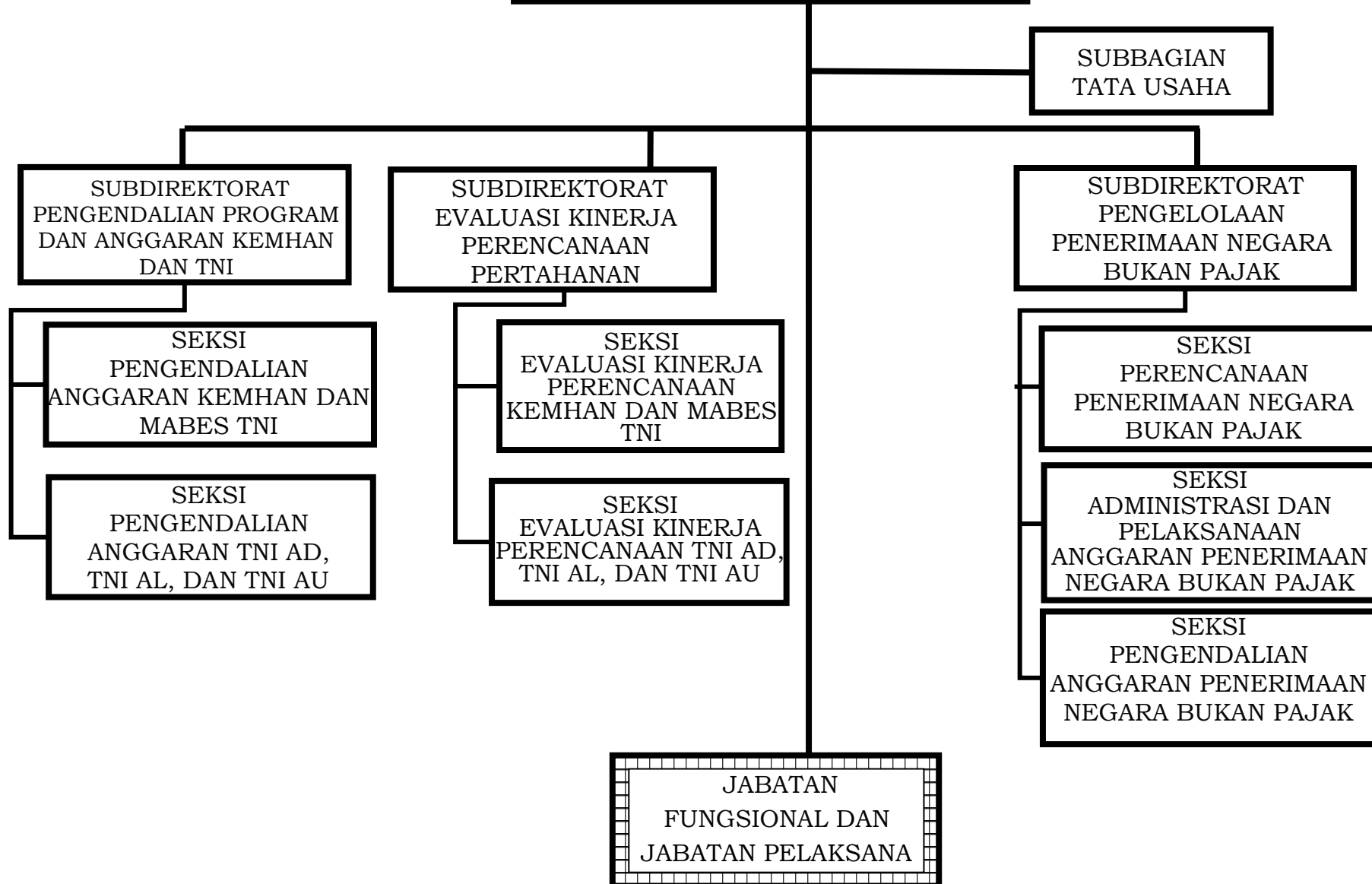


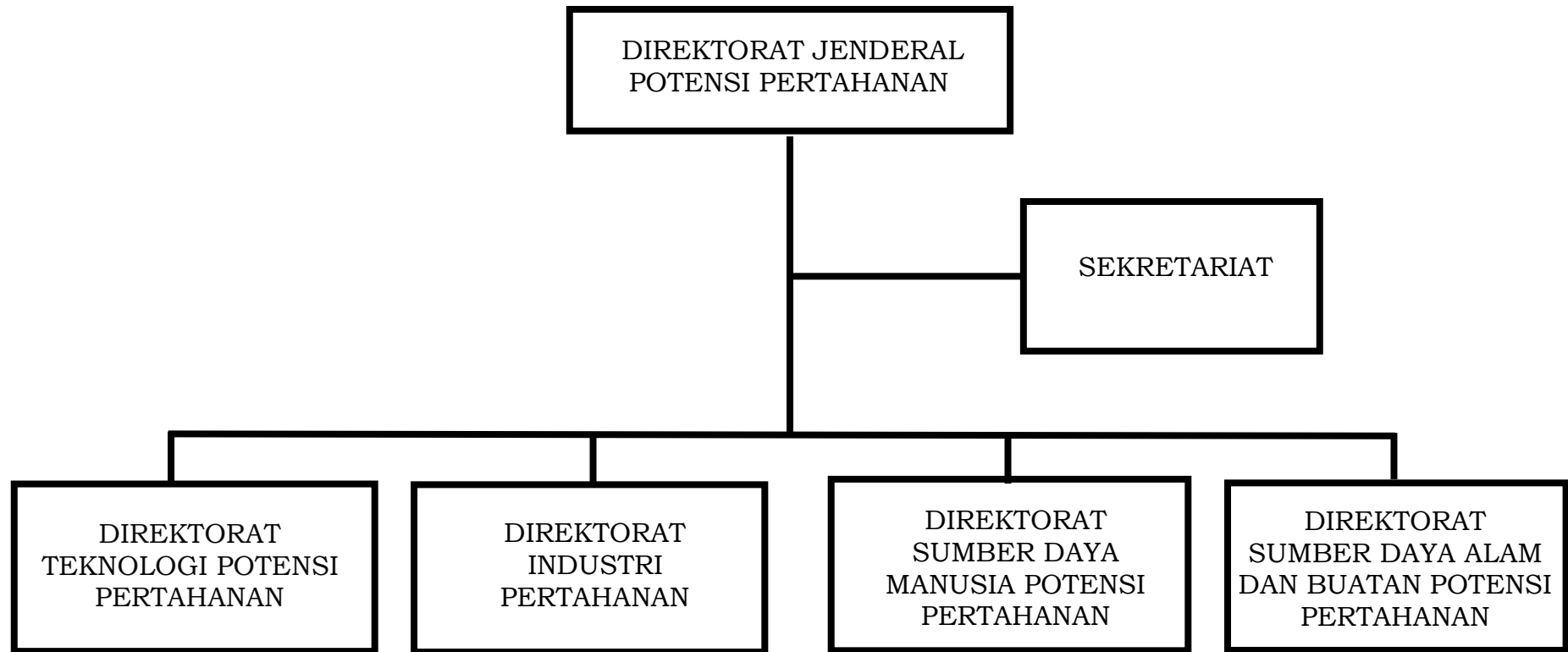


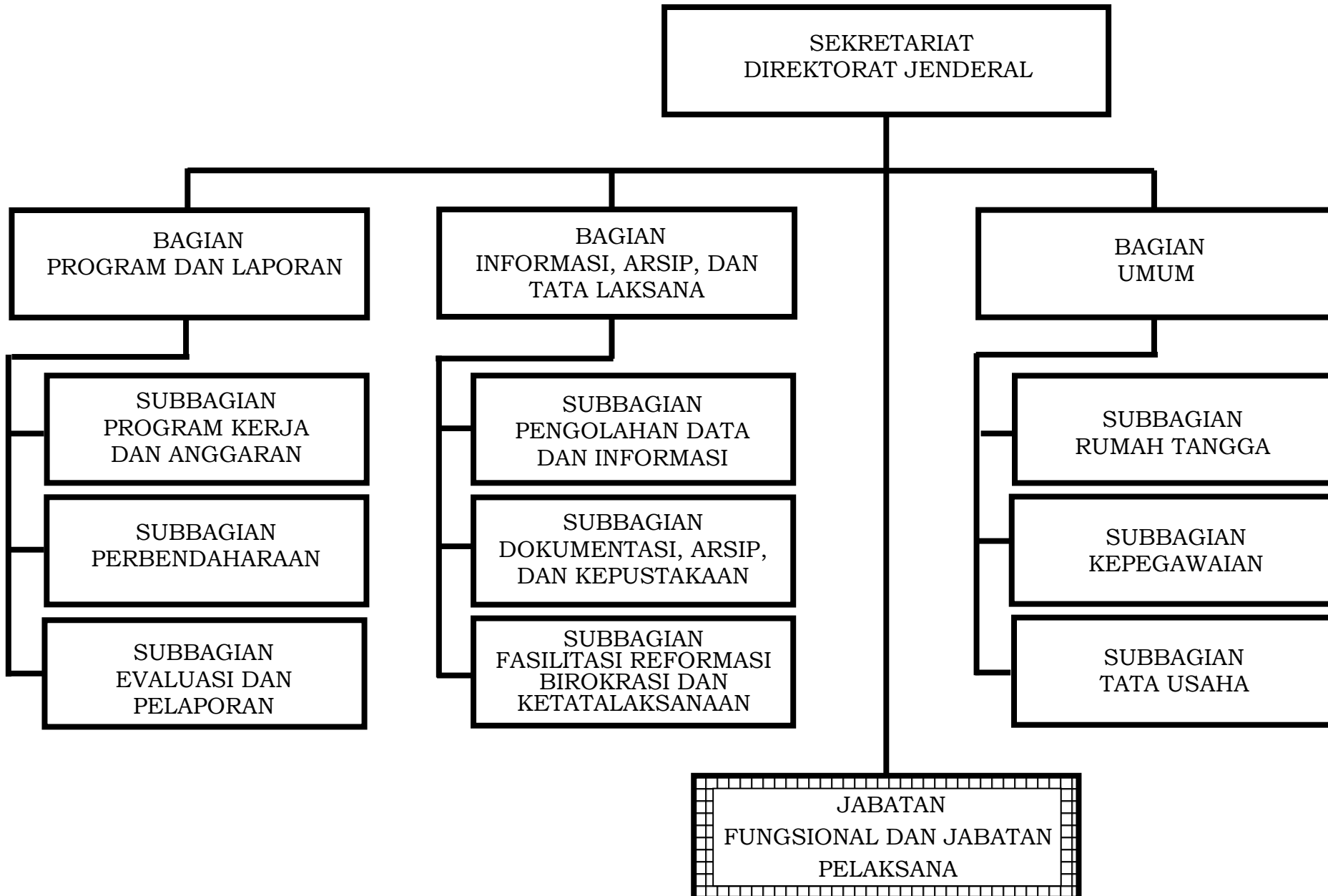


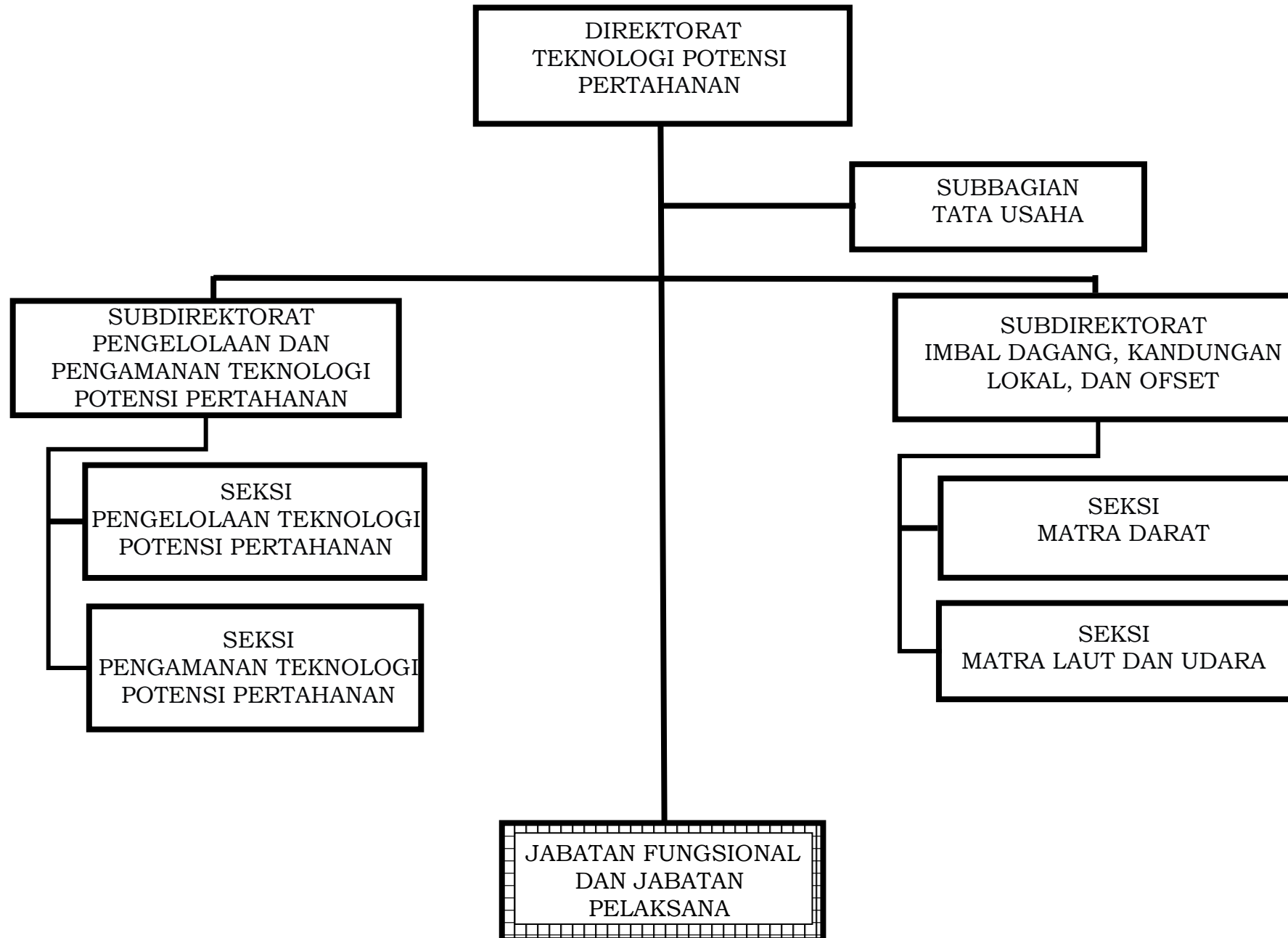


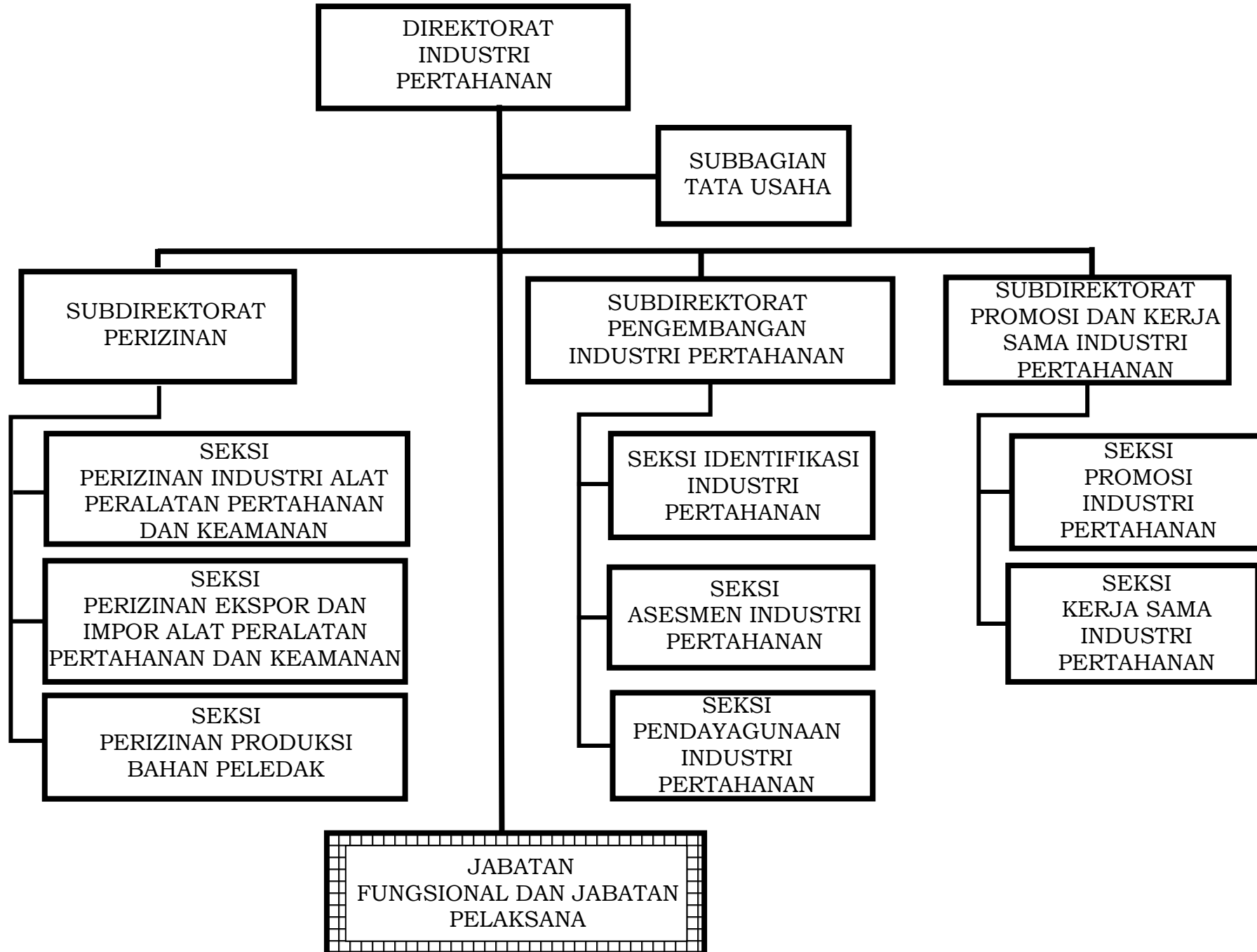


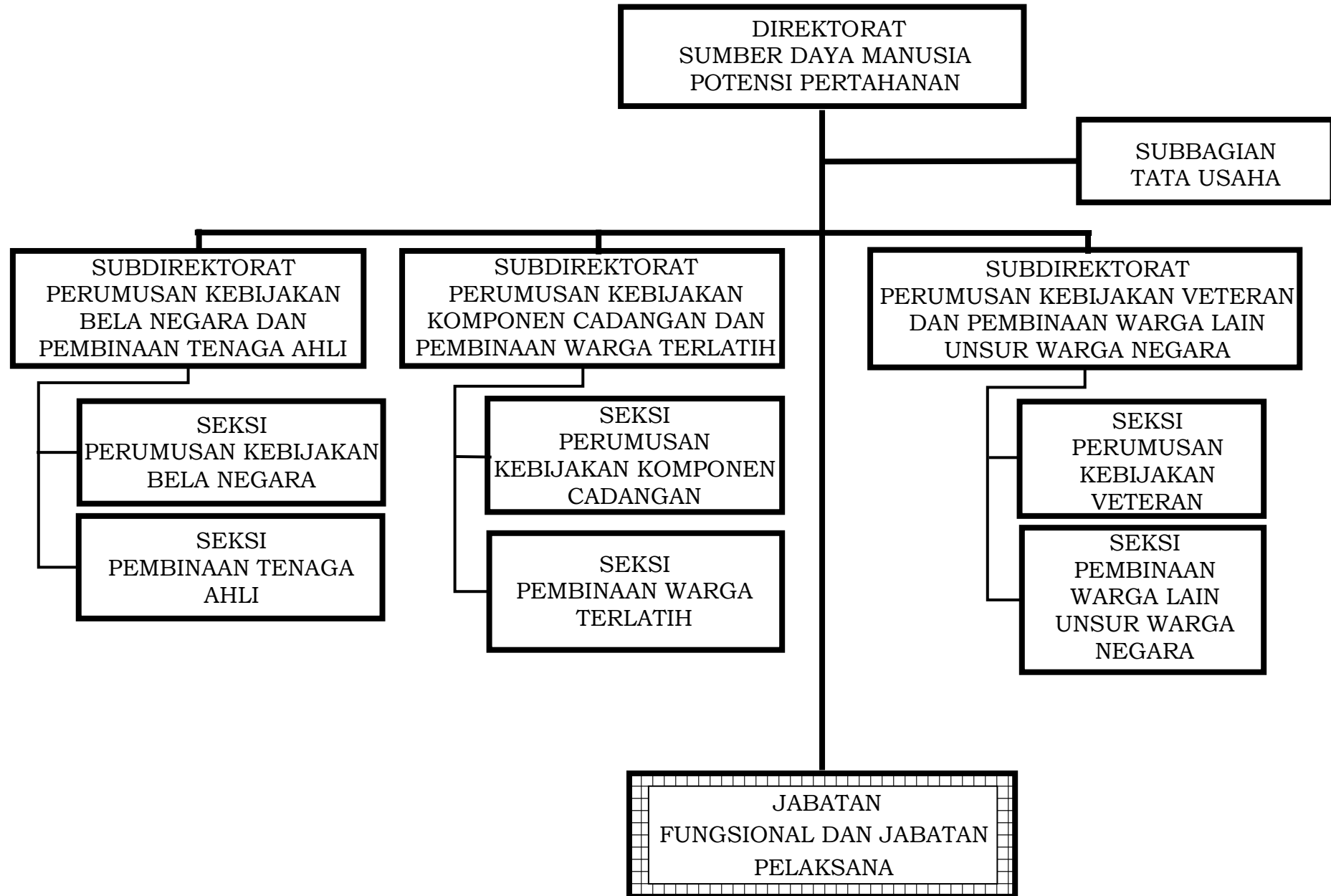


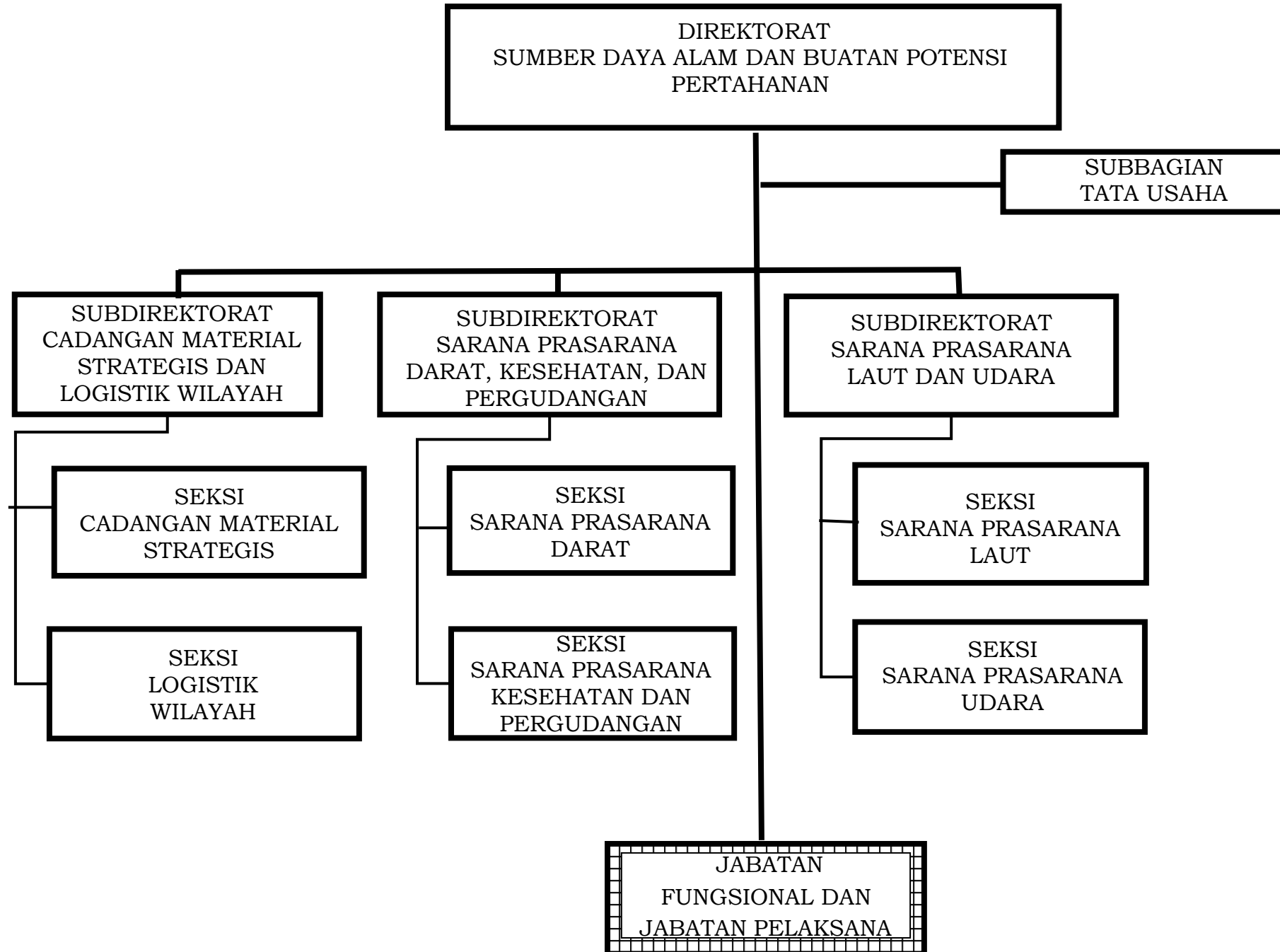


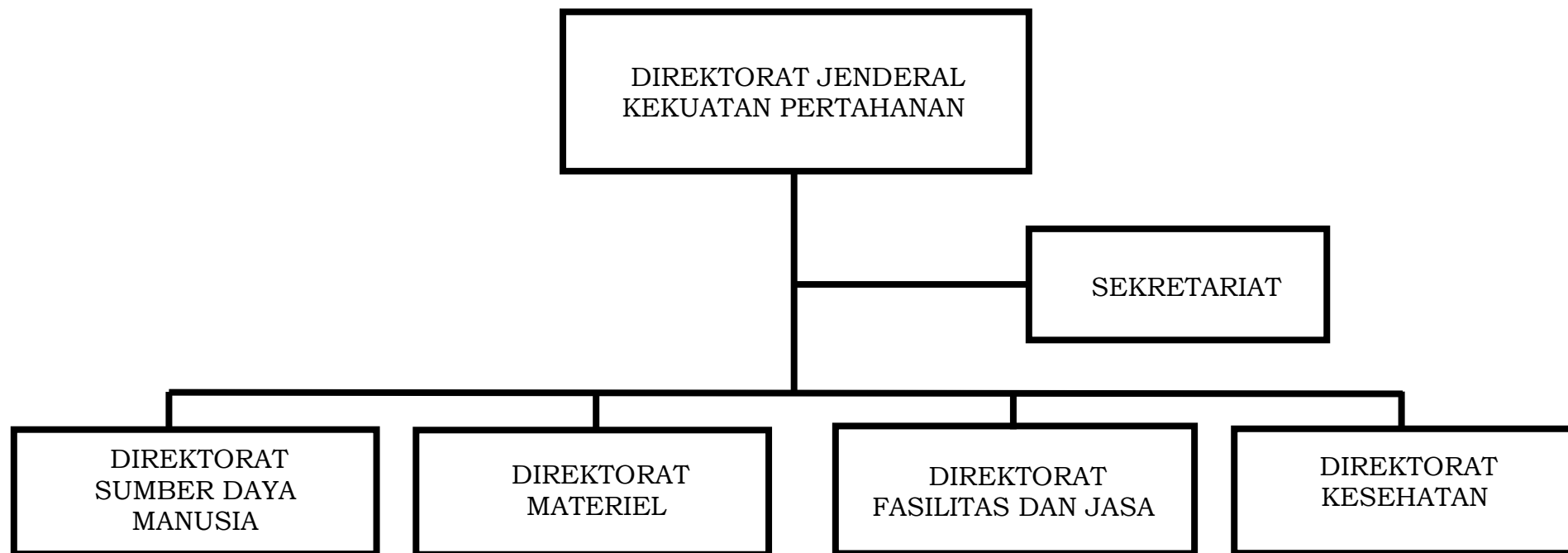


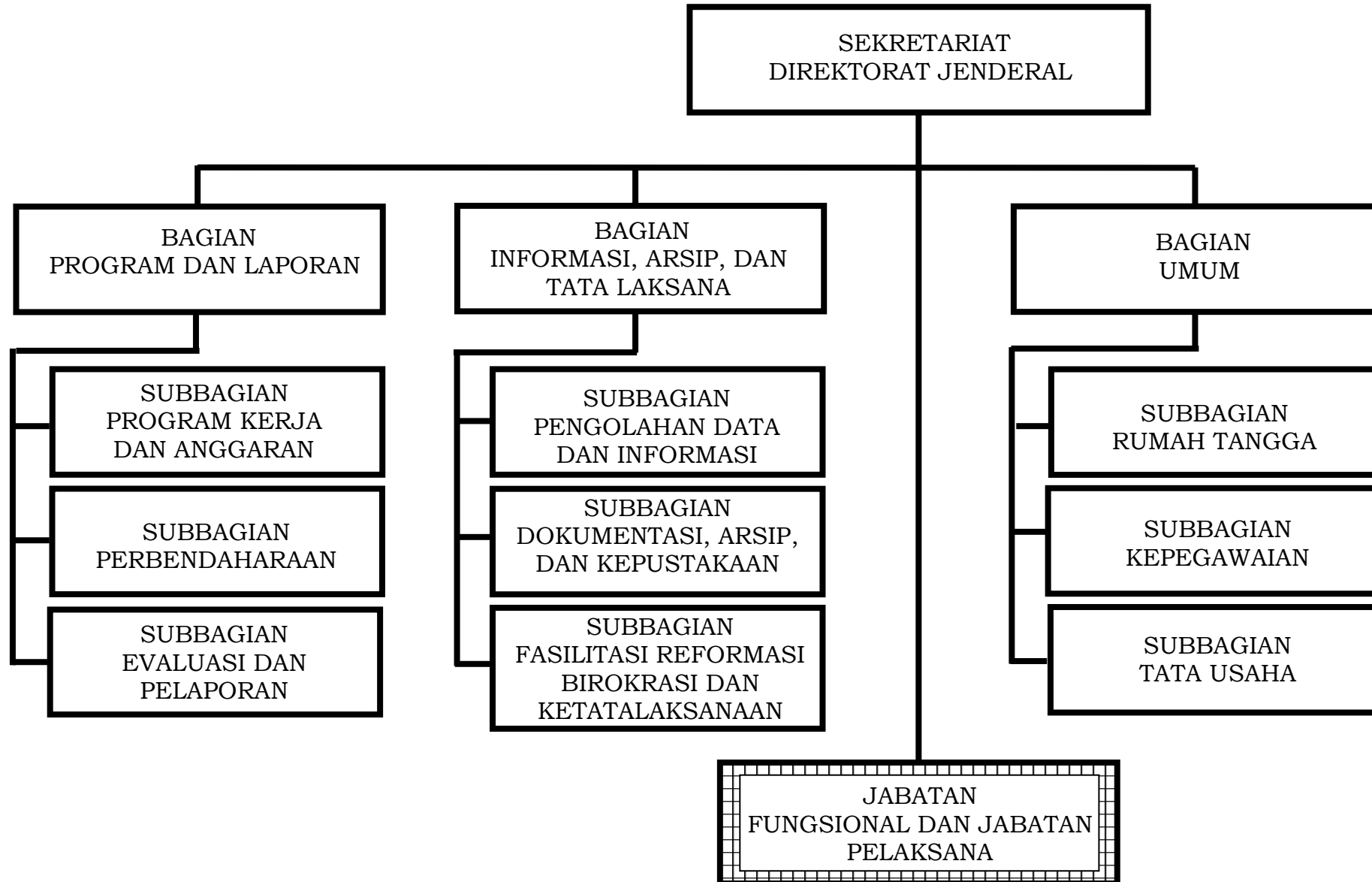


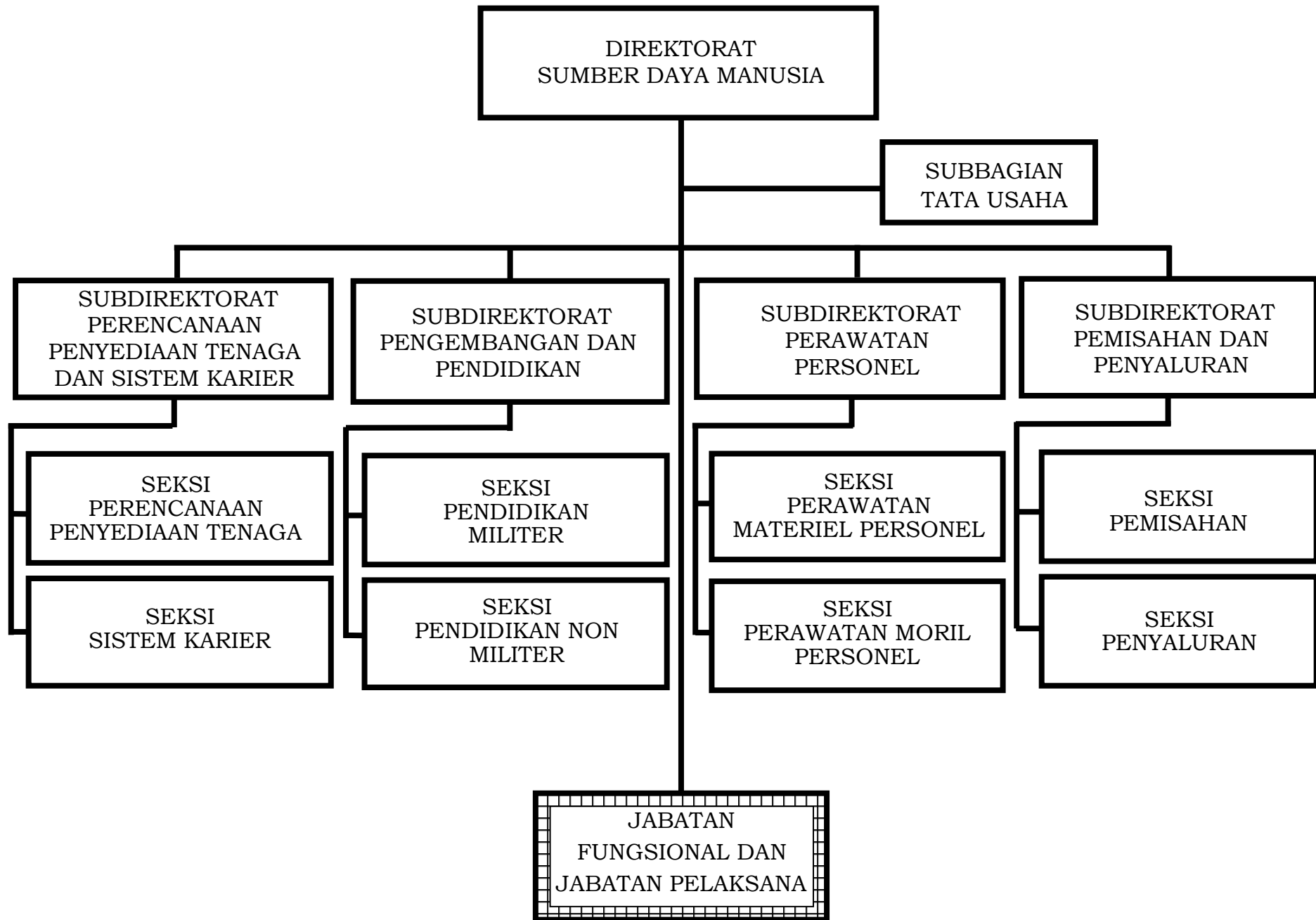


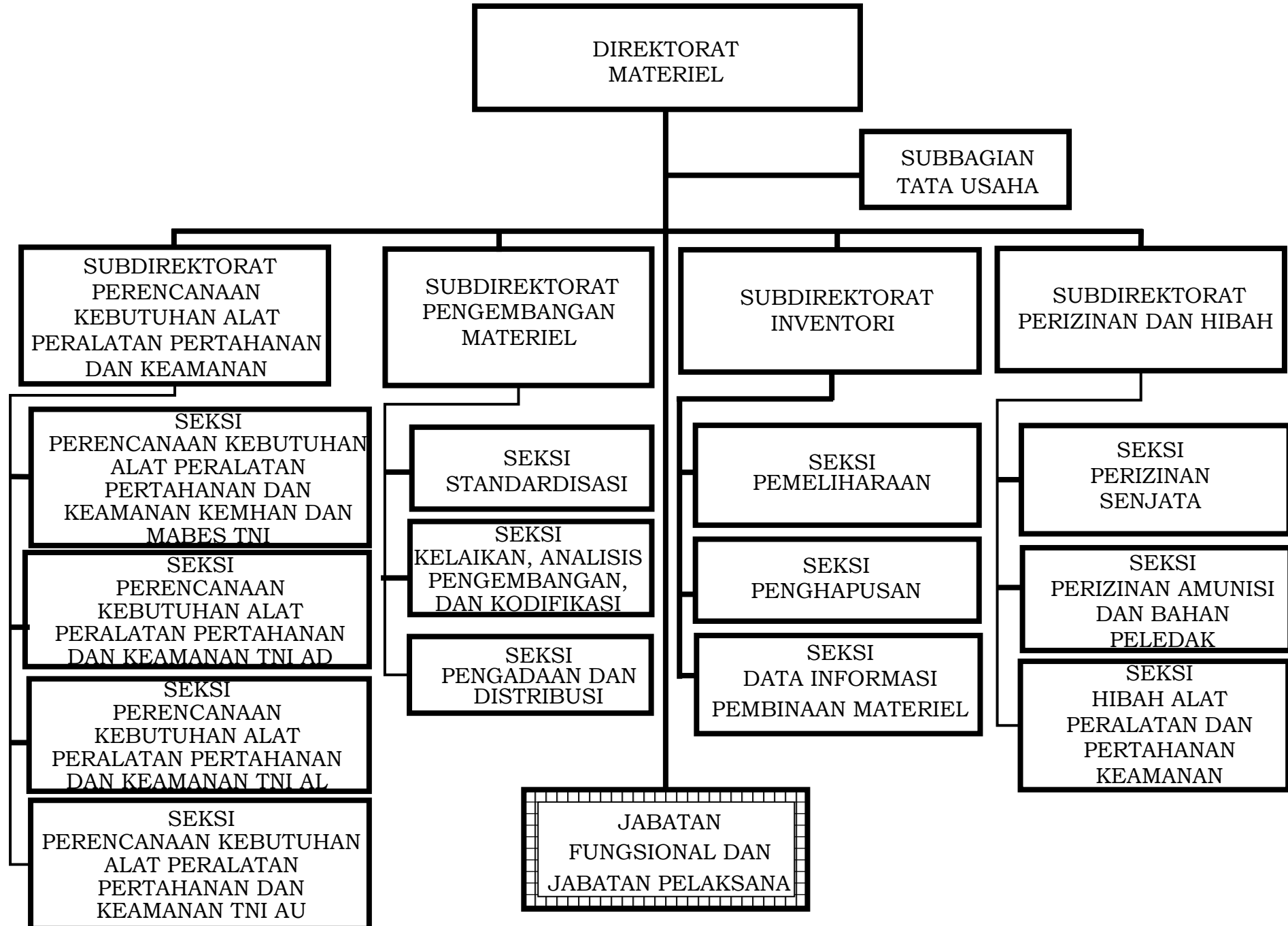


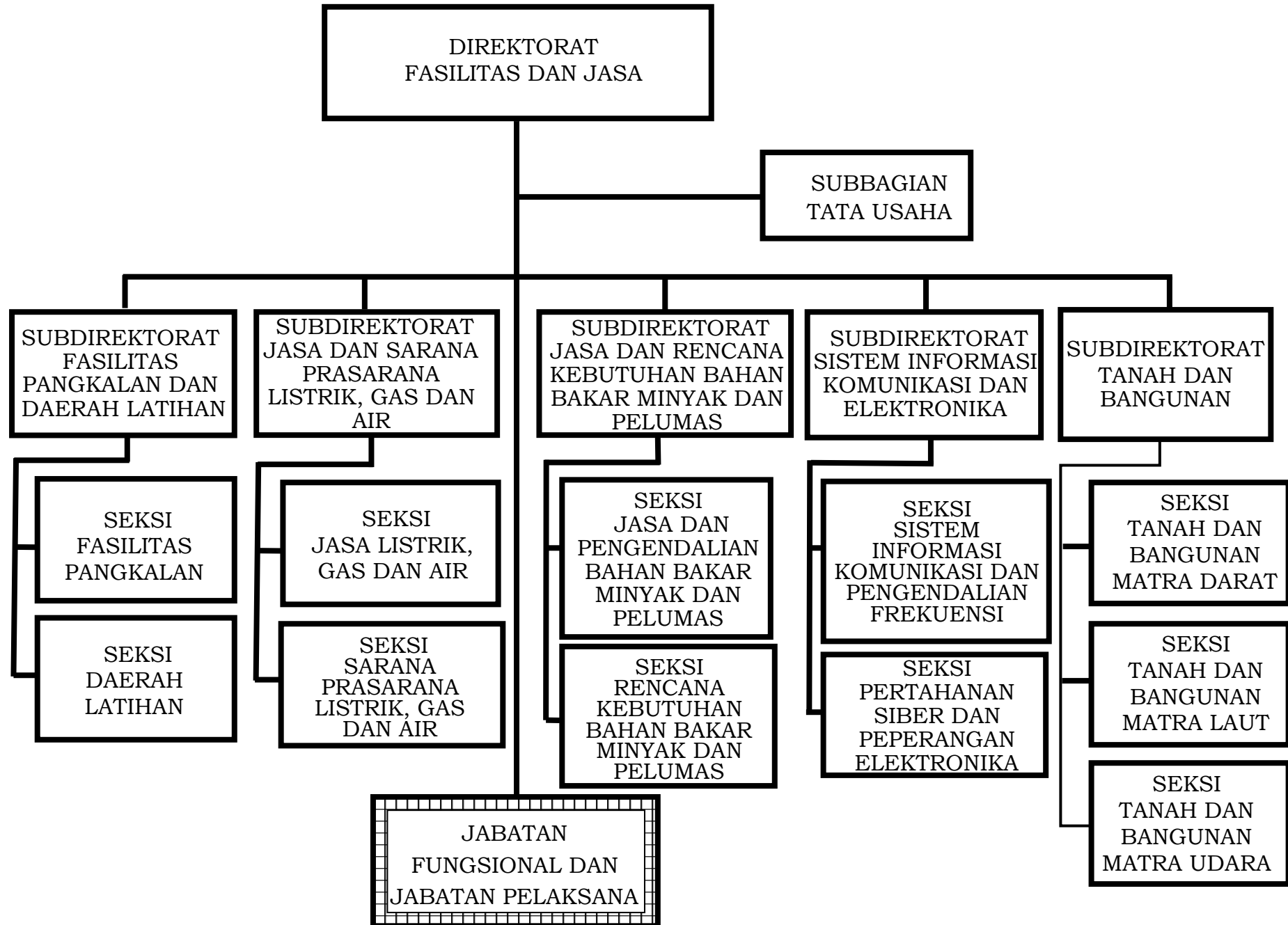


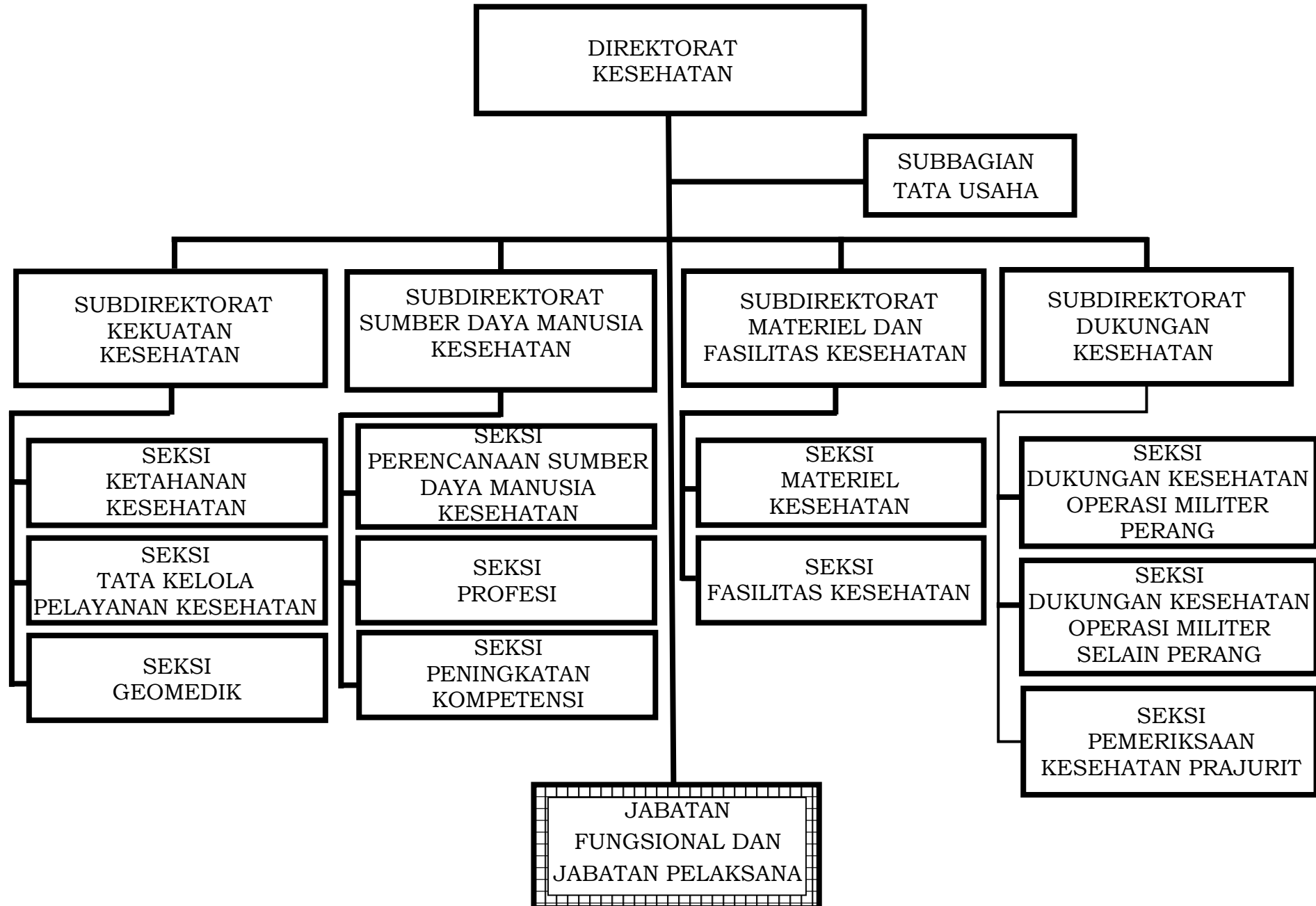


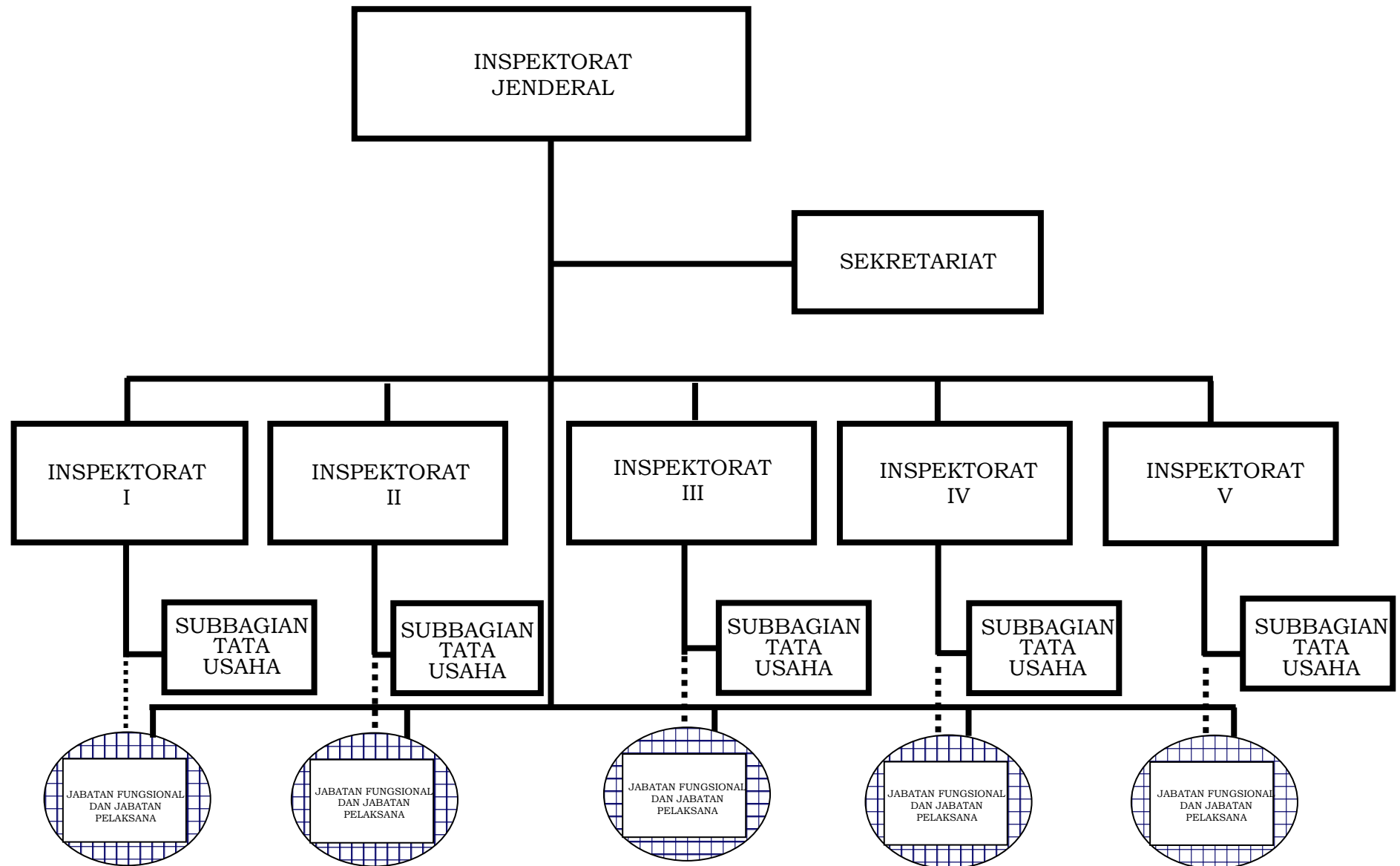


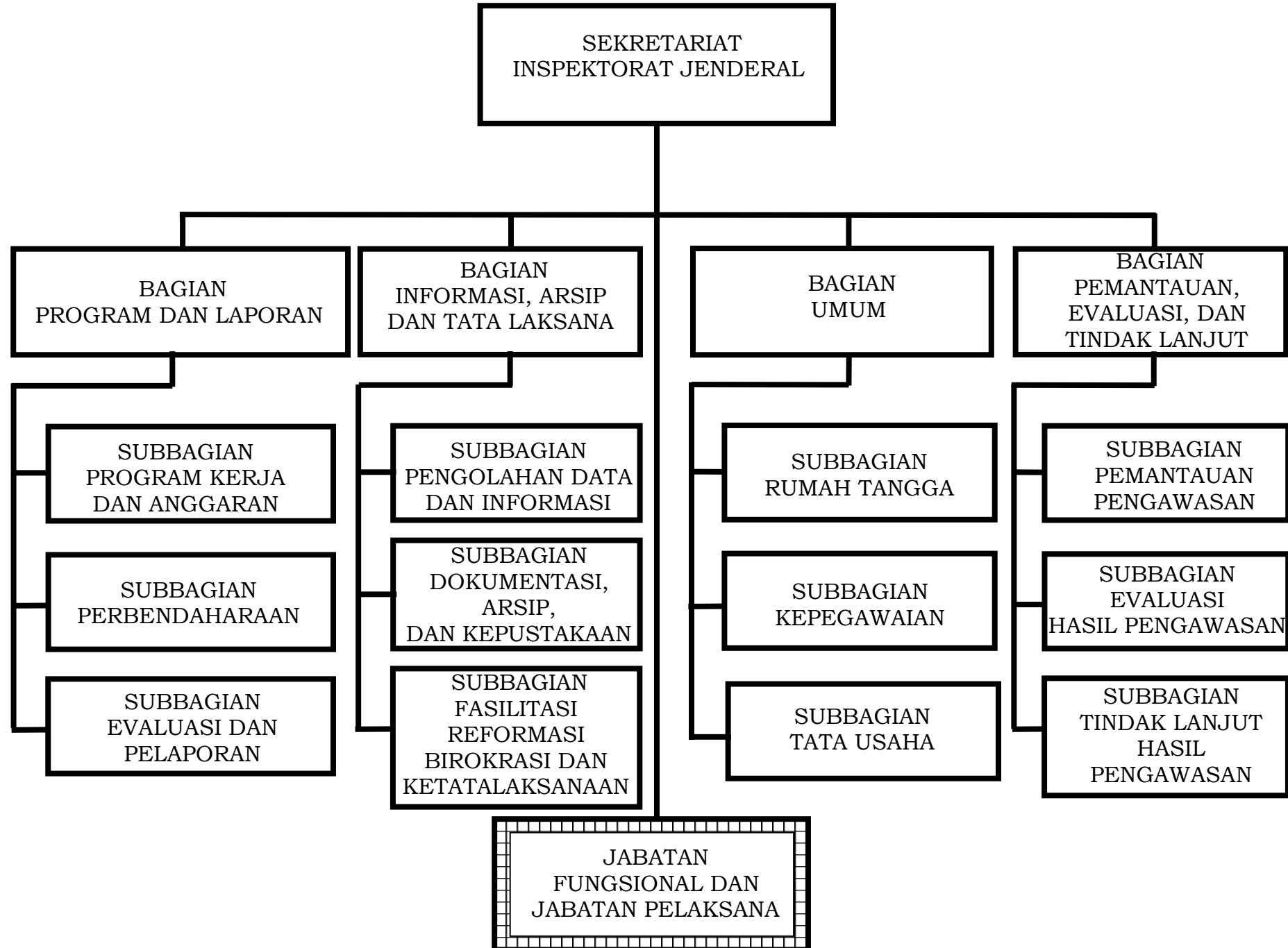


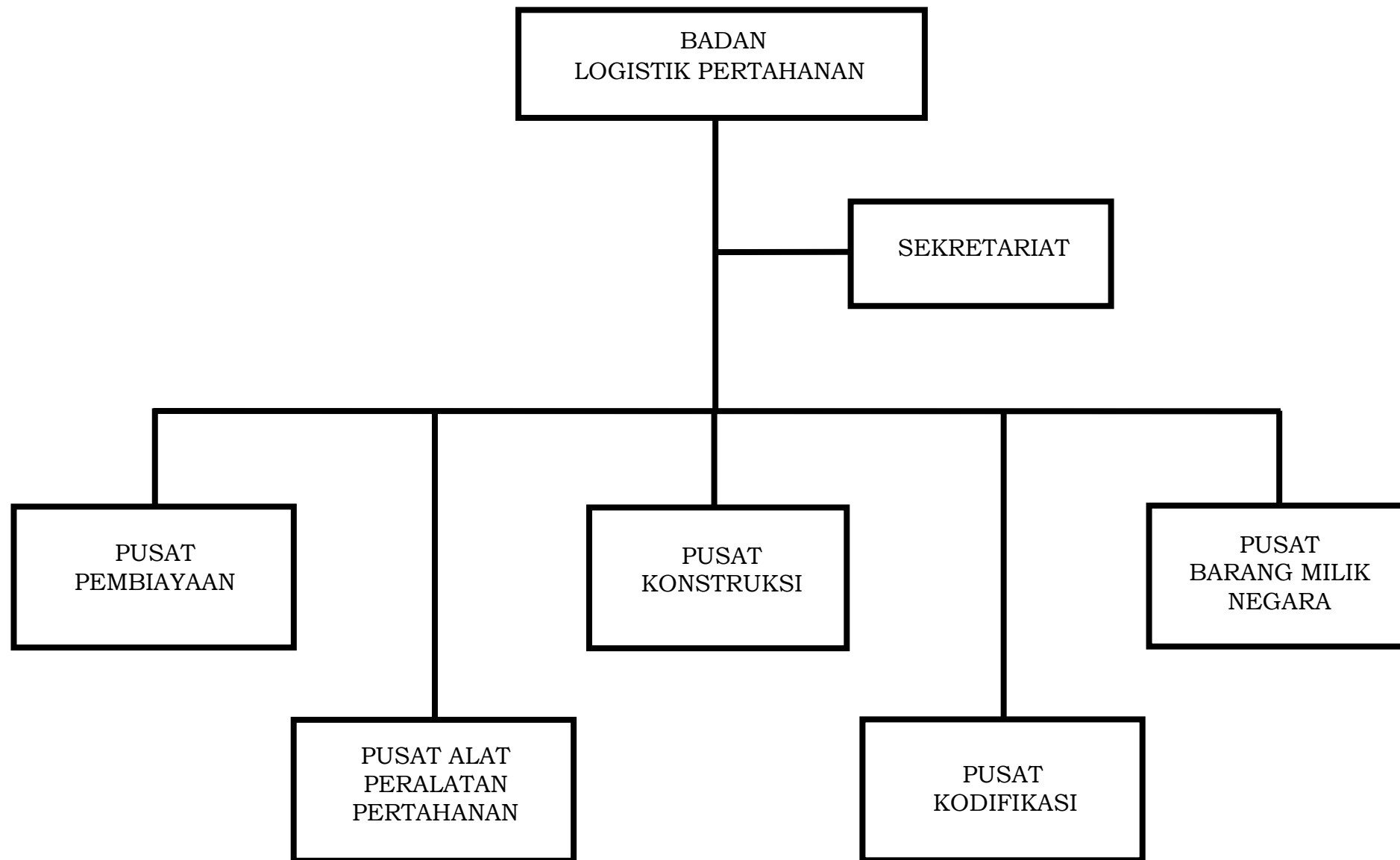


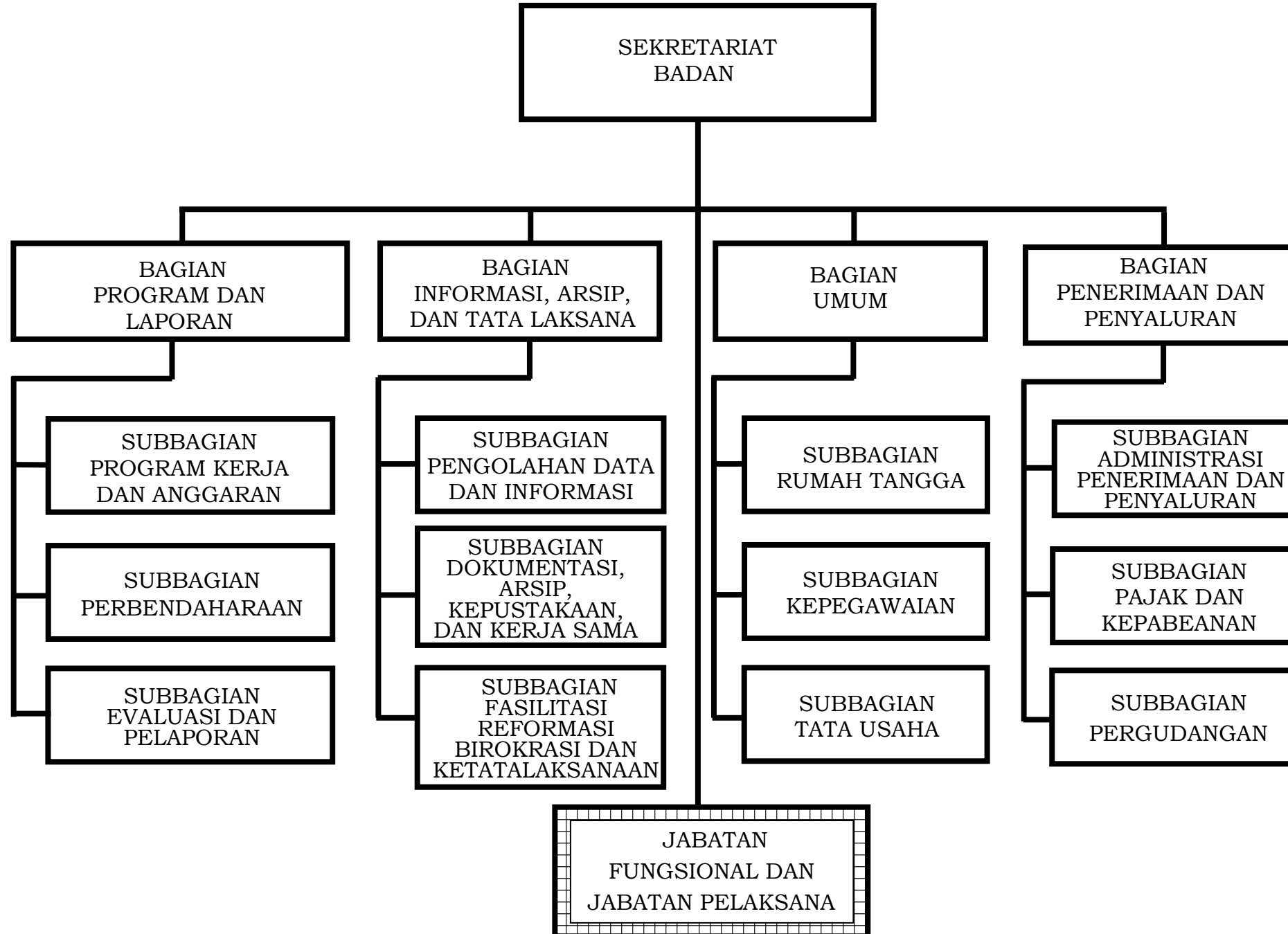


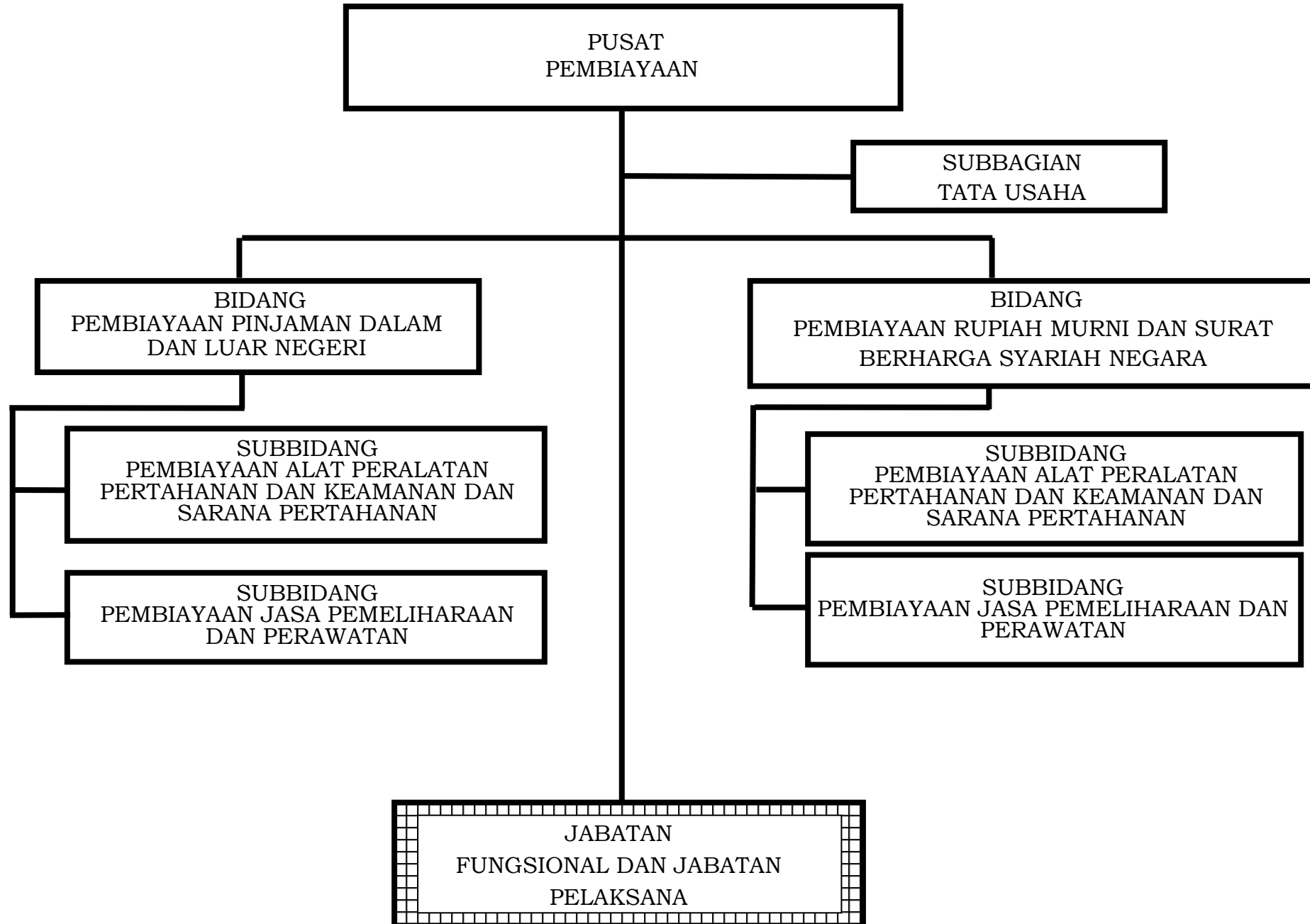


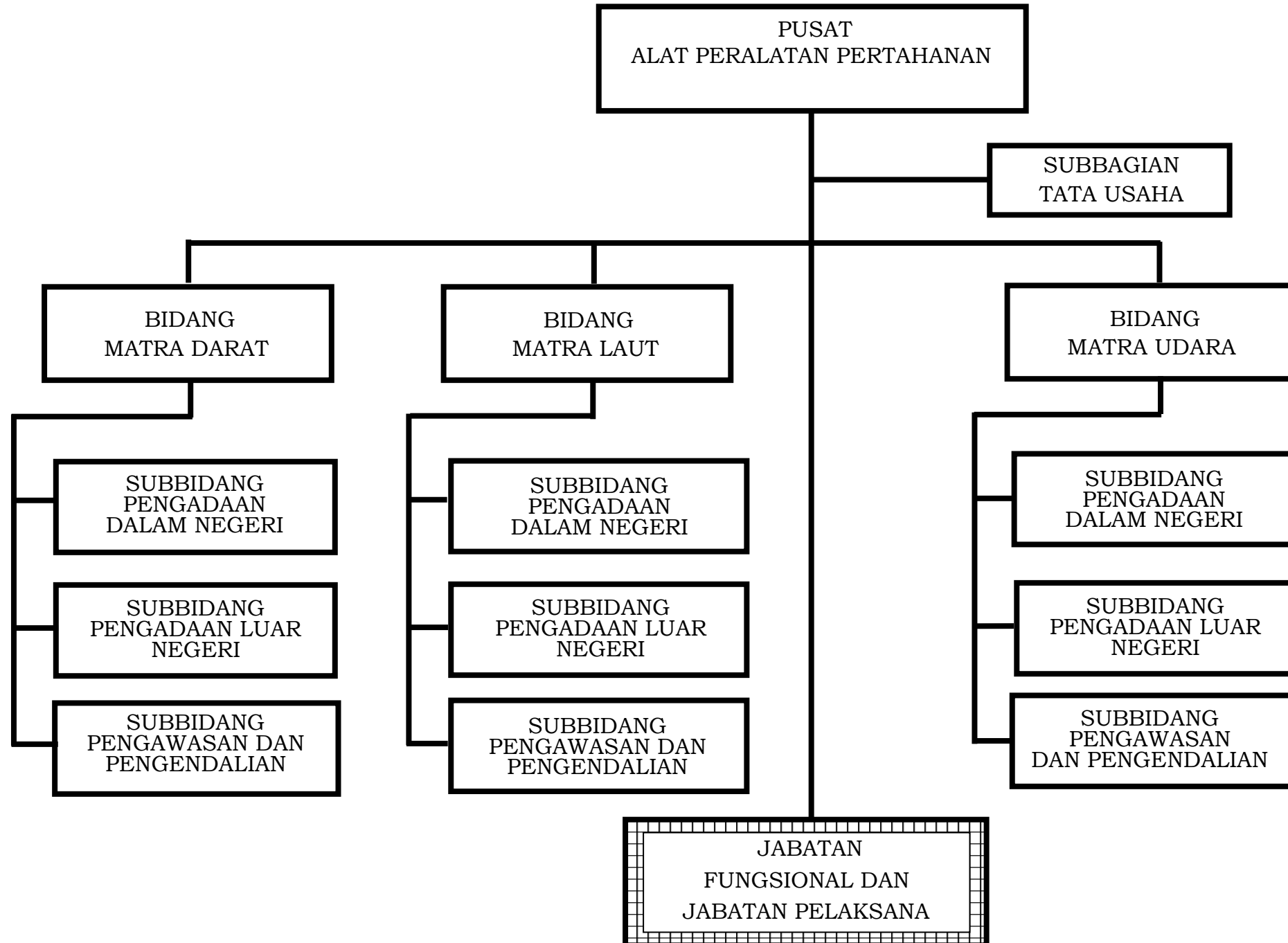


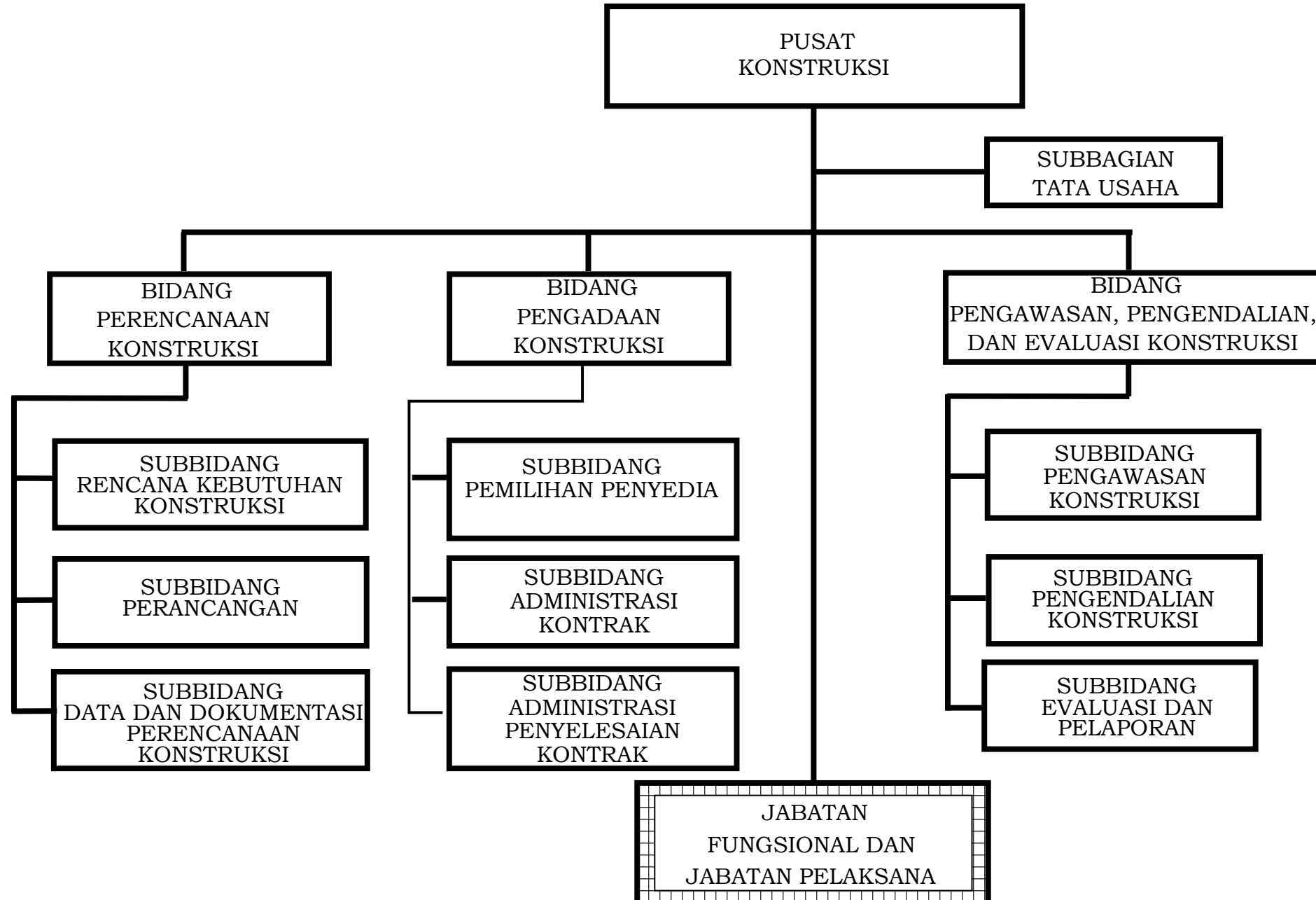


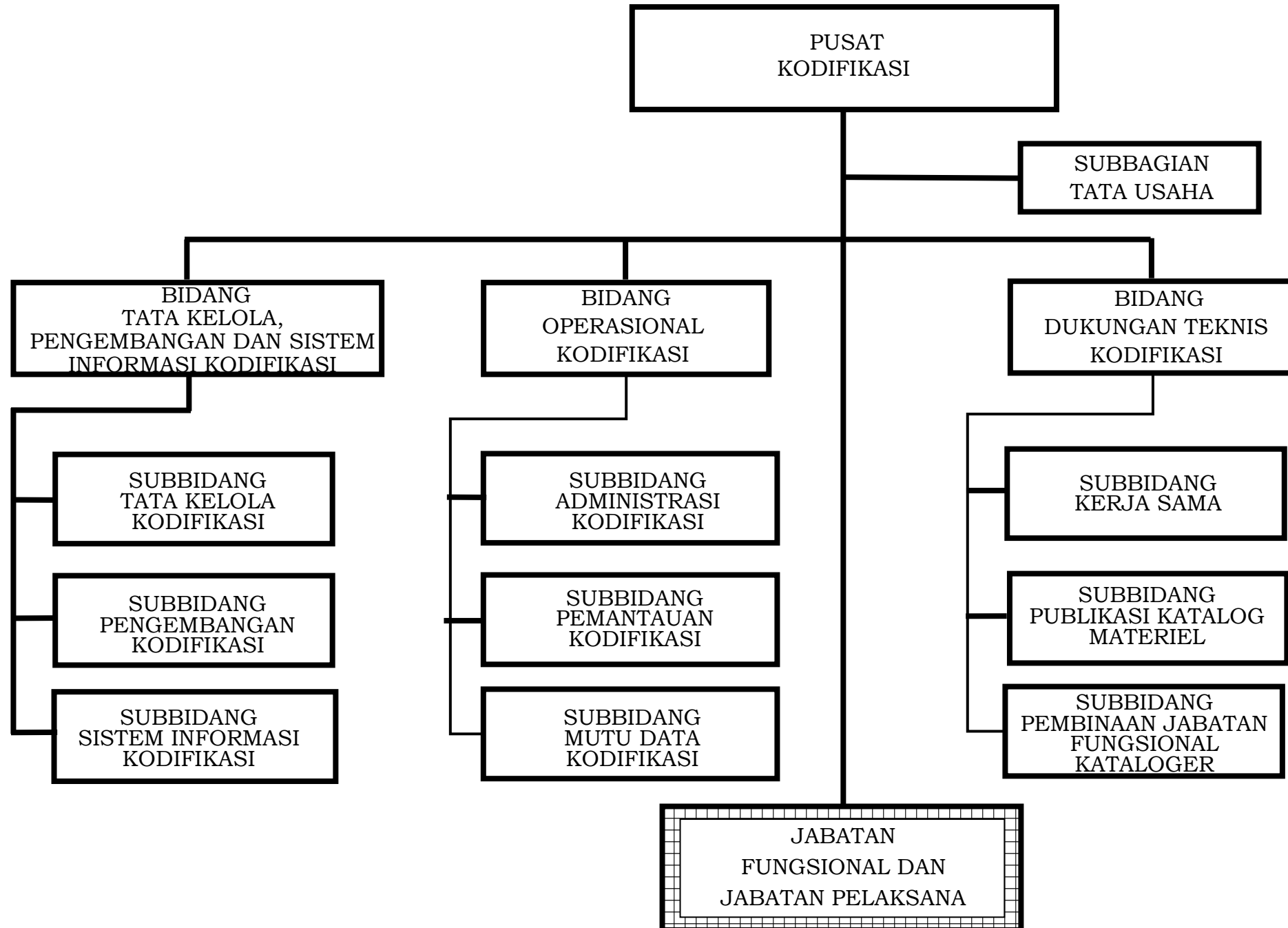


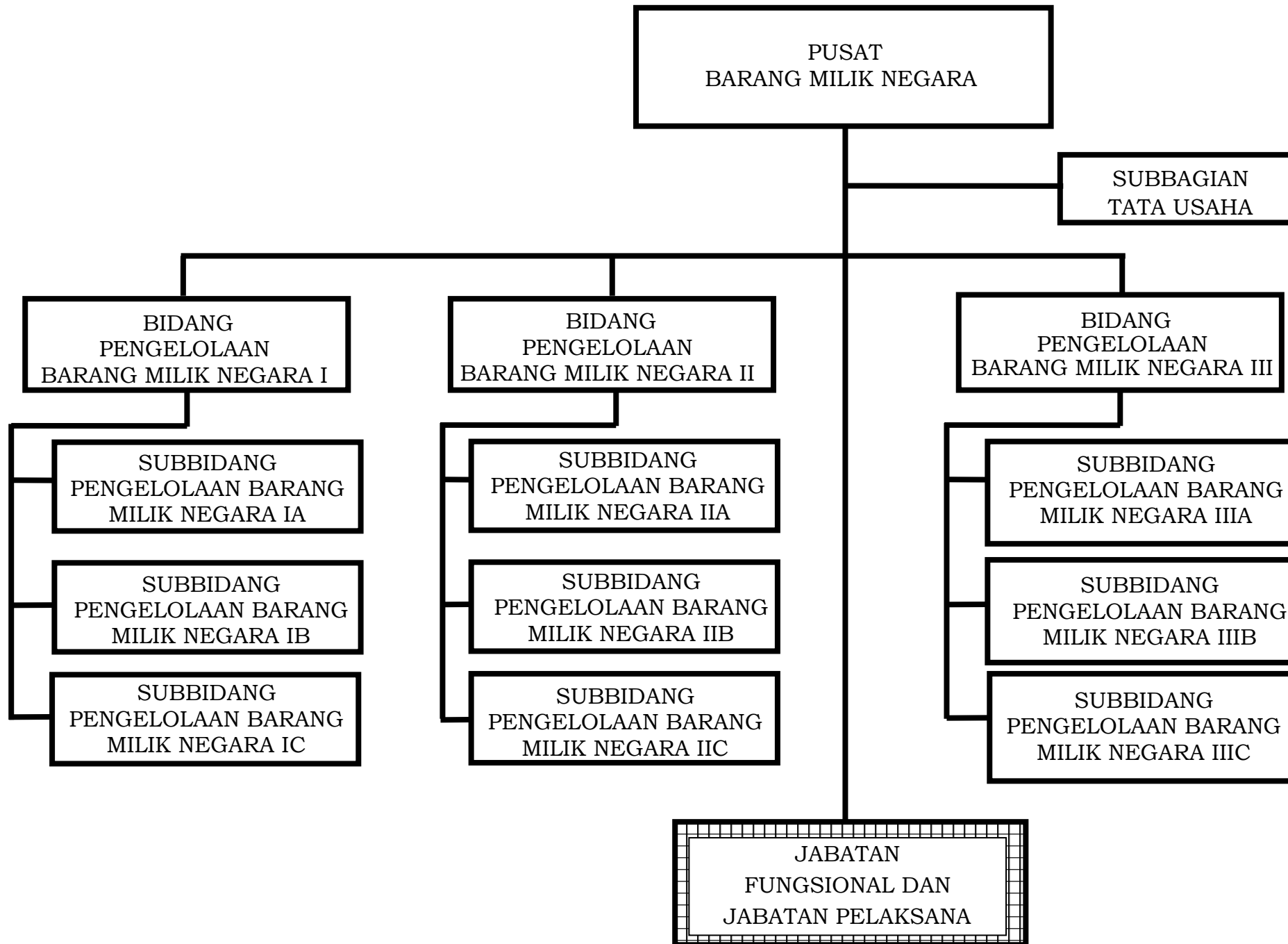


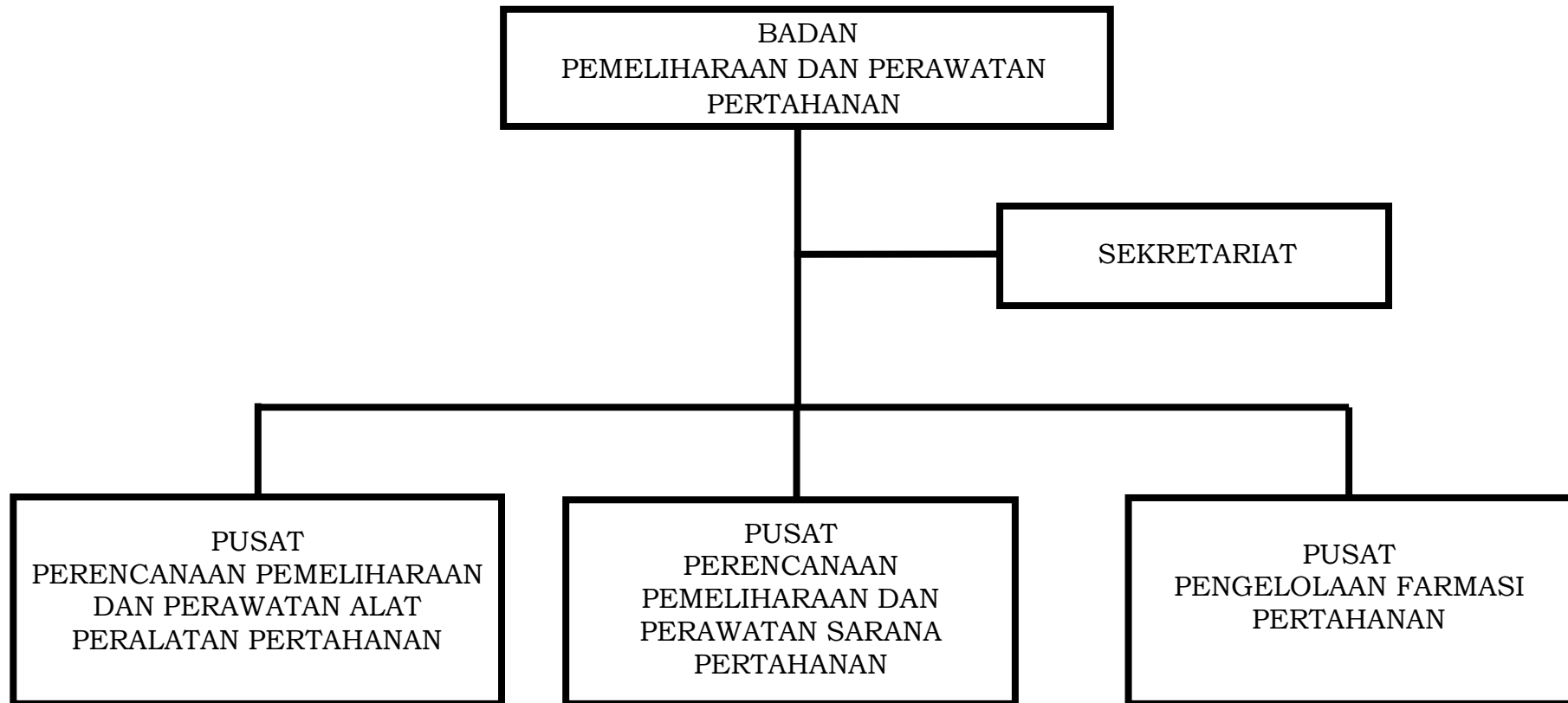


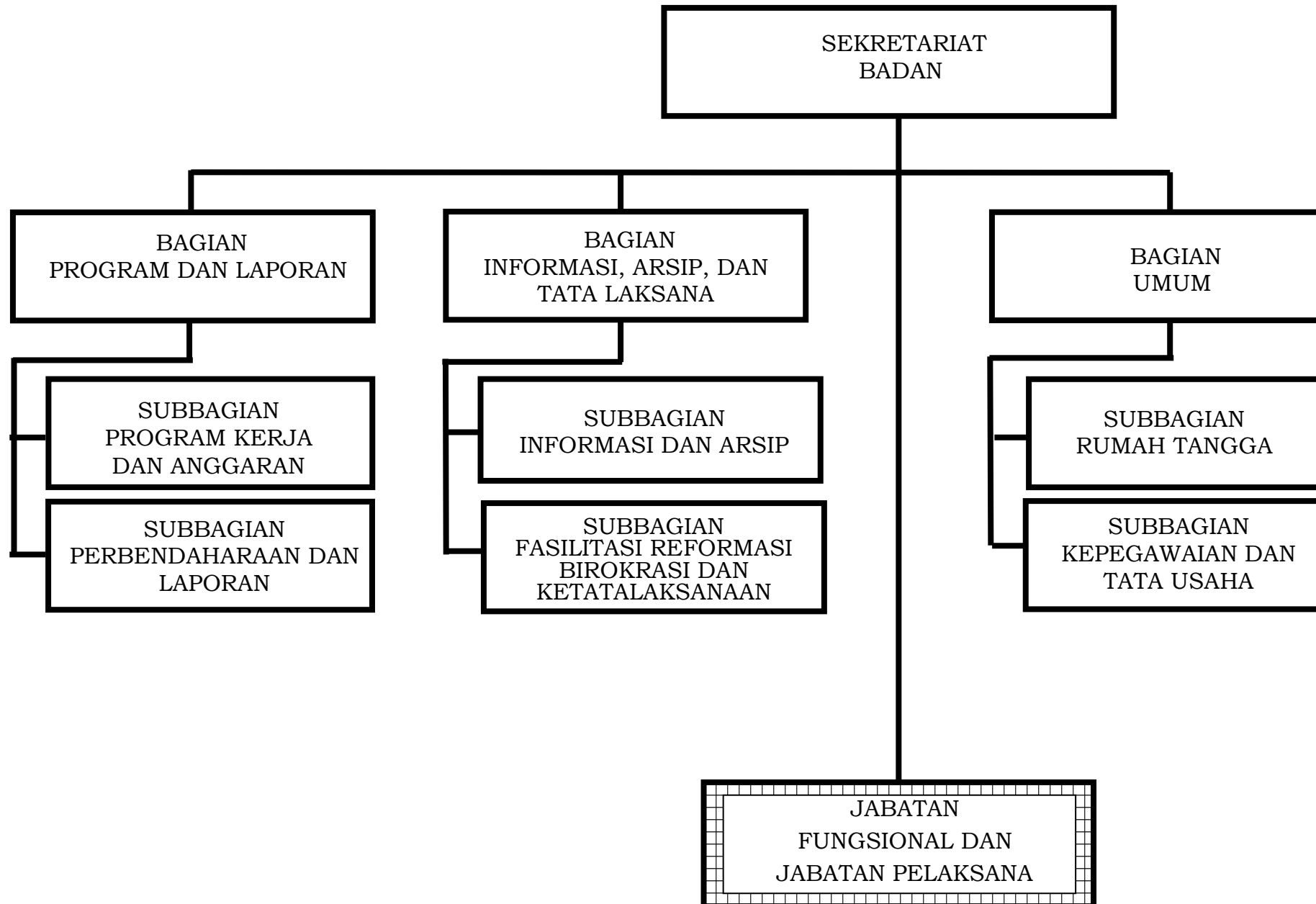


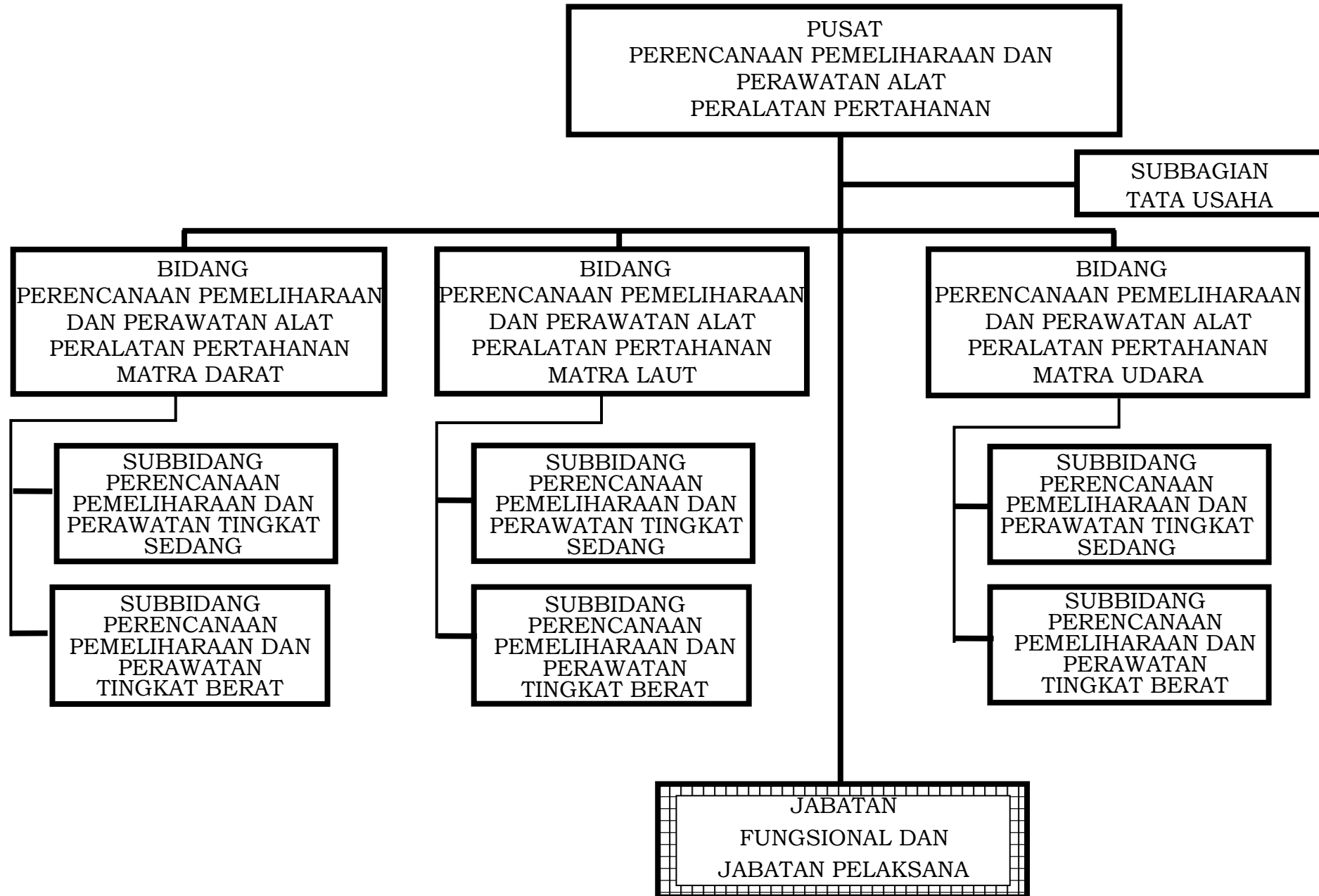


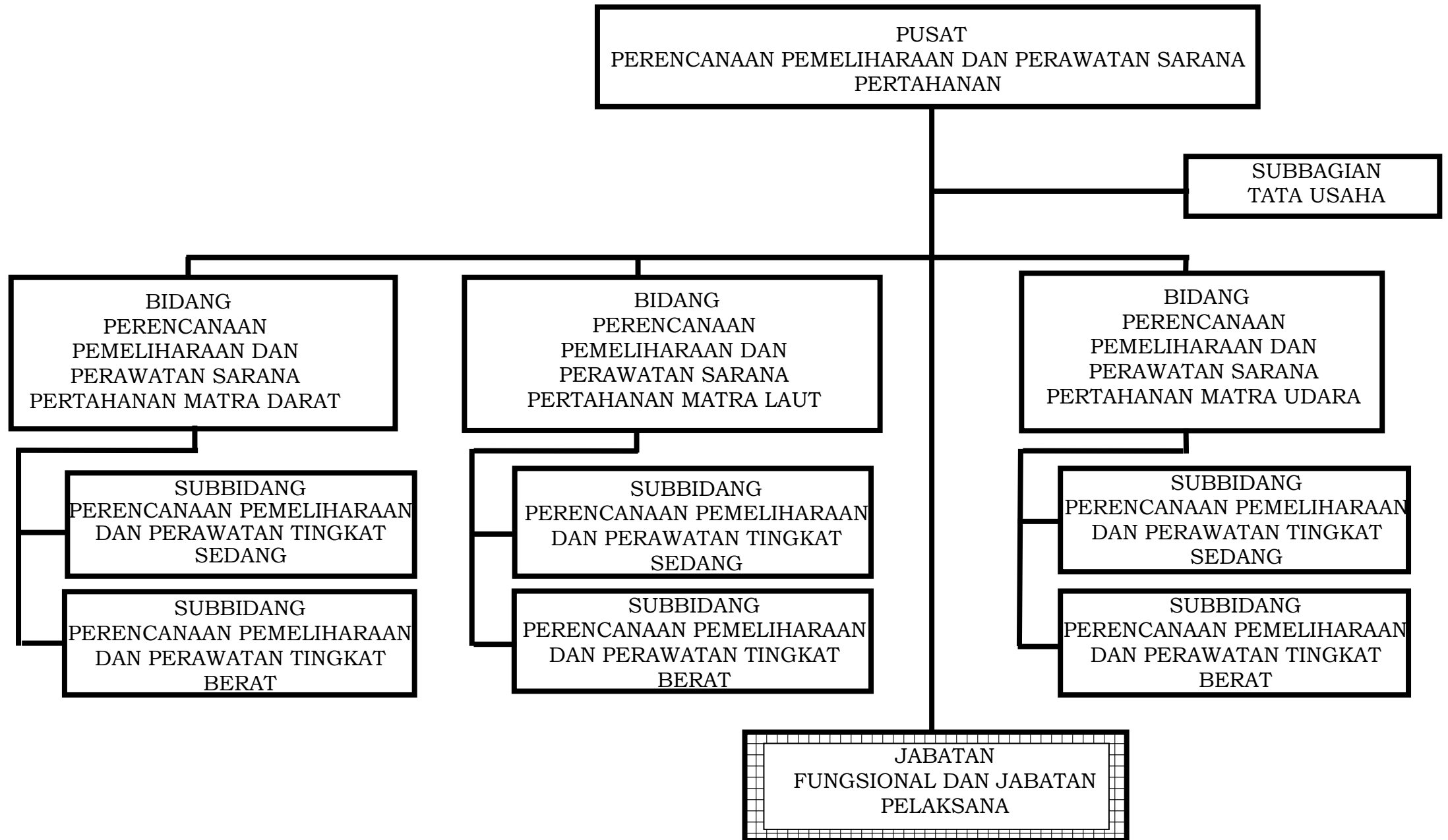


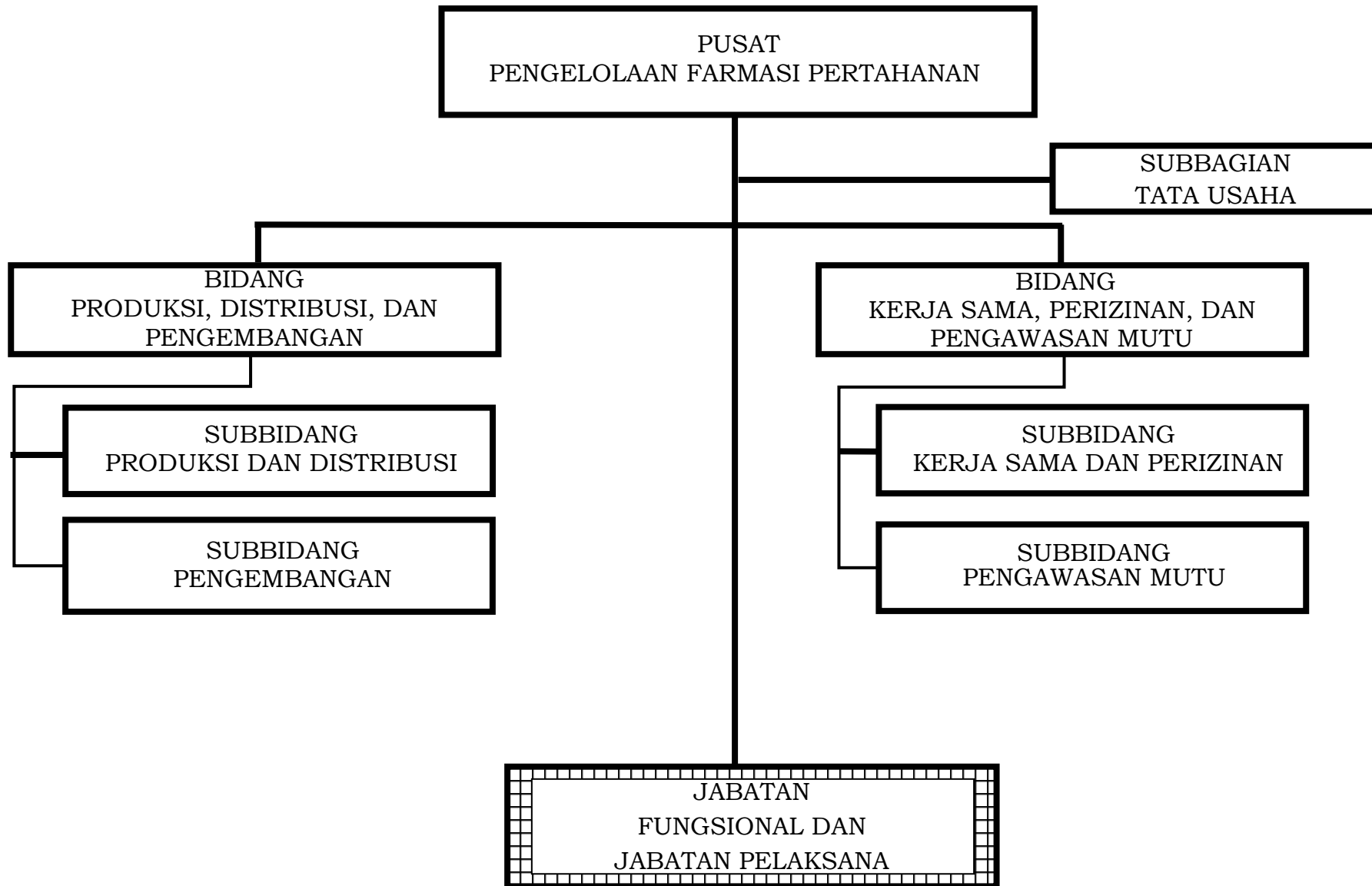


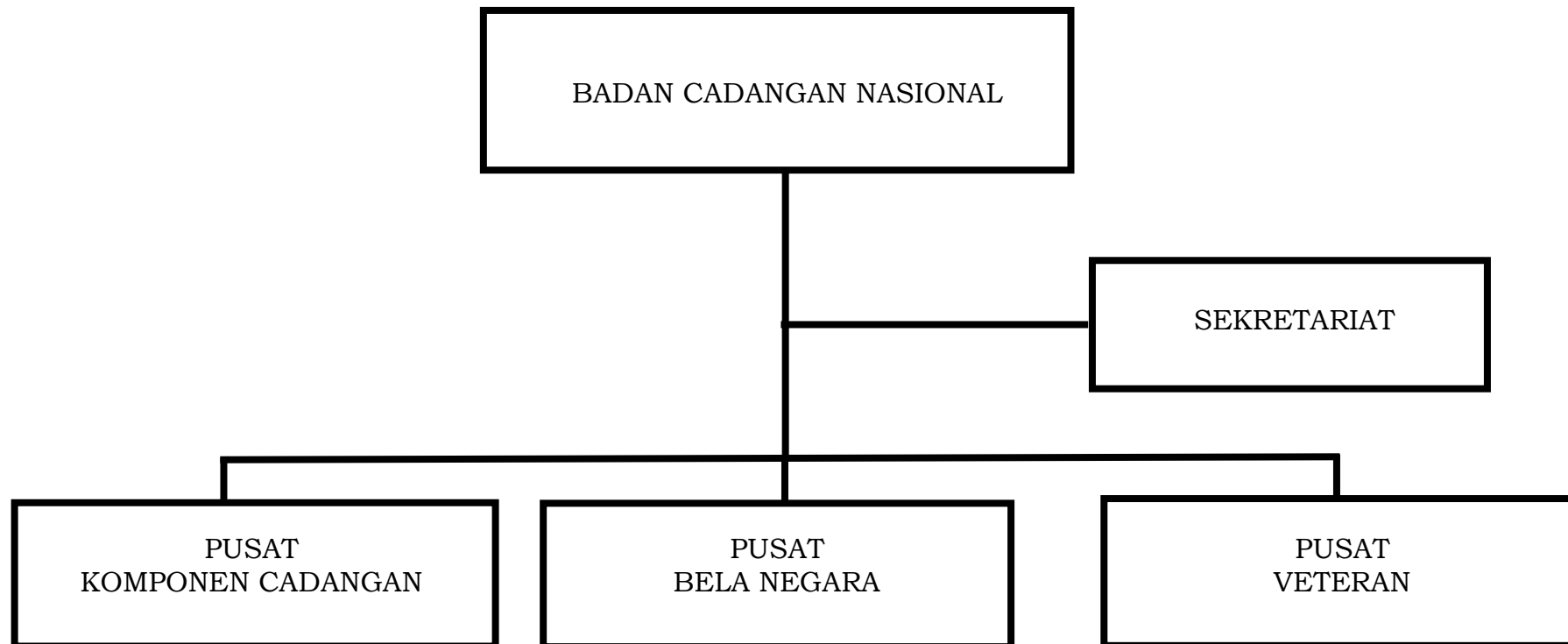


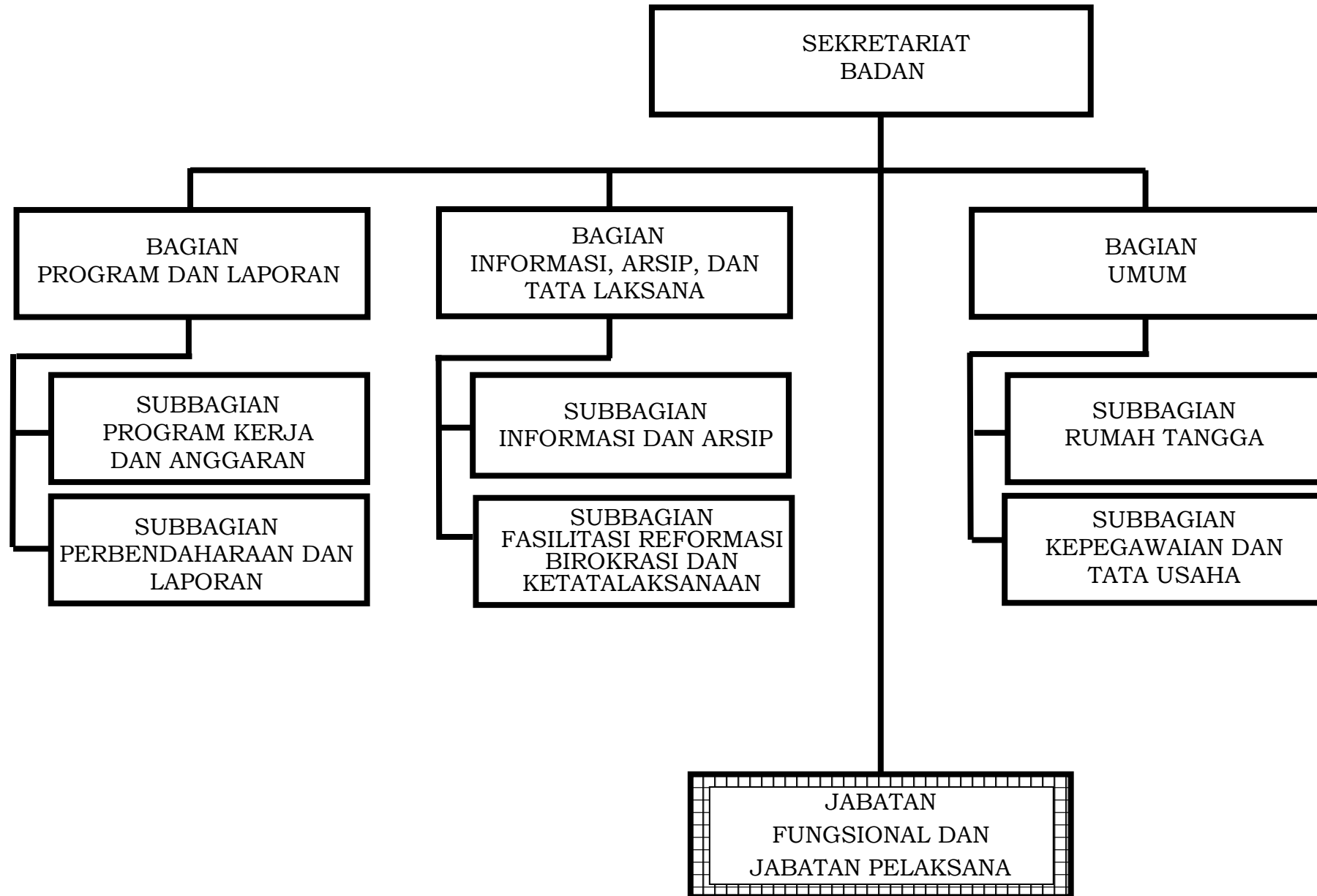


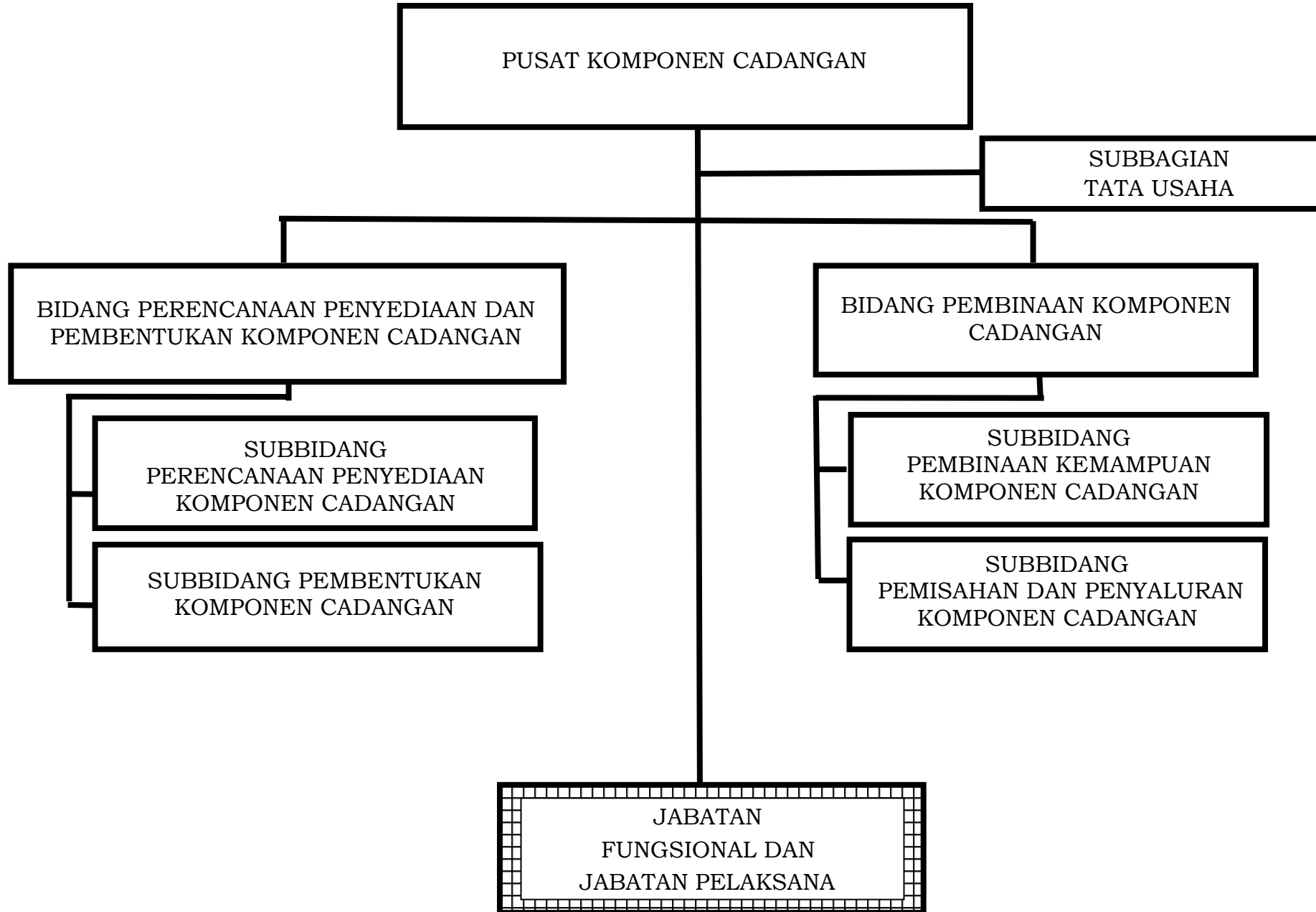


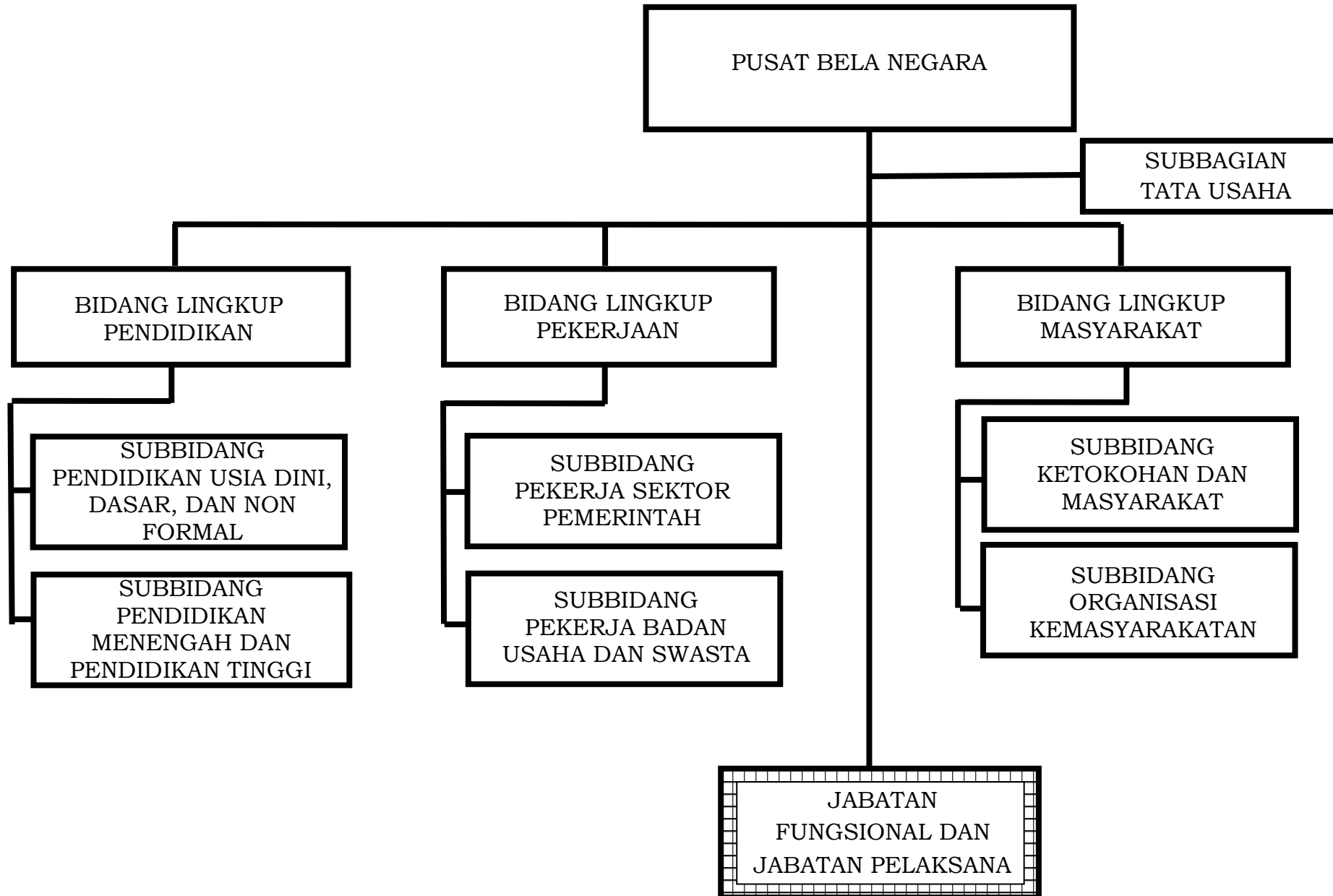


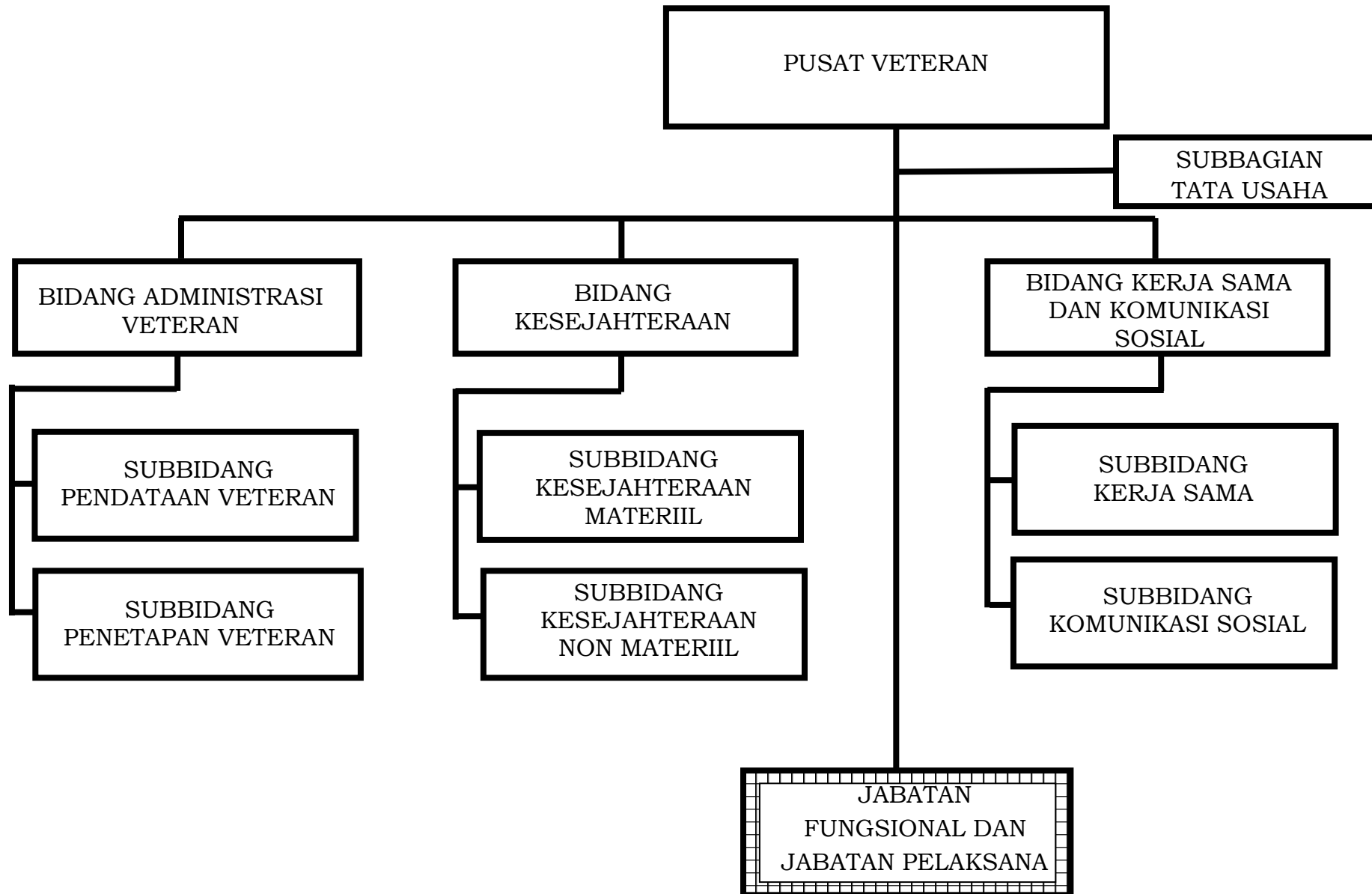


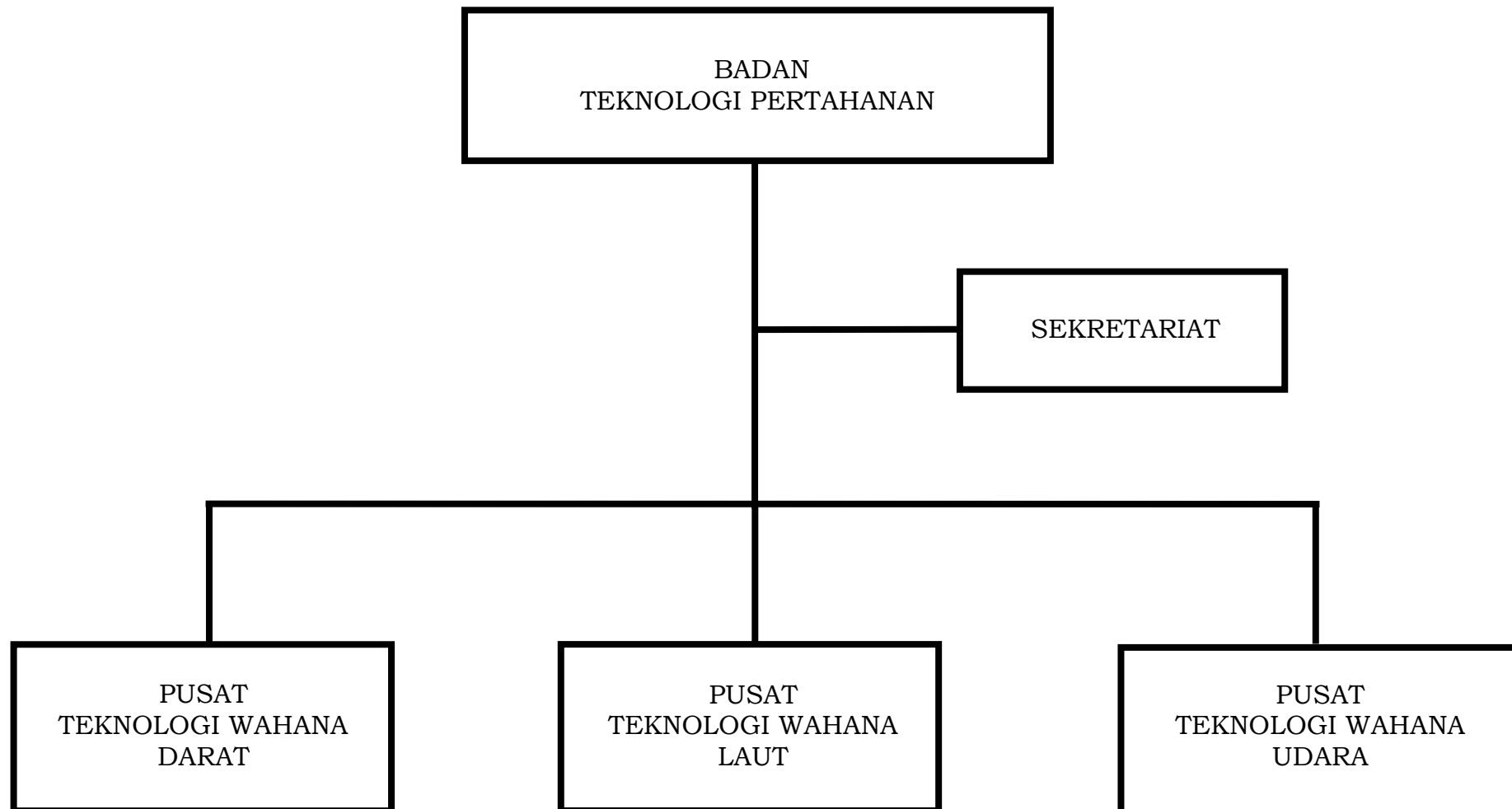


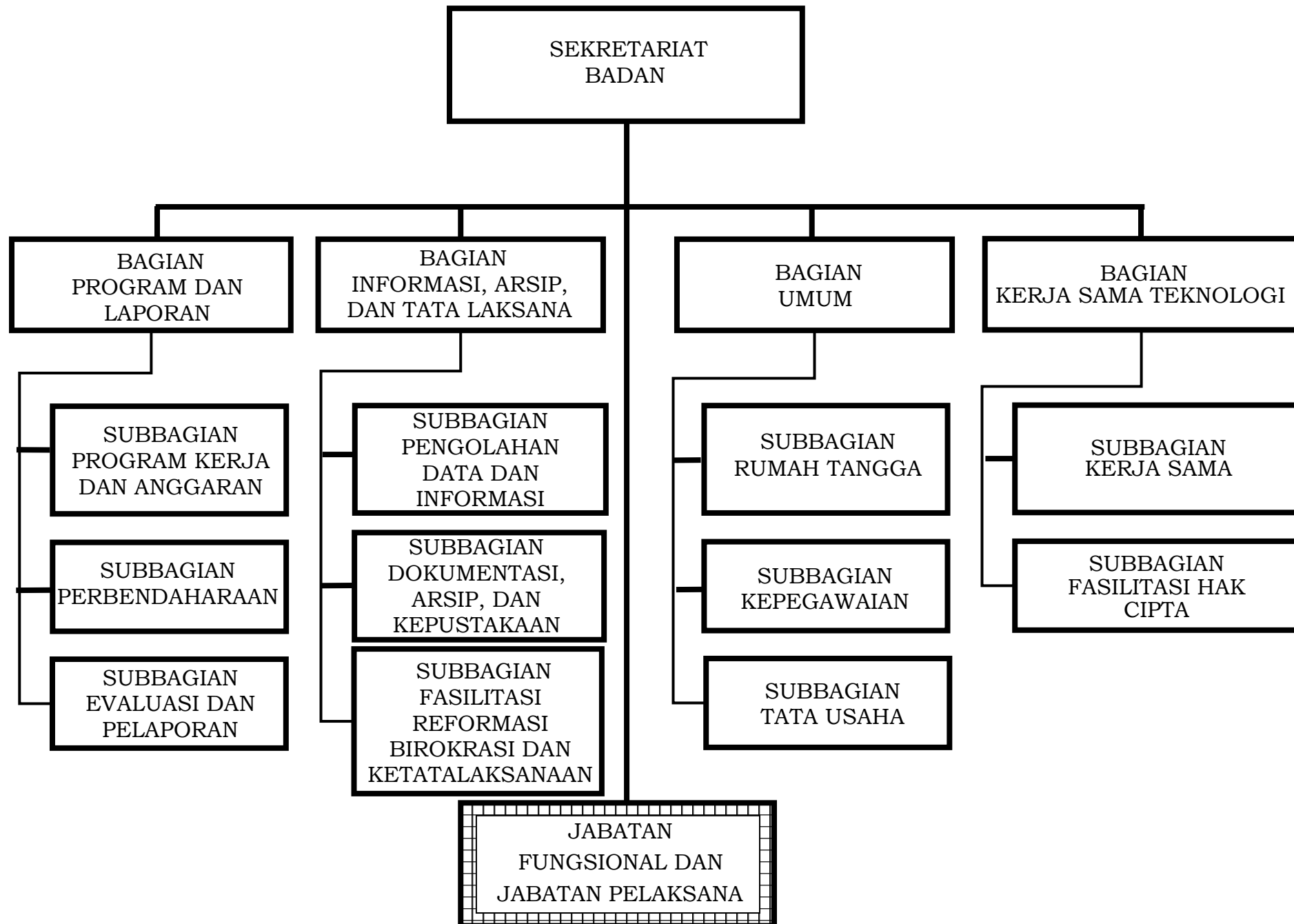


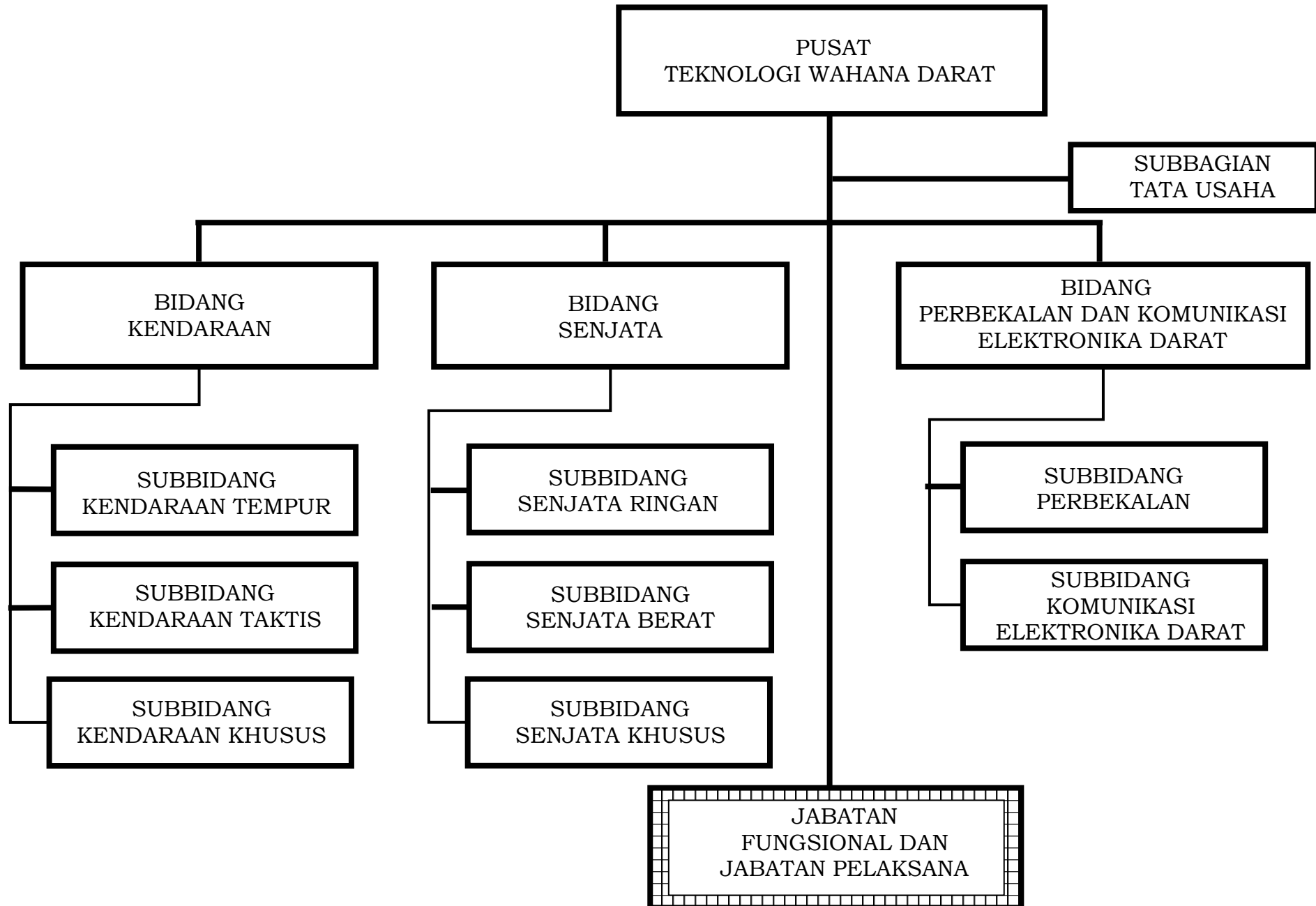


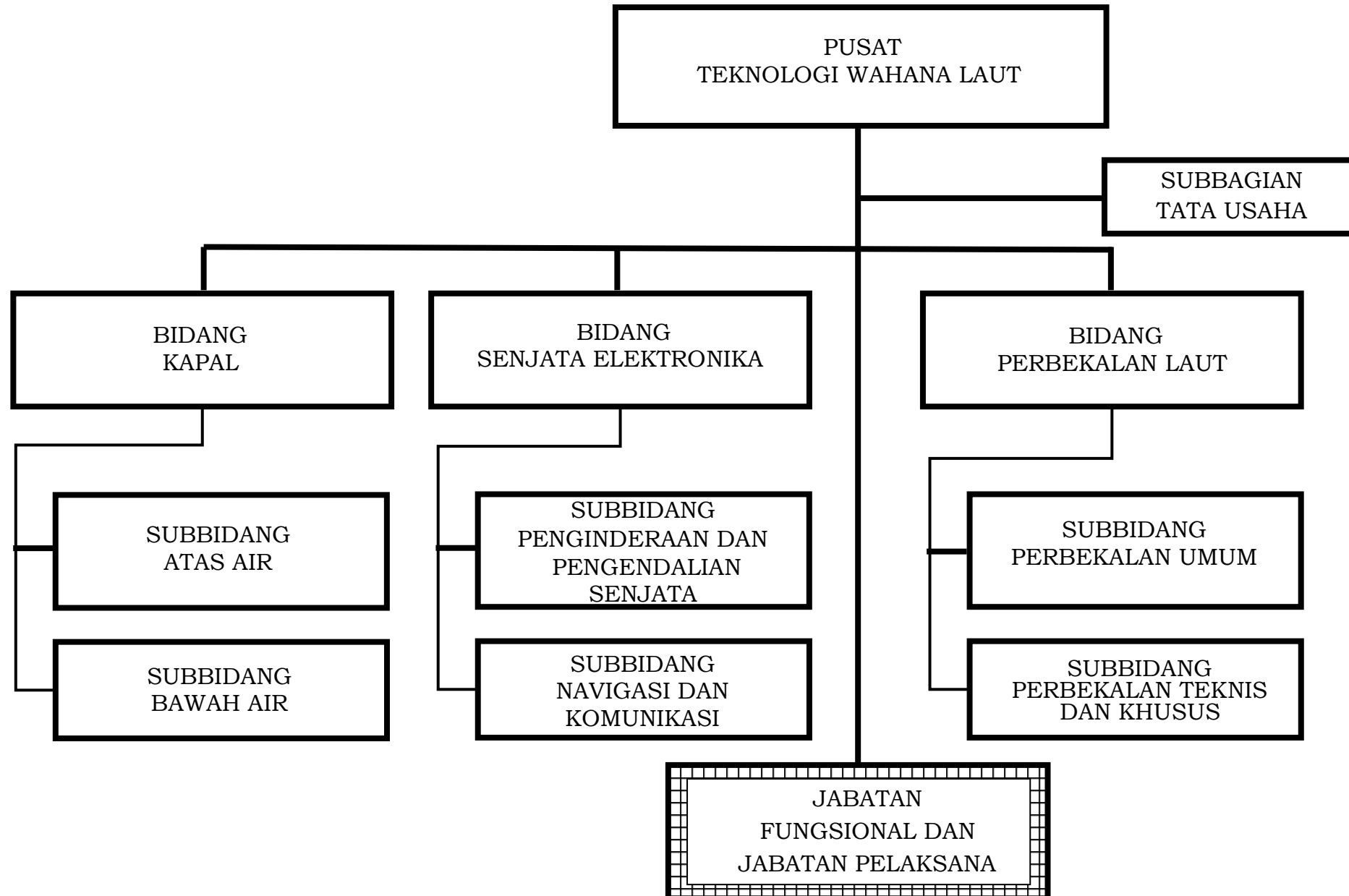


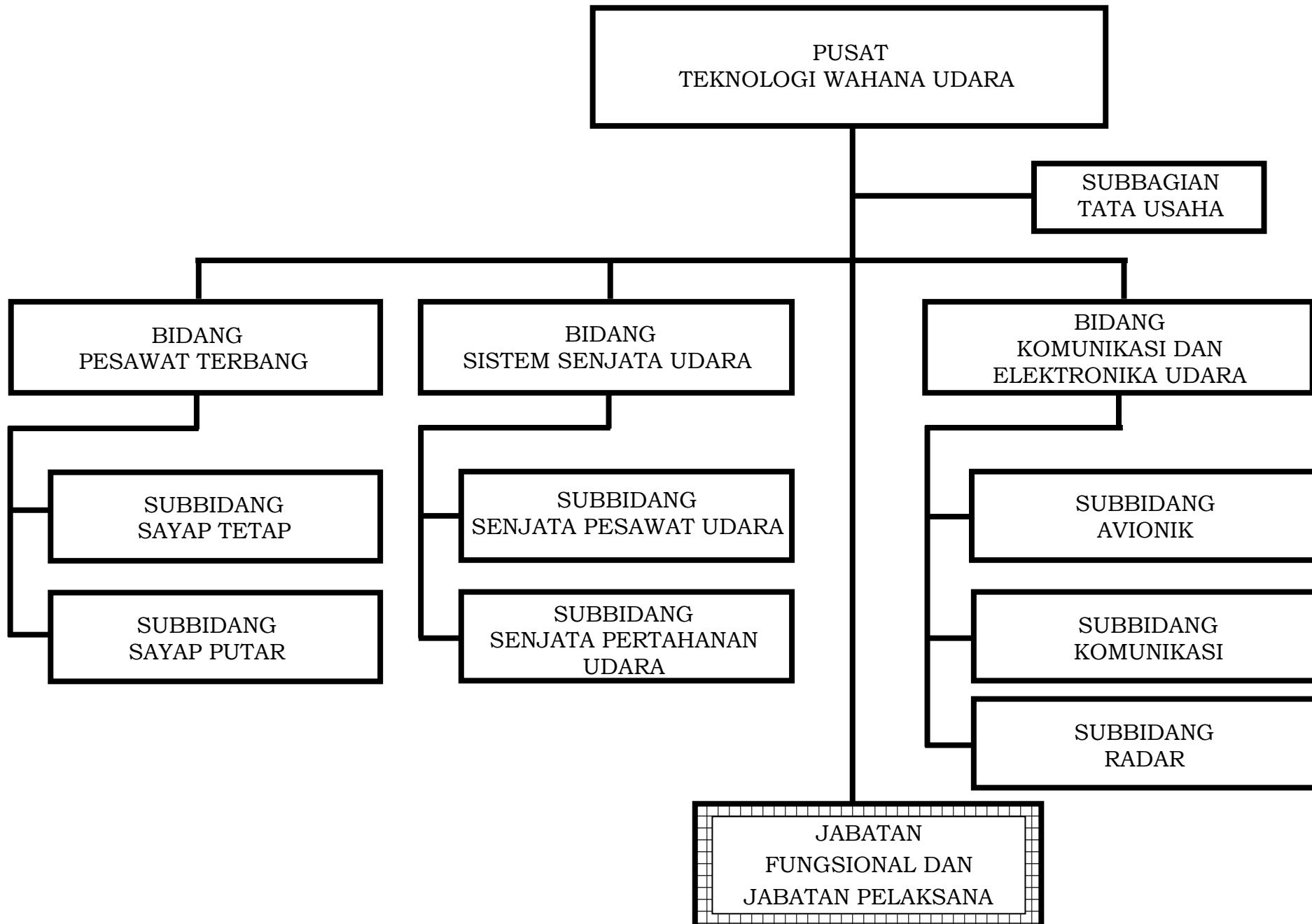


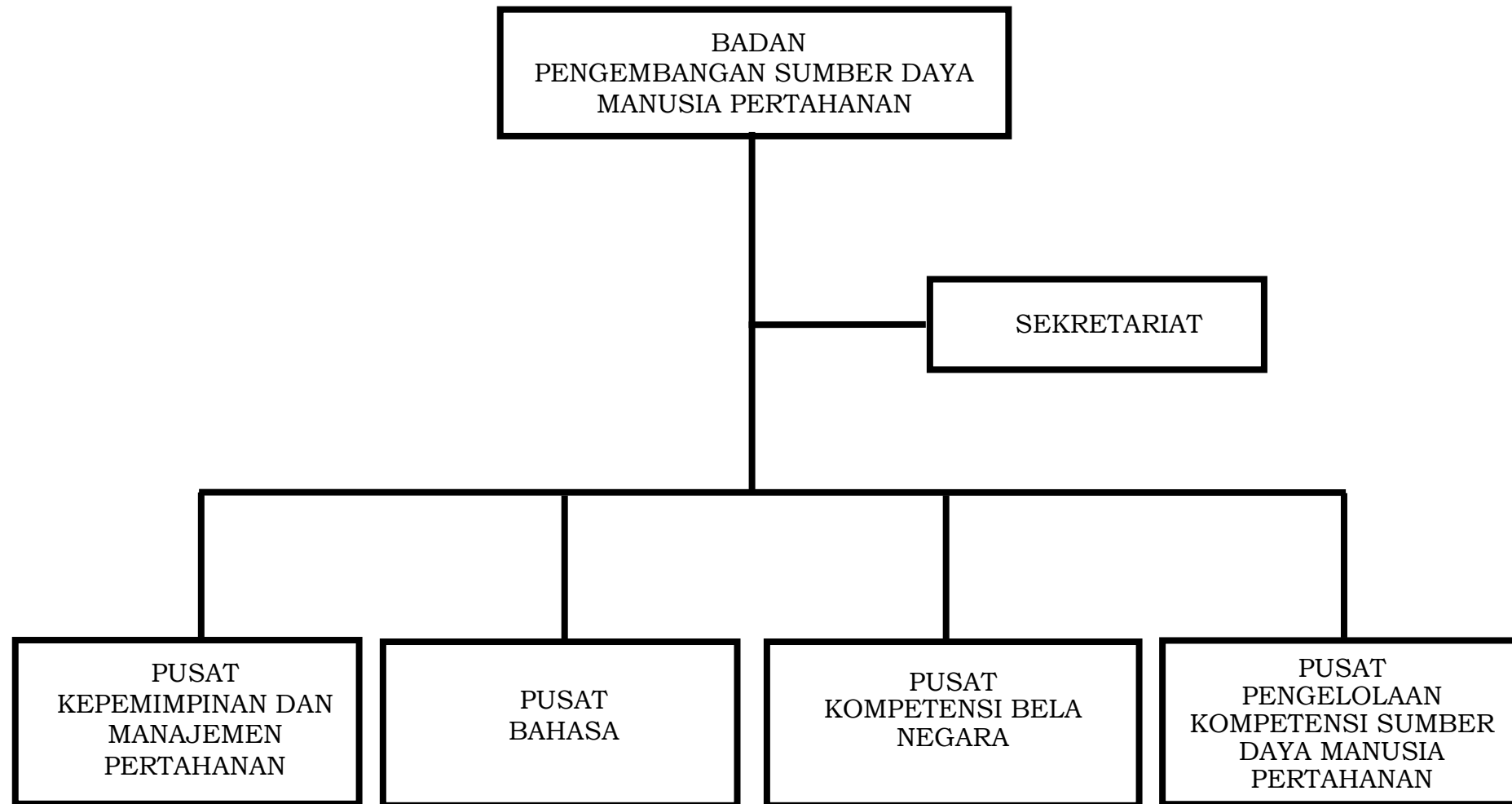


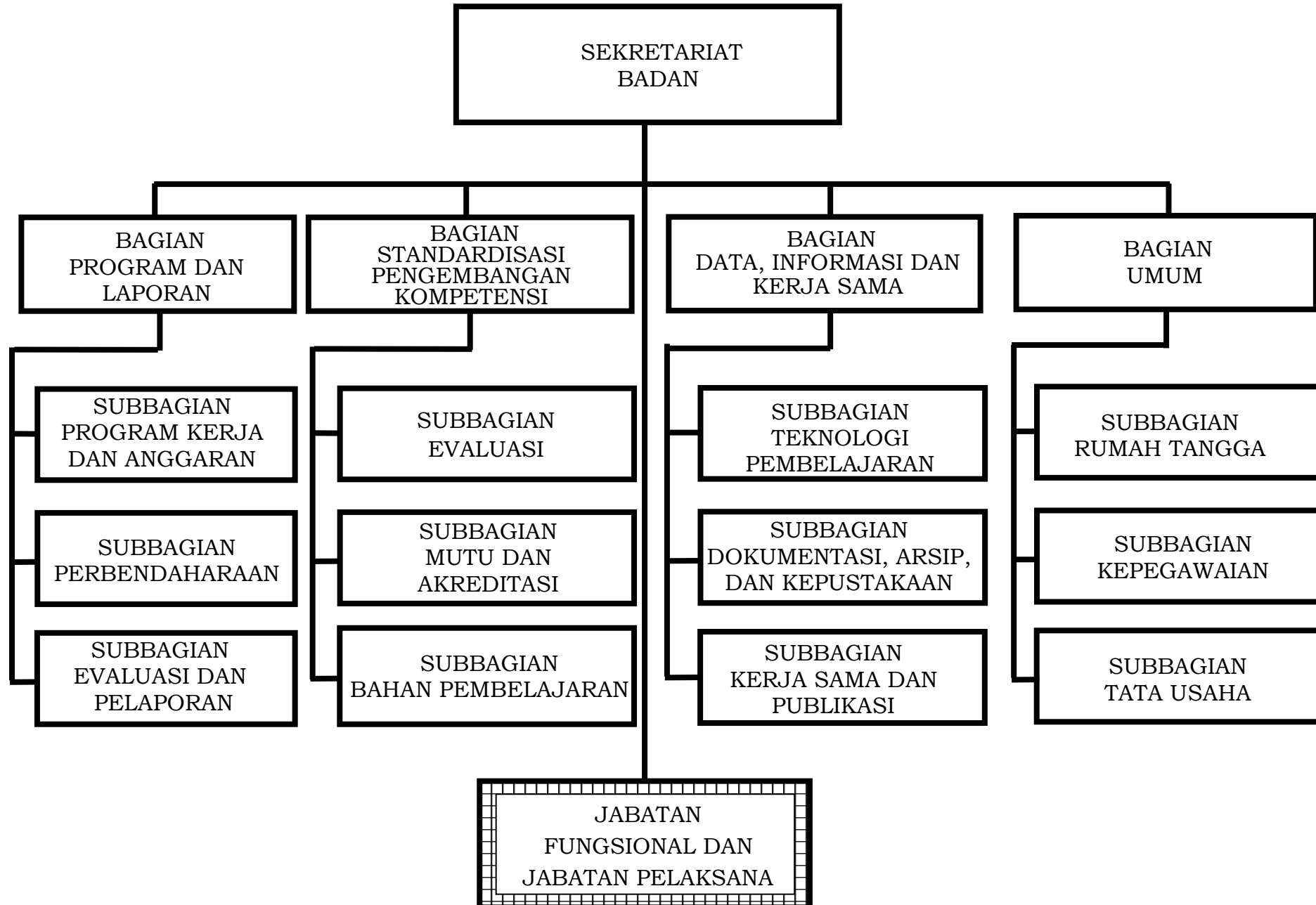


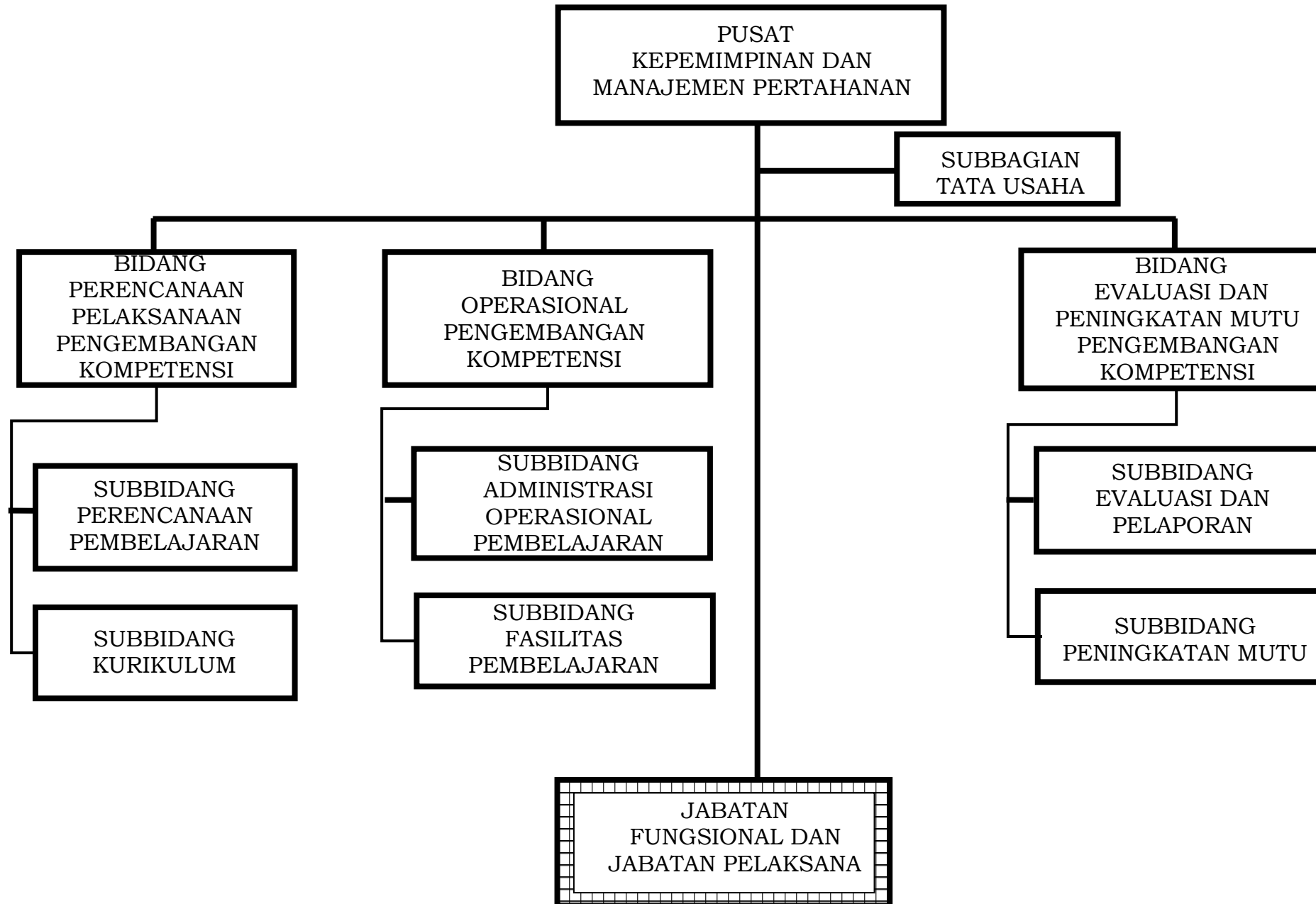


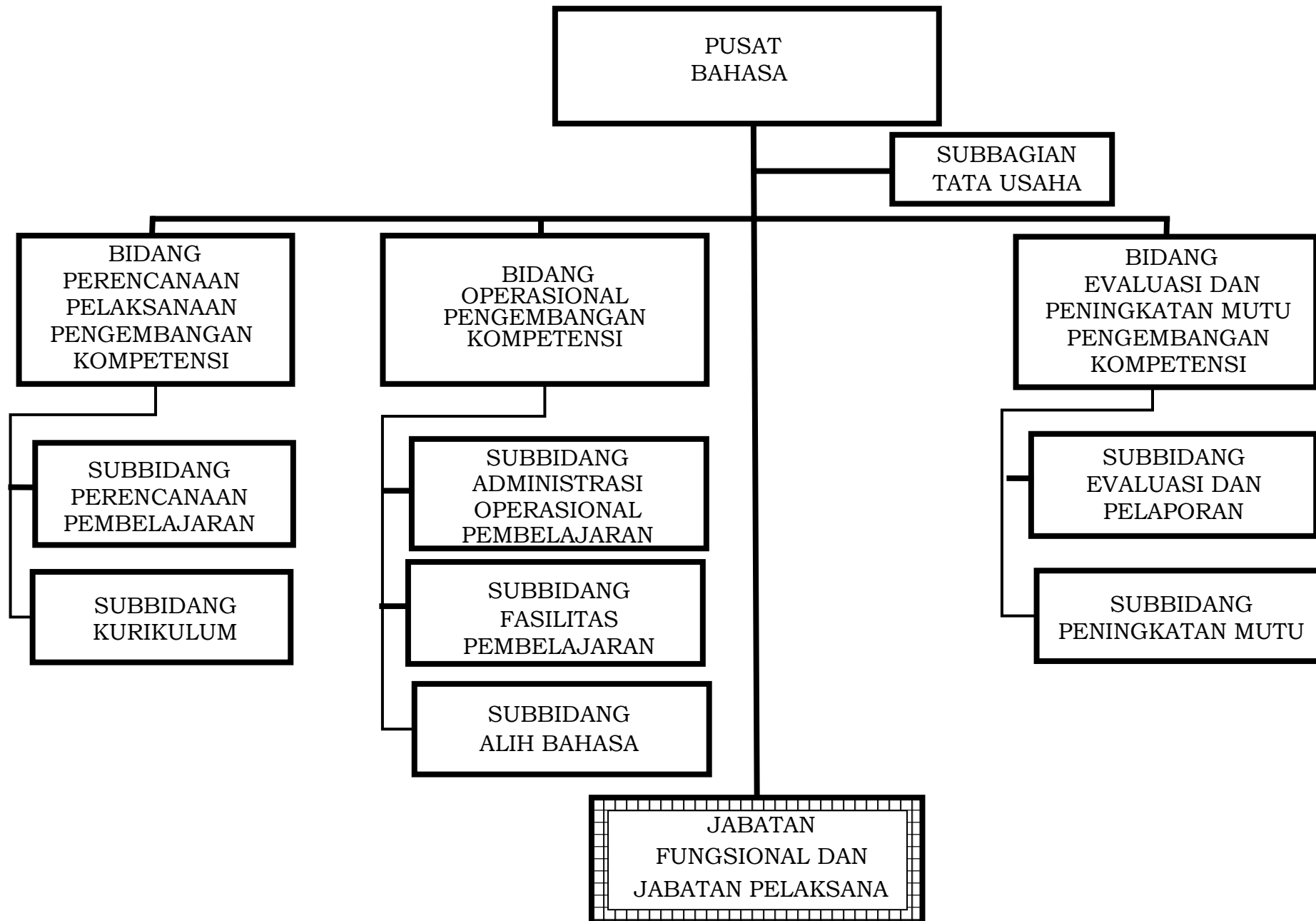


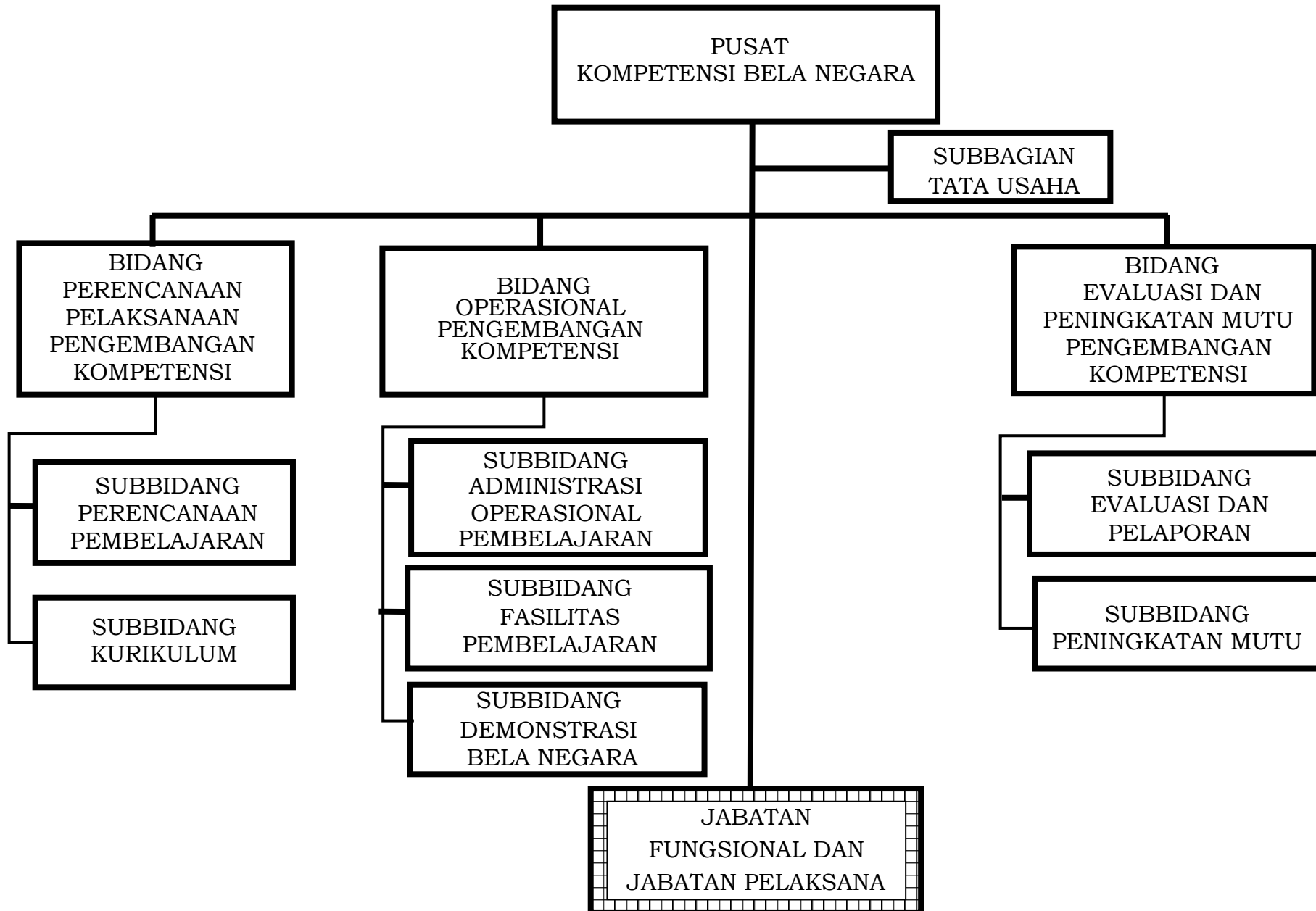


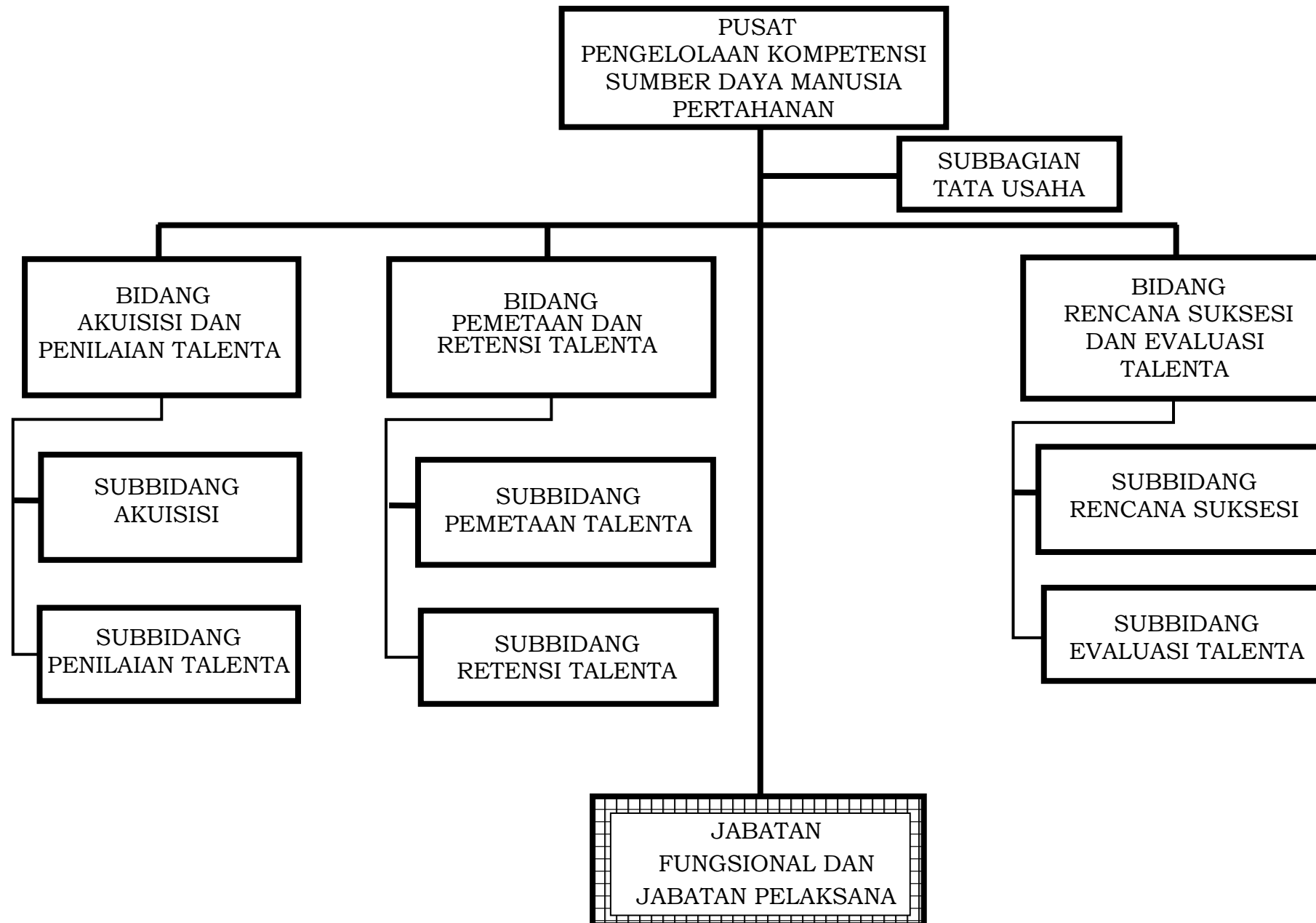


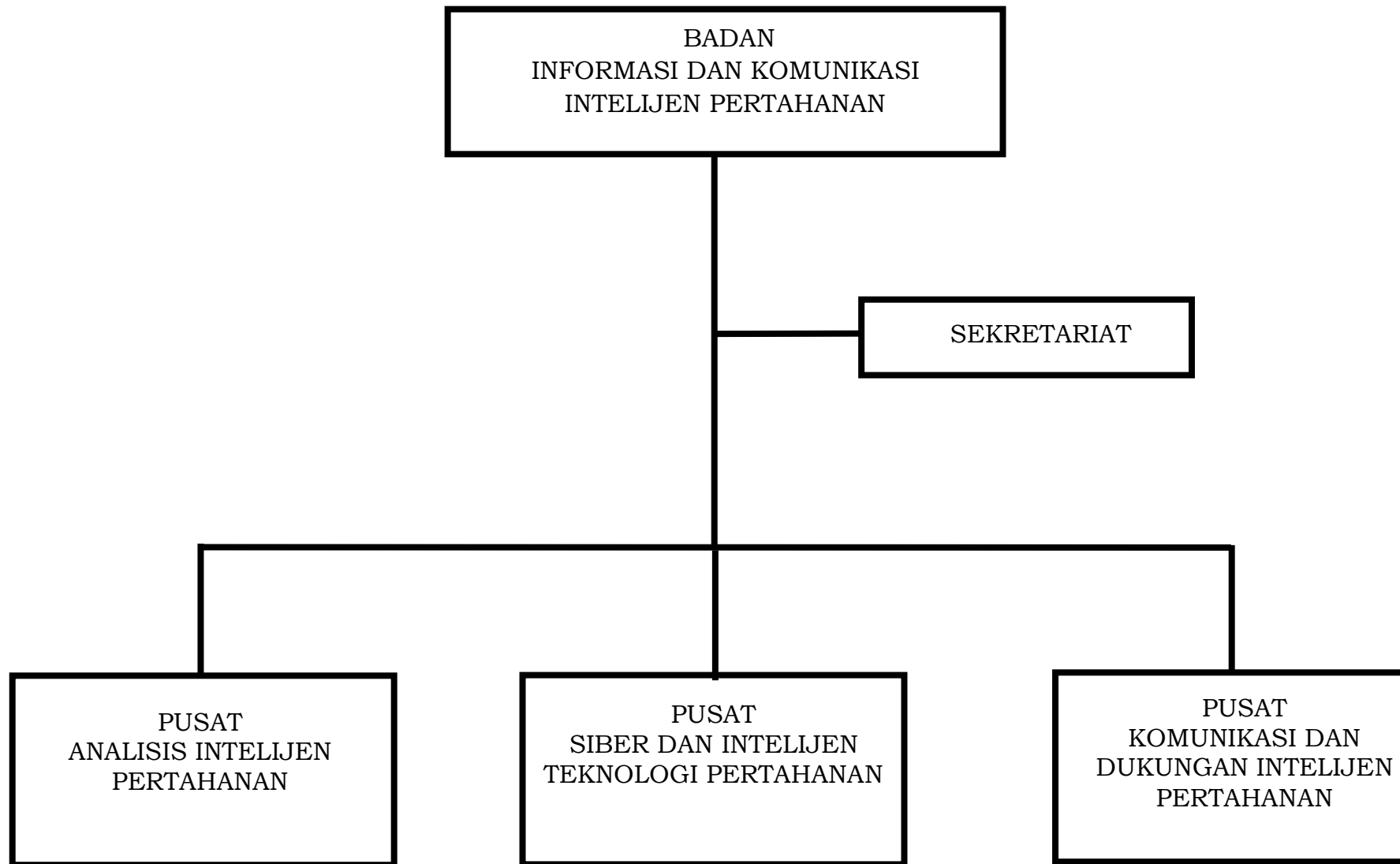


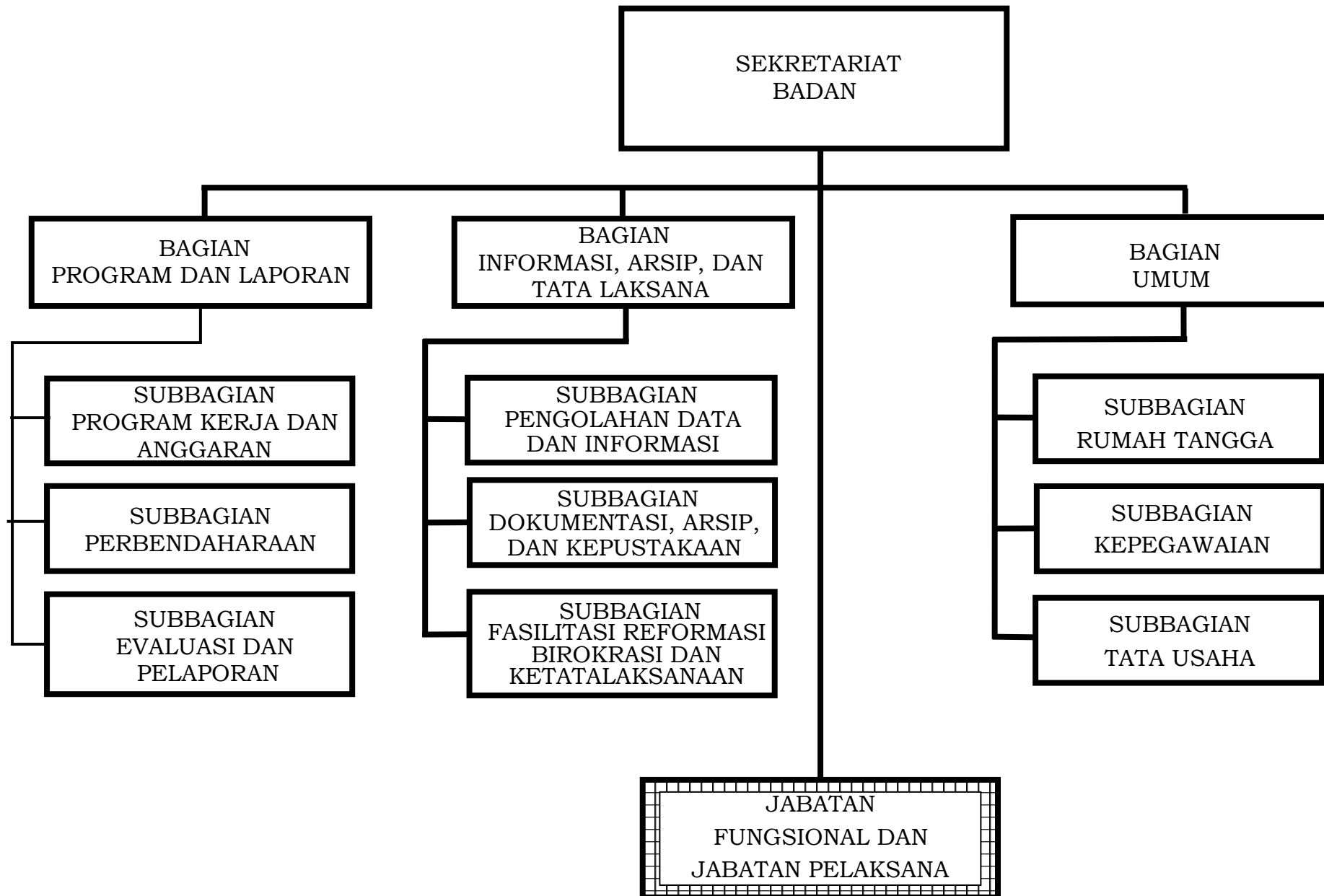


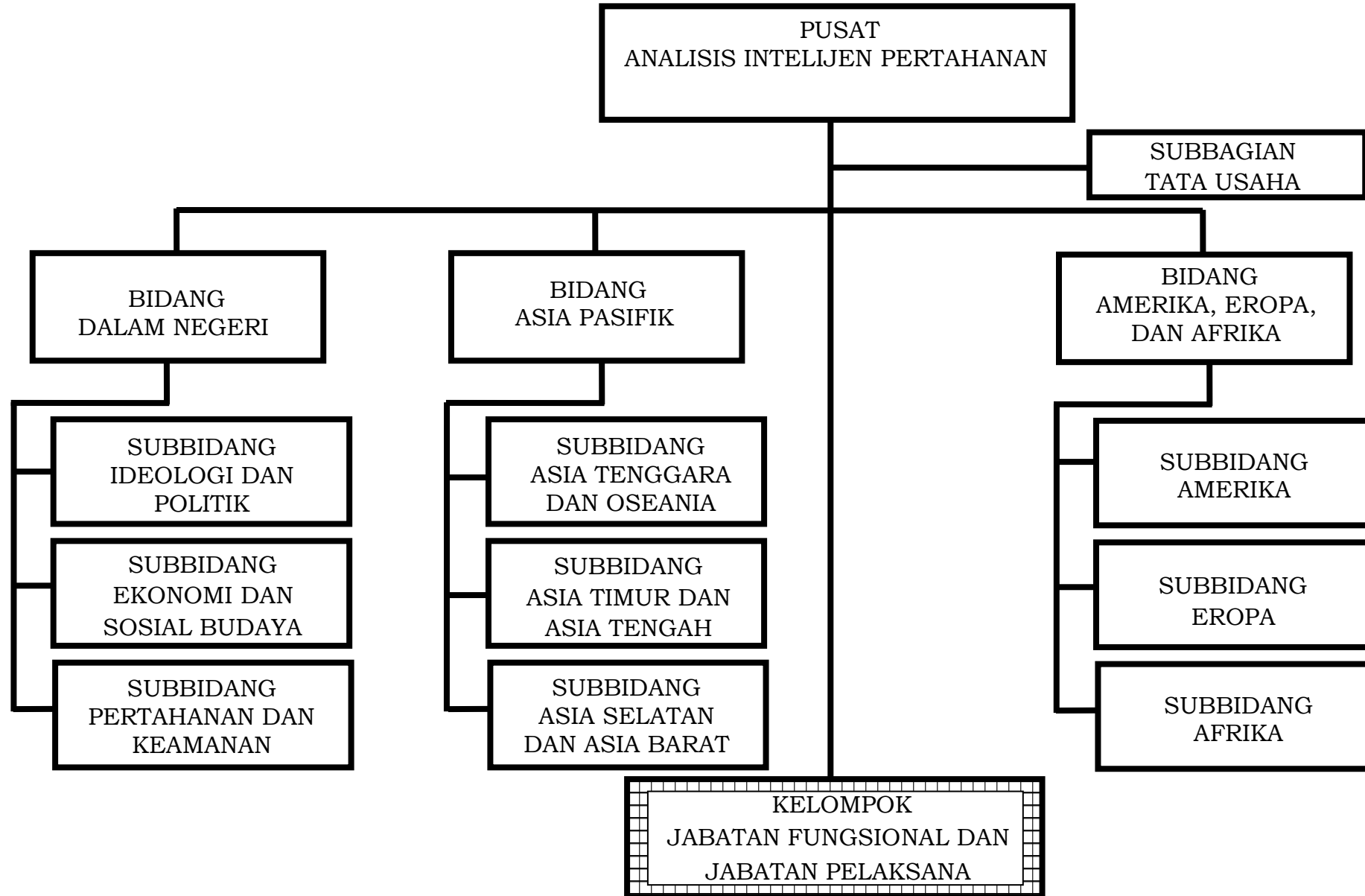


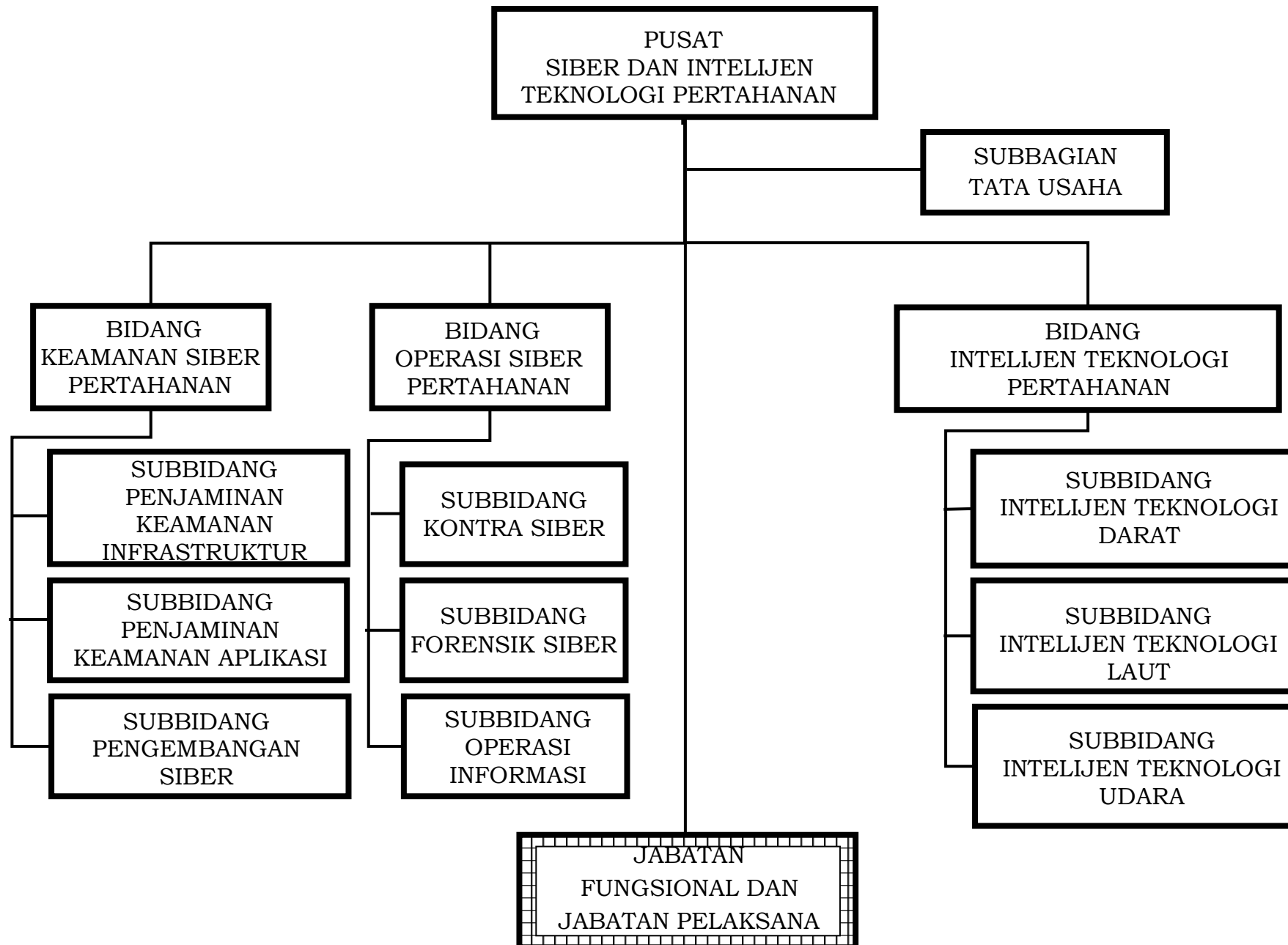


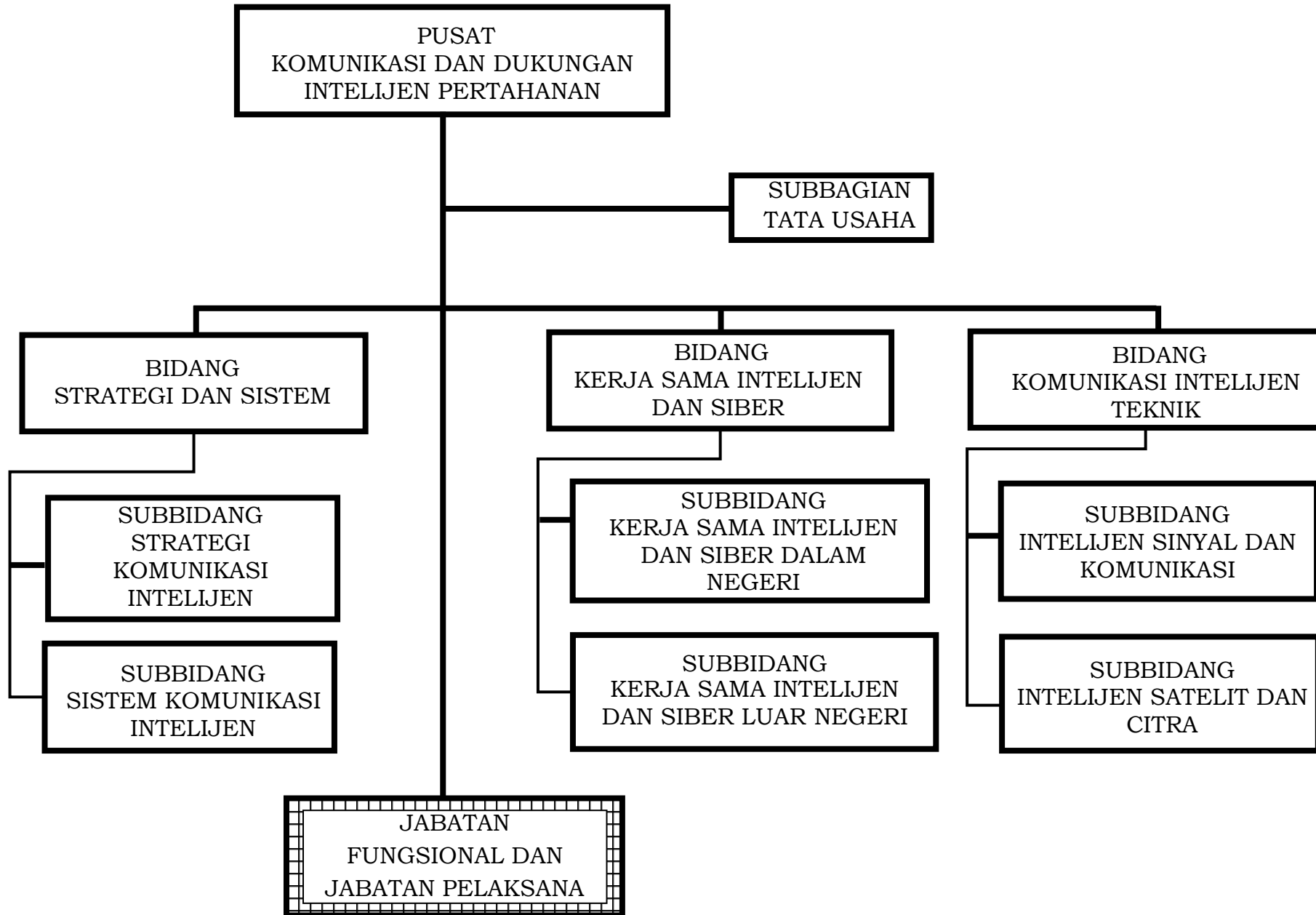


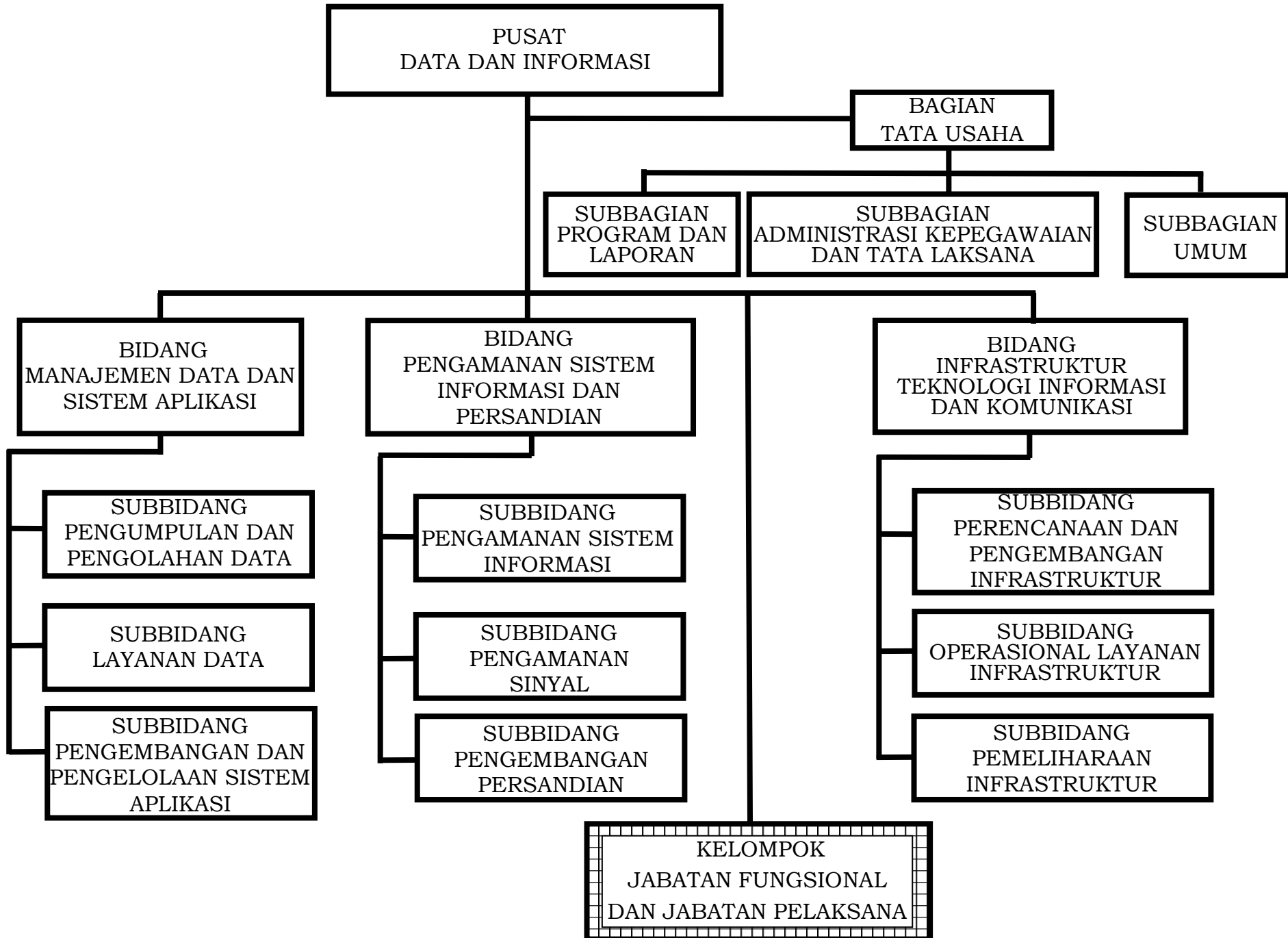


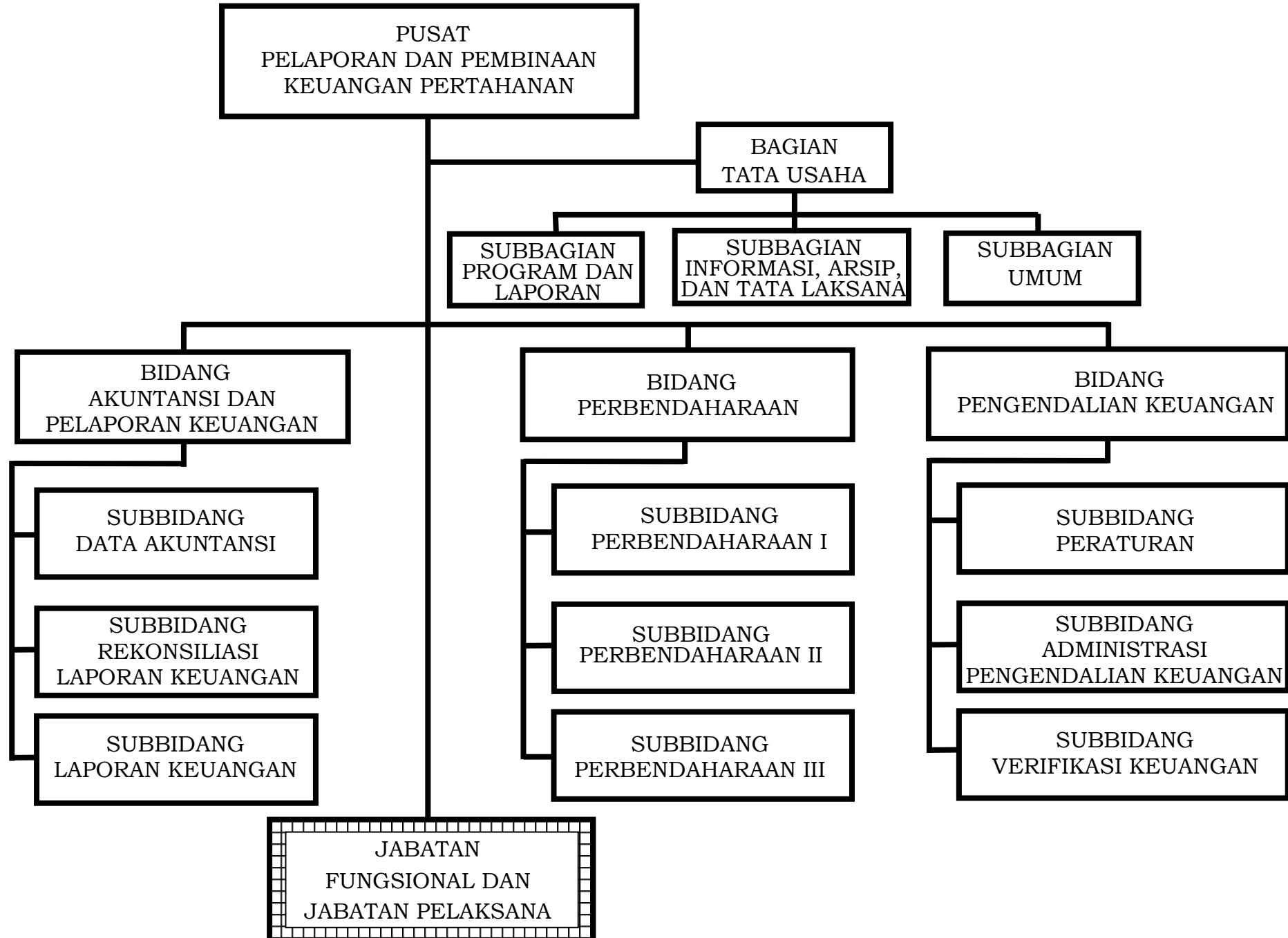


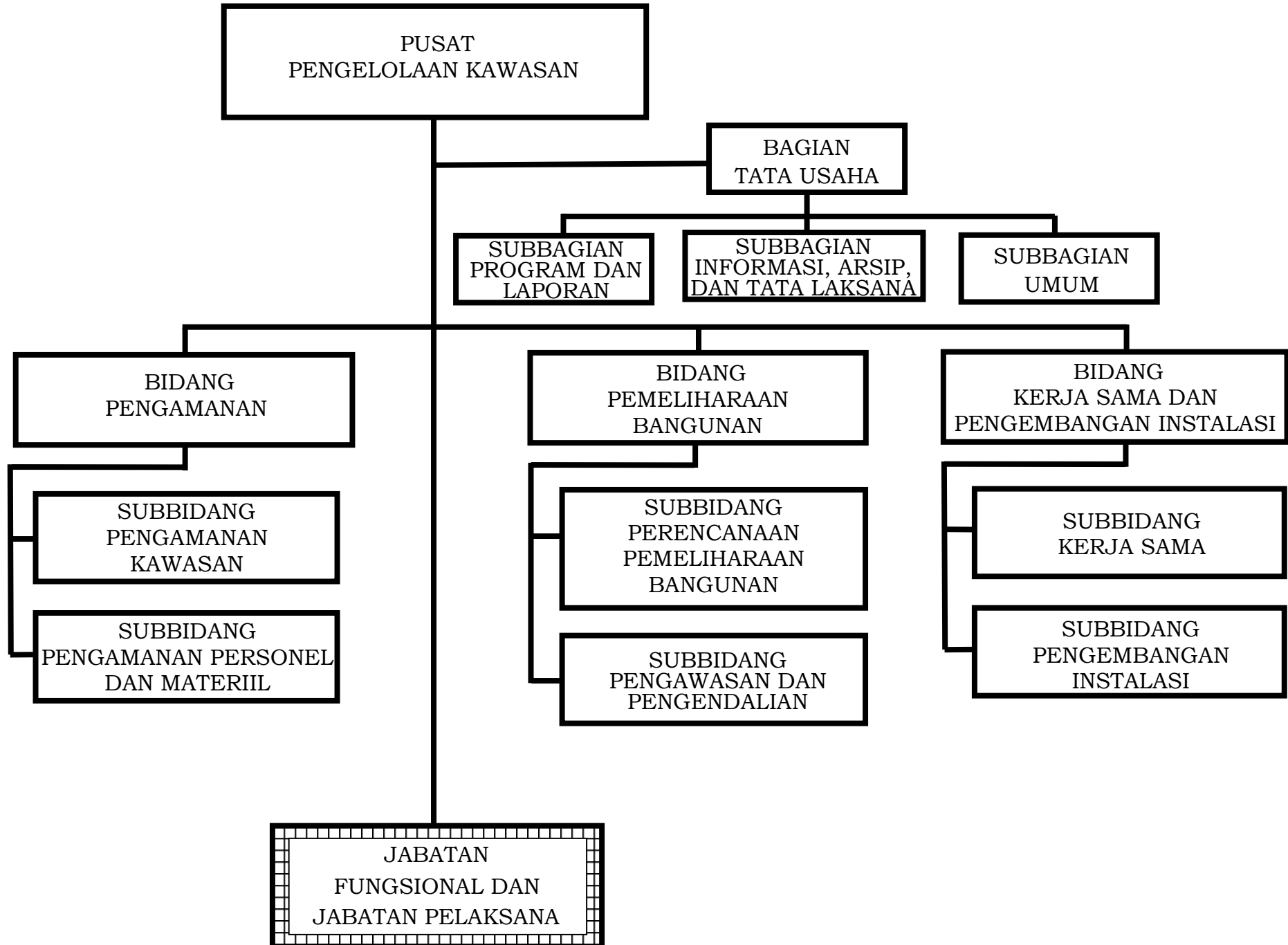


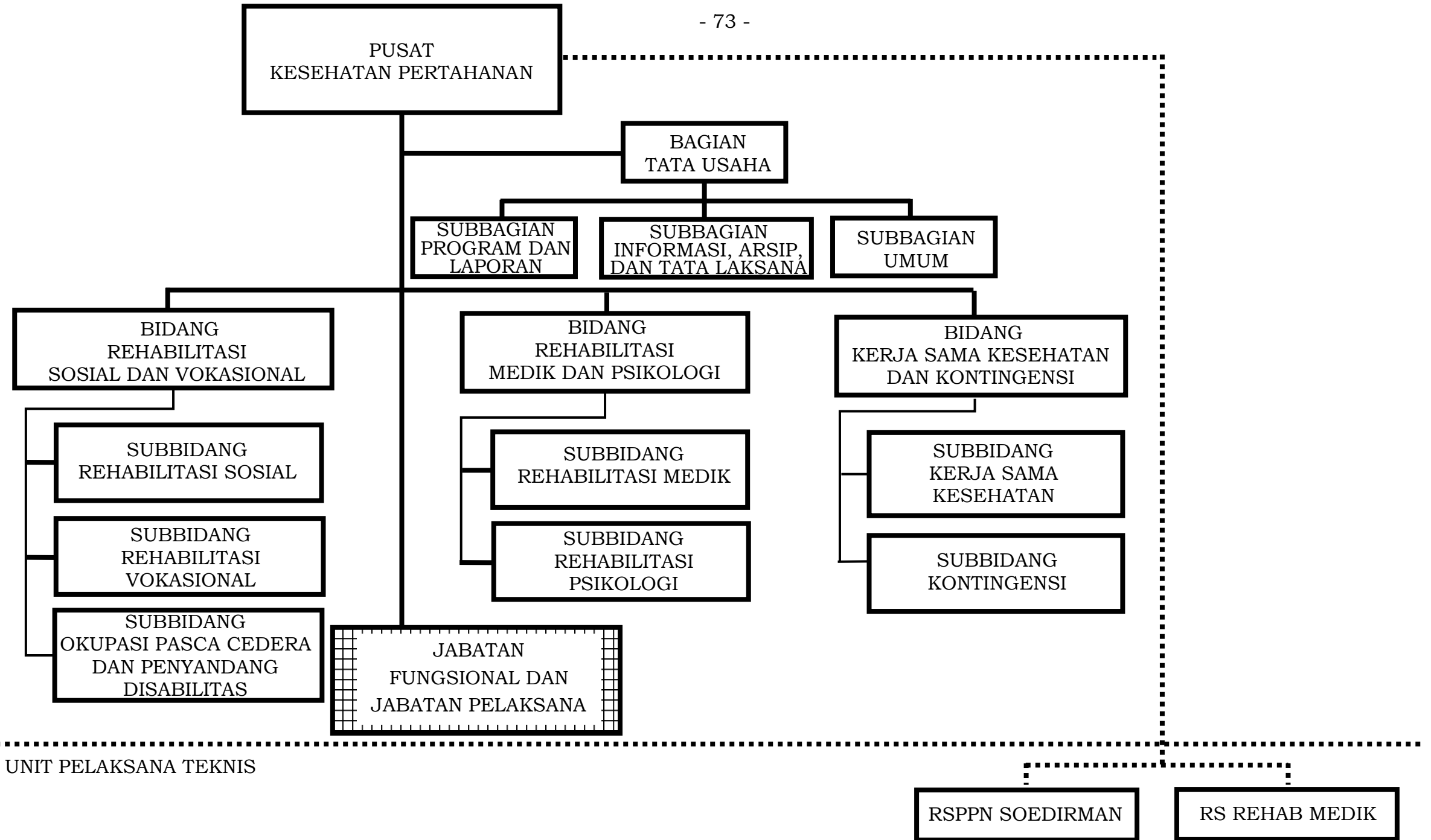


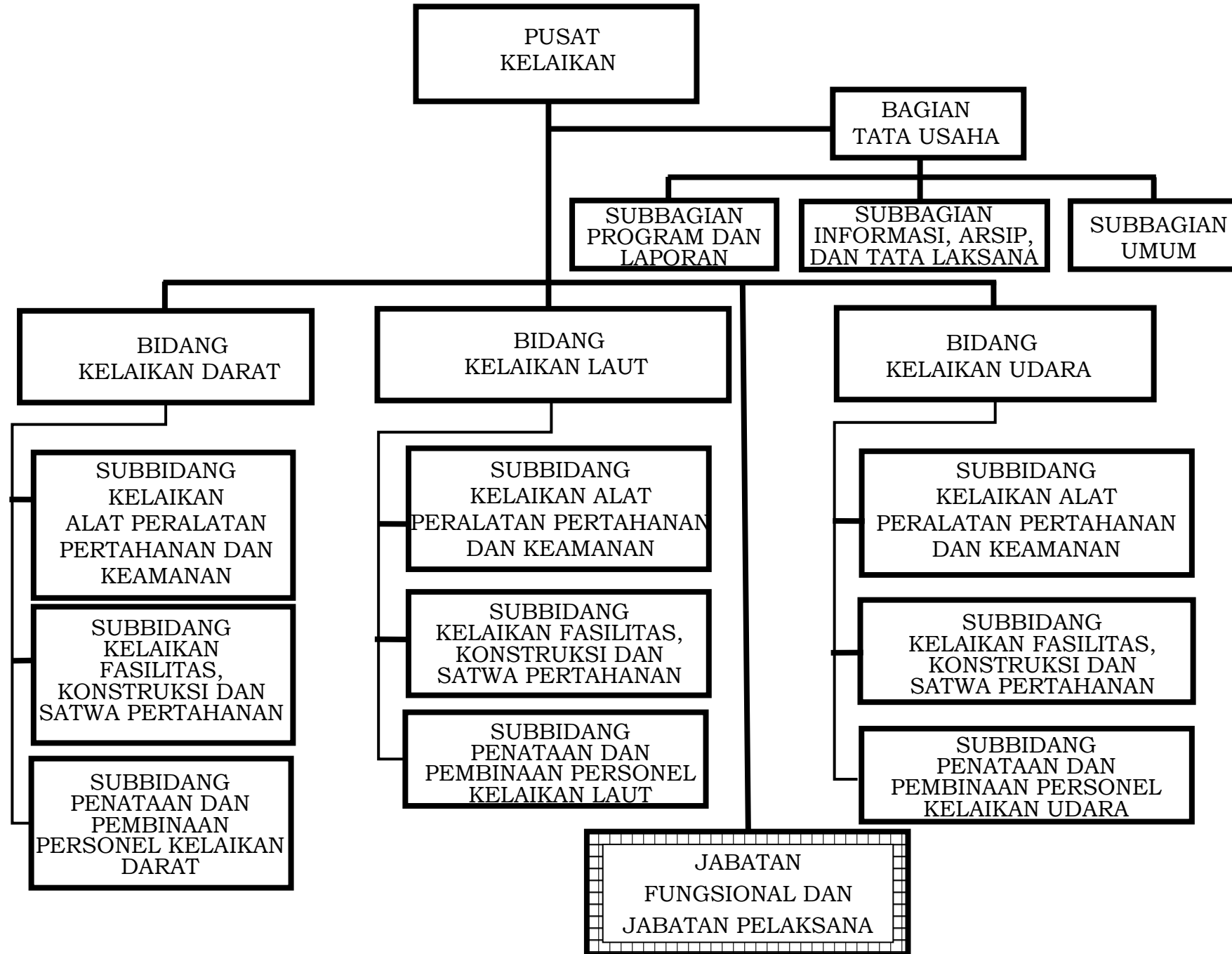












REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

| NO | BAGIAN                                              | ESELON |    |    |     |    | KET |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----|----|-----|----|-----|
|    |                                                     | IA     | IB | II | III | IV |     |
| 1  | 2                                                   | 3      | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   |
| 1  | SEKRETARIAT JENDERAL                                | 1      |    |    |     |    |     |
|    | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN                       |        |    | 1  | 4   | 11 |     |
|    | BIRO KEPEGAWAIAN                                    |        |    | 1  | 4   | 12 |     |
|    | BIRO HUKUM                                          |        |    | 1  | 4   | 11 |     |
|    | BIRO TATA USAHA DAN PROTOKOL                        |        |    | 1  | 4   | 12 |     |
|    | BIRO UMUM                                           |        |    | 1  | 4   | 12 |     |
|    | BIRO INFORMASI PERTAHANAN                           |        |    | 1  | 4   | 12 |     |
|    | BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA                    |        |    | 1  | 3   | 7  |     |
|    | BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                   |        |    | 1  | 4   | 12 |     |
| 2  | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN             | 1      |    | 5  | 21  | 60 |     |
| 3  | DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN          | 1      |    | 5  | 18  | 44 |     |
| 4  | DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN              | 1      |    | 5  | 14  | 37 |     |
| 5  | DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN             | 1      |    | 5  | 20  | 56 |     |
| 6  | INSPEKTORAT JENDERAL                                | 1      |    | 6  | 4   | 17 |     |
| 7  | BADAN LOGISTIK PERTAHANAN                           | 1      |    | 6  | 18  | 57 |     |
| 8  | BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERTAHANAN         | 1      |    | 4  | 11  | 25 |     |
| 9  | BADAN CADANGAN NASIONAL                             | 1      |    | 4  | 11  | 25 |     |
| 10 | BADAN TEKNOLOGI PERTAHANAN                          | 1      |    | 4  | 13  | 35 |     |
| 11 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN   | 1      |    | 5  | 16  | 42 |     |
| 12 | BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN PERTAHANAN | 1      |    | 4  | 12  | 36 |     |

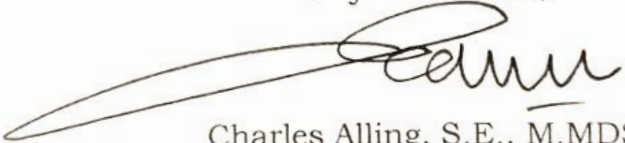
| NO | BAGIAN                                            | ESELON |    |    |     |     | KET |
|----|---------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-----|-----|
|    |                                                   | IA     | IB | II | III | IV  |     |
| 1  | 2                                                 | 3      | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   |
| 13 | STAF AHLI                                         |        | 4  |    |     |     |     |
| 14 | PUSAT DATA DAN INFORMASI                          |        |    | 1  | 4   | 12  |     |
| 15 | PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN PERTAHANAN |        |    | 1  | 4   | 12  |     |
| 16 | PUSAT PENGELOLAAN KAWASAN                         |        |    | 1  | 4   | 9   |     |
| 17 | PUSAT KESEHATAN PERTAHANAN                        |        |    | 1  | 4   | 10  |     |
| 18 | PUSAT KELAIKAN                                    |        |    | 1  | 4   | 12  |     |
|    | JUMLAH                                            | 12     | 4  | 66 | 209 | 578 |     |

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,



Charles Alling, S.E., M.MDS.  
Brigadir Jenderal TNI